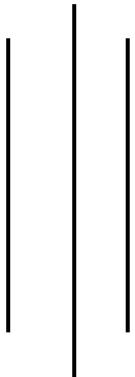


BUKU AJAR

PENDIDIKAN PANCASILA

DISUSUN



OLEH

HENNI ENDAYANI, M. Pd



FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
TAHUN AKADEMIK 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar ini. Shalawat berangkaikan salam semoga tetap tercurahkah kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kepada kita semua akan pentingnya ilmu pengetahuan. Buku Ajar ini berjudul “Media Pendidikan IPS” disusun sebagai bahan ajar pada perkuliahan semester ganjil 2024/2025.

Rasa terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan FITK UIN Sumatera Utara, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta pemikiran positif terhadap karir dan pengembangan dosen-dosen muda untuk terus berkarya. Wakil Dekan I FITK UIN Sumatera Utara yang banyak memberikan stimulus berupa ide-ide luar biasa dalam melihat persoalan pendidikan dan pengembangan potensi diri setiap orang agar berkembang keterampilan dan pengetahuannya. Akhirnya, penulis berdoa kepada Allah SWT semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan kita semua mendapatkan karunia dan ridha-Nya, Aamiin.

Medan, September 2024

Penulis

Henni Endayani, M.Pd

DAFTAR ISI

	HALAMAN
BAB 1. PENGERTIAN PANCASILA	1
BAB 2. LATAR BELAKANG PERLUNYA PENDIDIKAN PANCASILA	3
BAB 3. TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA	10
BAB 4. JANJI PERDANA MENTERI KOISO	12
BAB 5. PERUMUSAN DASAR NEGARA DAN UUD 1945	14
BAB 6. AKTIVITAS DI KALANGAN PEMUDA	19
BAB 7. (PPKI) DAN GOLONGAN PEMUDA	24
BAB 8. PERISTIWA RENGASDENGKLOK	28
BAB 9. PERUMUSAN TEKS PROKLAMASI	30
BAB 10. PROKLAMASI KEMERDEKAAN	33
BAB 11. SIDANG-SIDANG PPPI	37
BAB 12. DUKUNGAN TERHADAP PROKLAMASI	44
BAB 13. PEREBUTAN KEKUASAAN DAN SENJATA	46
BAB 14. MENYUSUN KEKUATAN PERTAHANAN KEAMANAN	51
BAB 15. PERTEMPURAN MELAWAN SEKUTU	55
BAB 16. PERTEMPURAN SURABAYA	58
BAB 17. PERTEMPURAN AMBARAWA	63
BAB 18. PERTEMPURAN MEDAN AREA	66
BAB 19. PERTEMPURAN PADANG DAN SEKITARNYA	68
BAB 20. PERTEMPURAN BANDUNG ATAU BANDUNG LAUTAN API	70
BAB 21. KARAKTERISTIK NEGARA INDONESIA	72
BAB 22. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA	94
BAB 23. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA	97
BAB 24. IDENTITAS NASIONAL INDONESIA	101
BAB 25. DEMOKRASI INDONESIA	112
BAB 26. GLOBALISASI	126
BAB 27. HAK ASASI MANUSIA	130
BAB 28. KETAHANAN NASIONAL	137

BAB 1

PENGERTIAN PANCASILA

Pembahasan dan asal kata Istilah Pancasila beserta makna yang terkandung di dalamnya sangat perlu dilakukan sebelum kita membahas isi, arti dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Secara etimologis istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dari India atau bahasa kasta Brahmana Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa prakerta.

Menurut Muhammad Yamin dalam bahasa sangketa perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu *Panca* artinya 5 dan *sila* vokal satu pendek artinya *batu, sendi alas, atau dasar* sila vokal i panjang artinya peraturan, tingkah laku yang baik, yang penting. kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan *Susila* yang artinya memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis kata Pancasila yang dimaksudkan adalah Pancasila dengan vokal pendek yang memiliki makna leksikal yaitu berbatu, sendi, lima atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewa Nagari bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting.

Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India ajaran Buddha bersumber pada kitab suci Tripitaka yang terdiri atas tiga macam buku besar yaitu *suttapitaka, abhidhamma, pitaka dan vinaya Pitaka*. Dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui samadi dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya ajaran-ajaran moral tersebut *Dasasyiila, Saptasyiila dan Pancasyiila*.

Ajaran Pancasila menurut muda adalah 5 aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam. Pancasila yang berisi 5 larangan atau pantangan itu secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Jangan mencabut nyawa makhluk hidup atau dilarang membunuh
2. Janganlah mengambil barang yang tidak diberikan maksudnya dilarang mencuri
3. Janganlah berhubungan kelamin maksudnya dilarang berzina
4. Janganlah berkata palsu atau dilarang berdusta
5. Janganlah meminum minuman yang menghilangkan pikiran yang maksudnya dilarang meminum minuman keras

Dengan masuknya kebudayaan India ke Indonesia melalui penyebaran agama Hindu dan Budha maka ajaran Pancasila budhisme masuk ke dalam kepustakaan Jawa terutama pada zaman Majapahit. Perkataan Pancasila dalam Khazanah kesastraan nenek moyang kita zaman keemasan Majapahit di bawah rahaga raja Hayam Wuruk atau Patih Gajah Mada dapat ditemukan dalam kelompok negara Kertagama yang berupa kekawin atau syair pujian dalam Pujangga istana bernama Mpu *Prapanca* yang selesai ditulis tahun 1965.

Dalam seharga 53 bait kedua berbunyi sebagai berikut: *Yatnaggewani pansyila kertasanhskar bhisekaka karma*, artinya Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan atau Pancasila, begitu pula upacara-upacara ibadah dan penobatan-penobatan begitulah perkataan Pancasila dari bahasa Sansekerta menjadi bahasa Jawa kuno yang artinya tetap sama seperti yang terdapat pada zaman Majapahit.

Pada zaman Majapahit hidup berdampingan secara damai kepercayaan tradisi agama Hindu Siwa dan agama Buddha Mahayana dan campurannya tantrayana. Dalam kehidupan tersebut Setiap pemeluk agama beserta alirannya terdapat Penghulunya atau kepala urusan agama kepala penghulu Budha tersebut Dharmadyaksa ajaran moral muda atau Pancasila masih juga dikenal di dalam masyarakat Jawa yang disebut dengan lima larangan atau lima pantangan yaitu dilarang:

1. Materi artinya membunuh
2. Maling artinya mencuri
3. Madun artinya berzina
4. Mabuk artinya meminum minuman keras atau menghisap cандu
5. dan Main artinya berjudi

Semua huruf dari 5 ajaran moral tersebut diawali dengan huruf M atau dalam bahasa Jawa disebut ma oleh karena itu 5 prinsip moral tersebut dinamakan malima atau M5 yaitu 5 larangan.

BAB 2

LATAR BELAKANG PERLUNYA PENDIDIKAN PANCASILA

A. Latar Belakang Historis

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang. Proses sejarah itu dimulai sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Demak, Pajang dan Mataram sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa.

Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menemukan jati dirinya yang didalamnya tersimpul ciri khas sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain yang oleh para pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam meliputi lima prinsip atau 5 sila yang kemudian diberi nama Pancasila.

Dalam hidup berbangsa dan bernegara dewasa ini terutama dalam masa reformasi bangsa Indonesia sebagai bangsa harus memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di dalam tengah-tengah masyarakat internasional. Dengan kata lain bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana bukan melalui satu kekuasaan atau hegemoni ideologi melainkan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa.

Secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia. Secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Asal usul nilai-nilai Pancasila tidak lain dari bangsa Indonesia sendiri atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kuasa materialis Pancasila. Dengan demikian, berdasarkan fakta objektif secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila.

Atas dasar pengertian dan alasan penting bagi generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan berdasarkan pendekatan ilmiah yang pada gilirannya akan memiliki suatu kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya sendiri materi inilah yang dalam kurikulum internasional disebut *civic education* yaitu mata kuliah yang membahas tentang National filosofi bangsa Indonesia. Hal ini harus dipahami oleh seluruh generasi penerus bangsa karena bangsa Indonesia secara historis memiliki kebudayaan, adat istiadat serta nilai-nilai keagamaan yang secara historis melekat pada bangsa Indonesia.

Secara historis Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila yang akan dijadikan dasar negara tersebut dalam proses perumusannya digali atau berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia, pandangan hidup masyarakat kemudian dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa lebih lanjut pandangan hidup bangsa itu dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara atau dasar negara.

Bukti atau fenomena historis yang menjadi landasan bahwa Pancasila akan dijadikan dasar negara dapat disimak dari peristiwa-peristiwa ungkapan-ungkapan dan pernyataan berikut:

Dalam pembukaan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 dokter KRT Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua Badan penyidik meminta agar sidang mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin pada permulaan pidato dalam sidang badan penyelidikan antara lain mengatakan sebagai berikut:

kewajiban untuk ikut menyelidikan bahan-bahan yang mendasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam susunan kemerdekaan yang setelah diakui dan telah dibela oleh rakyat Indonesia dengan mengorbankan darah daging sejak beratus-ratus tahun atau naskah persiapan undang-undang Dasar 1945.

R.P. Suroso pada waktu memberi peringatan kepada Muhammad Yamin dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 antara lain mengatakan sebagai diterangkan oleh ketua Tuan Radjiman yang dibicarakan ialah dasar-dasar negara Indonesia merdeka atau naskah persiapan undang-undang Dasar 1945.

Muhammad Soepomo dalam pidato BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 antara lain mengatakan soal yang kita bicarakan ialah Bagaimana akan dasar-dasar Negara Indonesia merdeka.

Insinyur Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 Dalam sidang-sidang penyelidik atau BPUPKI antara lain menyebutkan bahwa yang diminta oleh ketua Badan penyidik adalah agar sidang mengemukakan dasar negara merdeka yaitu *filosofi grandslag* atau dasar falsafah negara Indonesia merdeka tersebut yakni Pancasila.

Di dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter tercantum kalimat sebagai berikut:

Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan atau perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (naskah persiapan undang-undang Dasar 1945).

Di dalam Pembukaan undang-undang Dasar 1945 tercantum kalimat:

Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan undang-undang dasar bagi negara Republik Indonesia dengan menetapkan undang-undang Dasar 1945 itu maka Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan undang-undang Dasar 1945 secara resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia.

Dengan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia dan dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara ternyata tidak secara otomatis Pancasila dapat dilaksanakan secara benar dan konsekuensi di beberapa tempat terjadi berbagai macam pemberontakan dan penyelewengan terhadap Pancasila tersebut.

Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan hidup lainnya secara bebas hidup dan berkembang di negara Indonesia pandangan hidup lain itu berkembang menjadi sikap yang sangat mengutamakan kepentingan golongan atau daerah di atas kepentingan nasional. Peristiwa G30 S/PKI Lubang Buaya pada tahun 1965 misalnya merupakan salah satu bukti pemberontakan yang ingin menyelewengkan Pancasila dan pengganti dengan ideologi lain yaitu paham komunis.

Sebab utama terjadinya penyelewengan ialah karena Pancasila yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa belum dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bernegara memperhatikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang mengikat seluruh warga negara. Dengan memperhatikan peristiwa historis terjadinya pemberontakan dan penyelewengan terhadap Pancasila maka ada kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia untuk memahami mengamalkan dan mengamankan Pancasila, salah satu upaya untuk itu semua Pancasila harus diperluaskan melalui pendidikan Pancasila itu sendiri.

B. Latar belakang kultural

Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki satu pandangan hidup, filsafat hidup serta pegangan hidup agar tidak terus mengambil dalam kancan pergaulan masyarakat internasional. Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Negara komunisme dan liberalisme

meletakkan dasar filsafat negaranya pada suatu konsep ideologi tertentu misalnya komunisme berdasarkan ideologinya pada suatu konsep pemikiran Karl Marx.

Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam peran masyarakat berbangsa dan bernegara Pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis pada pendiri negara seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta Soepomo serta tokoh pendiri negara lainnya.

Karya besar bangsa Indonesia yang sejajar dengan karya besar bangsa lain di dunia adalah hasil pemikiran tentang bangsa dan negara yang mendasarkan pandangan hidup suatu prinsip nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila, oleh karena itu para generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus sudah seharusnya berusaha memahami secara dinamis dalam arti mengembangkan yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu Pancasila harus diwariskan kepada generasi bangsa Indonesia melalui pendidikan, tanpa usaha mewariskan bangsa akan kehilangan hasil budaya atau kultural yang terpenting, bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya oleh karena itu perlu adanya upaya pewarisan budaya tersebut melalui pendidikan Pancasila.

C. Latar Belakang Yuridis

Landasan yuridis perkuliahan pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi tertuang dalam undang-undang dasar nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Hal ini mengandung makna bahwa secara material Pancasila merupakan sumber hukum pendidikan nasional, meskipun secara eksplisit dalam mata kuliah Pancasila tidak disebutkan dalam undang-undang Sisdiknas yang disebutkan pada pasal 37 bahwa kurikulum pendidikan tinggi memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan bahasa dan mata kuliah Pancasila adalah mata kuliah yang menjadi warga negara akan dasar filsafat negaranya.

Dengan dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan undang-undang Dasar 1945 mengandung konsekuensi bahwa Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara Indonesia sebagai dasar negara Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut.

Kardi dipoyudo mengatakan dengan demikian penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa moral bangsa telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupan.

Dengan demikian Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tertib hukum Indonesia atau sumber dasar nasional yaitu menjadi sumber bagi penyusunan peraturan perundang-undangan, aturan-aturan hukum yang dimaksudkan adalah undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan peraturan daerah atau ketetapan nomor 3 MPR/MPR/2000.

Apabila aturan-aturan itu dibuat berdasarkan ketentuan yang ada dan Pancasila atau undang-undang Dasar 1945 sebagai dasarnya maka selain hal itu menjamin sifatnya yang resmi dapat pula diharapkan bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih jelas, pelaksanaannya teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Konsekuensi landasan yuridis pendidikan Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembukaan undang-undang Dasar 1945

Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat Pembukaan undang-undang Dasar 1945 konsekuensinya maka Pancasila merupakan pokok kaidah yang fundamental peraturan hukum yang tertinggi merupakan rangka suasana dasar dan tujuan pendidikan

2. Undang-undang Dasar 1945

Pasal 31 undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa:

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan serta warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayanya,
- b. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang negara
- c. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja serta dari anggaran pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
- d. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia(undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen)

Pemerintah mengusahakan atas dasar kesepakatan atau konsensus nasional yang didudukkan sebagai dasar kerohanian, atas dasar filsafat, negara Indonesia dilaksanakannya

pendidikan Pancasila merupakan pelaksanaan amanat pokok pikiran keempat Pembukaan Yang intinya diwajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan Memegang teguh cita-cita orang rakyat yang luhur.

Seperti diketahui bahwa Pancasila tidak lain adalah asas-asas moral atau budi pekerti rakyat yang dijadikan pandangan hidup dan kemudian dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai warga negara kita wajib tunduk kepada hukum yang mengikat kita termasuk mempelajari Pancasila yang merupakan dasar filsafat negara apalagi.

Dengan adanya ketetapan nomor XVIII/MPR/1998 yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara tentunya adanya keharusan untuk mengaktualisasikan dalam sikap dan perbuatan yang nyata dalam hidup sebagai bangsa yang bernegara pendidikan, Pancasila adalah upaya yang menggali peserta didik untuk dapat mengaktualisasikan Pancasila dasar filsafat negara dalam sikap dan perbuatannya.

Sejarah operasional pendidikan Pancasila mempunyai Dasar yuridis untuk diselenggarakan yaitu USBN nomor 2/1989, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional maka jelas dan integrasilah bahwa Pendidikan Pancasila dan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan perguruan tinggi telah landasan alasan yuridis yang kuat.

D. Latar Belakang Filosofis

Pancasila adalah dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia, terkait dengan hal tersebut maka sudah menjadi keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai yang tercantum dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.

Secara filosofis sebelum didirikan negara bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan hal ini didasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang maha esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat merupakan unsur pokok negara sehingga secara filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan. Konsekuensi rakyat adalah dasar ontologis demokrasi karena rakyat merupakan salah satu kekuasaan negara.

Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup bernegara nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam merealisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi di masa ini merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan baik dalam pembangunan nasional ekonomi politik dan hukum, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Secara intrinsik nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofis dan secara praktis nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup, bangsa Indonesia nilai-nilai atau tata nilai itu tidak lain merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai segi atau bidang kehidupan suatu masyarakat atau bangsa dalam hal ini bangsa Indonesia.

Tata nilai suatu bangsa dipengaruhi oleh potensi kondisi bangsa kondisi alam dan Citra Karsa kemanusiaannya. Oleh karena itu, lebih lanjut ajaran filsafat itu demikian kuat mempengaruhi alam pikiran manusia berupa filsafat hidup filsafat negara etika Logika dan sebagainya.

BAB 3

TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan juga termuat dalam SKD TENDEKTI nomor 43/DIKTI/KEP/2006 dijelaskan bahwa tujuan materi pancasila dalam rambu-rambu pendidikan kepribadian mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang melancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan, agama, kebudayaan dan beraneka ragam jenis kepentingan, memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebanggaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dengan penuh rasa tanggung jawab dan bermoral.

Tujuan pendidikan diartikan sebagai seperangkat tindakan intelektual, penuh tanggung jawab yang berorientasi pada kompetensi mahasiswa pada bidang profesi masing-masing kompetensi lulusan pendidikan. Pancasila adalah seperangkat tindakan intelektual pada tanggung jawab sebagai seorang warga negara dalam memecahkan berbagai masalah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menetapkan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Sifat intelektual tersebut tercermin pada kemahiran ketepatan dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat pada tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan dilihat dari aspek iptek, etika ataupun kepatutan agama serta budaya.

Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berperilaku memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya, mengenal perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Melalui pendidikan Pancasila warga negara Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsa secara berkesinambungan dan konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

Pada hakikatnya pendidikan adalah upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya selaku warga masyarakat, bangsa dan negara secara berguna atau berkaitan dengan kemampuan spiritual dan bermakna berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik. Selain itu, pendidikan

diharapkan mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya bangsa negara dan hubungan internasionalnya.

Pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan global yang digambarkan sebagai kehidupan penuh dengan paradoksal dan keterdugaan. Kemampuan warga negara dari suatu negara untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan, membahas perubahan masa depannya sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa, nilai-nilai dasar negara tersebut akan menjadi panduan dan mewarnai keyakinan serta pegangan hidup warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan wawasan dan kesadaran bernegara, cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara dan kewaspadaan nasional kepada para mahasiswa calon ilmuwan yang senantiasa mengkaji dan akan menguasai IPTEK dan seni menjadi tuntutan tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan. Kualitas warga negara akan ditentukan terutama oleh keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara di samping derajat penguasaan iptek yang dipelajarinya.

Pendidikan IPTEK dan seni di perguruan tinggi dirancang dalam kurikulum suatu bidang studi yang memuat dasar-dasar keilmuan dan keterampilan, maka kuliah keahlian dan perilaku berkarya sesuai dengan disiplin ilmu yang diasuh isi kurikulum seperti itu perlu dibekali dengan dasar-dasar sikap, perilaku dan kepribadian peserta didik untuk membekali pengetahuan, keterampilan serta efek tuntutan dari Iptek dan seni yang didapatnya.

Pembahasan berkenaan dengan pemupukan nilai-nilai sikap-sikap dan kepribadian seperti tersebut di atas diandalkan pada pendidikan Pancasila, Pendidikan agama, Pendidikan Kewarganegaraan, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar dan ilmu alamiah dasar yang disebut kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian dengan komponen kurikulum kurikulum tinggi.

BAB 4

JANJI PERDANA MENTERI KOISO

Pada tanggal 7 September 1944 di dalam sidang istimewa ke-85 Teikoku Ginkai atau parlemen Jepang di Tokyo, Perdana Menteri Koiso atau pengganti Perdana Menteri Tojo mengumumkan tentang pendirian atau pemerintah kemaharajaan Jepang bahwa daerah Hindia Timur atau Indonesia diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Sebenarnya yang menyebabkan dikeluarkannya pernyataan tersebut adalah karena semakin terjepitnya Angkatan Perang Jepang. Dalam bulan Juli 1944 keputusan Saipan yang letaknya sudah sangat dekat dengan Kepulauan Jepang jatuh ke tangan Amerika yang menimbulkan keguncangan dalam masyarakat Jepang.

Situasi Jepang semakin memburuk di dalam bulan Agustus 1944. Terbukti bahwa moril masyarakat mulai mundur, produksi perang merosot, yang mengakibatkan kurangnya persediaan senjata dan amunisi. Ditambah dengan timbulnya soal-soal logistik karena hilangnya sejumlah besar kapal angkut dan kapal perang.

Faktor-faktor yang tidak menguntungkan tersebut menyebabkan jatuhnya kabinet Tojo, pada tanggal 17 Juli 1944 dan diangkatnya Jenderal Kuniaki Koiso sebagai penggantinya. Salah satu langkah yang diambilnya guna mempertahankan pengaruh Jepang di antara penduduk negeri-negeri yang didudukinya ialah dengan cara mengeluarkan pernyataan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Dengan cara demikian, Jepang mengharapkan bahwa sekutu akan disambut oleh penduduk, tidak sebagai pembebas rakyat tetapi sebagai penyerbuk ke negara merdeka.

Dalam tahun 1944 dengan jatuhnya Saipan dan dipukul mundurnya Angkatan Perang Jepang oleh Angkatan perang Sekutu dari Papua Nugini, kepulauan Solomon dan kepulauan Marshall seluruh garis pertahanan di Pasifik mulai bobol yang berarti kekalahan Jepang telah terbayang. Kemudian Jepang mengalami serangan udara sekutu atas kota-kota Ambon, Makassar, Manado dan Surabaya. Bahkan tentara sekutu telah pula mendarat di daerah-daerah minyak seperti Tarakan dan Balikpapan.

Menghadapi situasi yang kritis itu pemerintah pendudukan Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan badan penyelidikan usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), tindakan ini merupakan langkah konkret pertama bagi pelaksanaan janji Koiso tentang kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari. Tujuannya ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka.

Susunan pengurusnya terdiri atas sebuah badan perundingan dan kantor tata usaha. Badan perundingan terdiri dari ketua, dua orang wakil ketua, dan 60 anggota termasuk 4 orang golongan Arab serta golongan peranakan Belanda. Di samping itu terdapat pula 7 orang anggota Jepang yang duduk dalam pengurus istimewa yang akan menghadiri setiap sidang tetapi tidak mempunyai hak suara.

Pengangkatannya diumumkan pada tanggal 29 April 1945 dan yang diangkat menjadi ketua bukanlah Insinyur Soekarno yang saat itu dikenal sebagai salah satu di daerah pimpinan nasional utama melainkan dokter KRT Radjiman Wedyodiningrat. Pengangkatan itu disetujui oleh Insinyur Soekarno yang menganggap bahwa kedudukannya sebagai seorang anggota biasa dalam Badan tersebut akan lebih mempunyai kemungkinan besar untuk aktif di dalam diskusi diskusi. Fuku Kaico pertama dijabat oleh seorang Jepang yaitu Shu bukan Cirebon bernama Ichibangase dan R.P. Suroso diangkat pula sebagai kepala sekretariat BPUPKI dengan dibantu oleh Toyohito Musada dan Mr. A. G. Pringgodigdo.

BAB 5

PERUMUSAN DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pada tanggal 28 Mei 1945 dilangsungkan upacara peresmian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI bertempat di gedung Chuo O Sangi In, Jalan pejambon Jakarta atau sekarang gedung Departemen Luar Negeri. Jenderal Itagaki atau panglima tentara wilayah ketujuh yang bermarkas di Singapura dan membawahi tentara tentara yang bertugas di Indonesia dan Letnan Jenderal Nagano atau panglima tentara ke-16 yang baru di Jawa menghadiri sidang tersebut.

Pada kesempatan itu pula dilakukan upacara pengibaran bendera Hinomaru oleh Mr. A. G. Pringgodigdo dan pengibaran bendera sang merah putih oleh toyohiko masuda. Peristiwa tersebut telah membangkitkan semangat para anggota dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Dokuritsu Junbi Cosakai atau yang disingkat badan penyelidik mulai mengadakan persidangan untuk merumuskan undang-undang dasar dimulai dengan persoalan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Dalam kata pembukaannya ketua Dr Radjiman Wedyodiningrat meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia Merdeka yang akan dibentuk itu. Ternyata ada tiga anggota yang memenuhi permintaan ketua yakni secara khusus membicarakan dasar negara. Mereka itu adalah Mr. Muhammad Yamin, Dr. Mr. Supomo, Ir. Soekarno.

Hari pertama dari persidangan pertama badan penyelidik tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin memulai pidatonya antara lain dengan kata-kata sebagai berikut:

Kewajiban yang terpikul di atas kepala dan kedua bahu kita ialah suatu kewajiban yang sangat teristimewa. kewajiban itu untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang akan menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan.

Di dalam pidato selanjutnya Mr Muhammad Yamin mengemukakan lima asas dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Peri kebangsaan
- b. Peri kemanusiaan
- c. Peri ketuhanan
- d. Peri kerakyatan
- e. Kesejahteraan Rakyat

Pada tanggal 31 Mei 1945 Dr Mr Soepomo memulai pidatonya dengan kalimat sebagai berikut:

Bahwa jika hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun. Menurut aliran pikiran ini kepala negara badan-badan pemerintah lain harus bersifat pemimpin yang sejati penunjuk jalan ke arah cita-cita luhur yang diidam-idamkan oleh rakyat. Negara harus bersifat hukum yang timbul dari hati Sanubari rakyat seluruhnya.

Profesor Soepomo juga memasarkan pembicaraannya kepada Dasar Negara Indonesia merdeka. Dasar-dasar yang diajukan untuk Indonesia merdeka adalah:

- a. Persatuan
- b. Kekeluargaan
- c. Keseimbangan lahir dan batin
- d. Musyawarah dan keadilan rakyat

Keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 1945 berlangsunglah rapat terakhir dalam persidangan pertama itu. Pada kesempatan itulah Insinyur Soekarno mengucapkan pidatonya yang kemudian dikenal dengan judul lahirnya Pancasila.

Pada kesempatan itu Insinyur Soekarno di dalam pidatonya mengemukakan perumusan 5 prinsip dasar negara Indonesia merdeka dengan usul nama antara lain Pancasila sebagai berikut:

- a. Kebangsaan Indonesia
- b. Internasionalisme atau perikemanusiaan
- c. Mufakat atau demokrasi
- d. Kesejahteraan Sosial
- e. Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam pidatonya Insinyur Soekarno antara lain mengatakan:

Saudara-saudara dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan gen di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.

Dengan berakhirnya rapat tanggal 1 Juni itu selesailah pula seluruh persidangan pertama BPUPKI. Persidangan itu telah menghasilkan suatu kesimpulan atau perumusan. Selama persidangan berlangsung anggotanya hanya mendengarkan pemandangan umum para pembicara yang mengetengahkan usul-usul rumusan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Setelah Presiden pertama itu selesai diadakan lah reses selama 1 bulan lebih.

Sebelum memasuki Resesi itu badan penyelidik membentuk suatu panitia kecil di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan anggota lainnya Muhammad Hatta, Sutarjo kartohadikusumo, Wahid Hasyim, Ki bagus Hadikusumo, Otto Iskandardinata, Muhammad Yamin, dan AA Maramis. Ke semuanya berjumlah 8 orang dan mereka bertugas menampung saran-saran, usul-usul, konsepsi konsepsi para anggota yang oleh ketua telah diminta untuk diserahkan melalui sekretariat.

Pada rapat pertama persidangan kedua badan penyelidik pada tanggal 10 Juli 1945 panitia kecil Itu dimintai laporan oleh ketua Radjiman yang telah pula dipenuhi oleh ketua Insinyur Soekarno.

Insinyur Soekarno melaporkan bahwa panitia kecil pada tanggal 22 Juni mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang sebagian diantaranya sedang menghadiri sidang *Chuo Sangi In*. Pertemuan itu oleh Insinyur Soekarno ditegaskan merupakan rapat pertemuan antara panitia kecil dengan anggota-anggota BPUPKI. Hasil pertemuan itu adalah telah ditampungnya suara-suara dan unsur-unsur lisan dari pihak anggota badan penyelidik.

Dalam pertemuan itu dibentuk sebuah panitia kecil lain yang anggotanya berjumlah 9 orang. Kesembilan anggota itu berkumpul untuk menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pemandangan umum para anggota dan kemudian terkenal dengan sebutan Panitia Sembilan yang terdiri dari:

1. Insinyur Soekarno,
2. Muhammad Hatta,
3. Muhammad Yamin,
4. Ahmad Subarjo,
5. Mr AA Maramis,
6. Abdul Kahar Muzakir,
7. Wahid Hasyim,
8. Agus Salim dan
9. Abikusno Tjokrosujoso.

Mereka menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka yang akhirnya diterima dengan suara bulat dan ditandatangi oleh Muhammad Yamin. Rumusan hasil Panitia Sembilan itu kemudian diberi nama Jakarta Charter atau piagam Jakarta. Rumusan kolektif daripada Dasar Negara Indonesia merdeka tersebut sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perumusan terakhir draft dasar negara dilakukan pada persidangan kedua mulai tanggal 10 Juli 1945. Pada kesempatan itu dibahas tentang wilayah negara, persiapan rancangan undang-undang dasar, pembentukan panitia perancang undang-undang dasar, pembelaan tanah air serta keuangan dan perekonomian. Panitia perancang undang-undang dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan 18 orang anggota yaitu:

1. Mr. AA Maramis,
2. Otto Iskandardinata,
3. Poesroebojo,
4. Agus Salim,
5. Mr Ahmad Soebardjo,
6. Profesor Doktor Mister Soepomo,
7. Maria Ulfa Santoso,
8. Wahid Hasyim,
9. parada Harahap,
10. Latuharhary,
11. R. P. Singgih,
12. Tan Eng Hiat,
13. P. A. Hoesein Djajadiningrat,
14. Dr. Sukiman.

Dalam rapatnya pada tanggal 11 Juli panitia perancang undang-undang dasar dengan suara bulat menyetujui isi primbon yang diambil dari Piagam Jakarta. Panitia tersebut kemudian membentuk sebuah panitia kecil perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Prof Dr Mr Soepomo dengan anggota-anggotanya: Wangsonegoro, Ahmad Subarjo, Mr AA Maramis, R. P. Singgih, Agus Salim dan dokter Sukiman.

Pada rapat tanggal 13 Juli 1945 diputuskan hasil perumusan panitia kecil disempurnakan bahasanya oleh sebuah panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Husein Djajadiningrat Agus Salim dan Soepomo. Panitia itu bertugas pula menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan undang-undang dasar yang sudah dibahas itu.

Persidangan kedua BPUPKI dilanjutkan pada tanggal 14 Juli 1945 untuk menerima laporan panitia perancang undang-undang dasar Insinyur Soekarno selaku ketua panitia melaporkan tiga hasil panitia yaitu:

1. Pernyataan Indonesia merdeka
2. Pembukaan undang-undang dasar
3. Undang-undang dasarnya sendiri atau batang tubuhnya

Adapun konsep pernyataan Indonesia merdeka disusun dengan mengambil 3 alinea pertama Piagam Jakarta dengan sisipan yang panjang sekali terutama di antara alinea pertama dan alinea kedua. Konsep pembukaan undang-undang dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat dari terakhir Piagam Jakarta. Kedua konsep itu diterima oleh sidang setelah berlangsungnya diskusi lebih kurang satu jam.

Sidang kedua BPUPKI dilanjutkan dengan rapat besar tanggal 15 Juli 1945 dengan cara pembahasan lanjutan rancangan undang-undang dasar dalam laporannya kepada Insinyur Soekarno menyatakan:

Kita rancangkan undang-undang Dasar dengan kedaulatan rakyat bukan kedaulatan individu. Kedaulatan rakyat Sekali lagi bukan kedaulatan individu, inilah menurut paham panitia perancang undang-undang dasar satu-satunya jaminan bahwa dengan Indonesia seluruhnya akan selamat kemudian hari. Jadi kan paham kita ini pun dipakai oleh bangsa-bangsa lain itu akan memberi jaminan akan perdamaian dunia kekal dan abadi marilah kita menunjukkan keberanian kita dalam menjunjung hak kedaulatan bangsa kita.

Pada sidang kedua rapat besar tanggal 16 Juli 1945 ketua sidang Dr Radjiman sebelum menuntut sidang memastikan bahwa semua anggota setuju sebulat-bulatnya:

Jadi rancangan ini sudah diterima semuanya jadi saya ulangi lagi undang-undang dasar ini kita akan terima sebulat-bulatnya untuk penyelesaiannya Saya minta Dengan hormat supaya disetujui yang menerima berdiri dengan suara bulat diterima undang-undang dasar yang diterima kasih tuan-tuan.

BAB 6

AKTIVITAS DI KALANGAN PEMUDA

Pada masa pendudukan Jepang asrama merupakan konsentrasi para pemuda dan mereka memperoleh inspirasi dari tokoh-tokoh nasional dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Salah satu diantaranya asrama Angkatan baru di Menteng 31 Jakarta yang didirikan Hitoshi Shimizu dari sendennu yakni Chairul Saleh dan Sukarni, di asrama ini para pemuda mendapatkan pendidikan sebagai propagandis yang menyuarakan kepentingan perang Jepang. Di samping mendapat pendidikan semangat Nippon mereka juga mendapatkan pendidikan tentang nasionalisme dari generasi yang lebih tua seperti Soekarno, Hatta, Yamin dan Mr soenario.

Meskipun pendidikan yang diikuti oleh 50 sampai 60 orang berakhir Pada bulan April 1943 asrama ini tetap menjadi tempat pertemuan mereka untuk membahas hal-hal yang sedang berlangsung saat itu antara lain masalah politik. Bahkan tokoh-tokoh seperti Adam Malik, BM Diah, Harsono, Cokroaminoto dan Anwar Cokroaminoto aktif menghadiri pertemuan-pertemuan itu.

Konsentrasi lainnya adalah asrama perguruan tinggi kedokteran di Jalan Prapatan 10 Jakarta tempat menampung bekas mahasiswa *Geneeskundige Hoge School* (GHS) dan *Naderlands Indische*, kalangan mahasiswa ini mulai mempersiapkan kekuatan untuk mencapai Indonesia merdeka. Mereka melakukan pembangkangan terhadap peraturan buatan Jepang seperti penggundulan kepala sampai botak.

Bangsa Indonesia termasuk para mahasiswa menyadari bahwa kepala melambangkan harga diri mereka akan cepat tersinggung jika ada seseorang yang berani berbuat tidak senonoh baik dengan kata-kata maupun perbuatan terhadap kepalanya. Pembangkangan ini diikuti oleh aksi mogok kuliah pada bulan Oktober 1943, mereka pun menolak pelatihan militer di waktu hujan pada bulan Desember 1943. Pada bulan Mei 1945 mereka memberikan rapat raksasa pemuda yang diadakan oleh Jepang akibatnya beberapa mahasiswa seperti Soedjatmoko, Soedarpo, dan Soeroto Koento dilarang mengikuti kuliah.

Sementara itu hubungan baik terjalin antara pemuda Prapatan 10 yang sadar politik dengan para pemuda berseragam militer. Mereka mengikuti ceramah keagamaan yang diberikan oleh Daidancho Daidan jaga monyet Jakarta, Kasman Singodimejo. Di samping itu mereka mendapat pula pelatihan militer dari beberapa orang perwira peta antara lain Chudanchi Latief Handraningrat dan Mufraeni Mukmin.

Di asrama Indonesia merdeka Jalan Bungur Besar 56 Jakarta para pemuda di di desa mata-mata untuk memperjuangkan kemerdekaan bukan menjadi propagandis Jepang seperti di

asrama Angkatan baru. Tokoh-tokoh penceramah di asrama pimpinan Ahmad Soebardjo ini adalah Soekarno, Hatta, Syahrir, R. P. Singgih, Sanusi Pane, suwando, Ahmad Subarjo dan Muhammad Said. Pendidikan angkatan 1 yang diikuti oleh 30 orang berakhir Pada bulan April 1945 dan pendidikan angkatan 2 yang diikuti oleh 80 orang dimulai pada bulan Mei 1945 tetapi terpaksa berakhir dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu pada bulan Agustus 1945.

Para pemuda di tiga serangan tersebut berhubungan baik meskipun berbeda orientasi. Mereka bergabung dalam barisan pelopor istimewa. Anggotanya tidak lebih dari 100 orang yang dipilih sendiri oleh Insinyur Soekarno dan sebagainya di antara mereka berasal dari asrama Angkatan baru. Pada umumnya mereka telah mempunyai bekal kesadaran nasional. Di samping menerima pelatihan militer anggota barisan pelopor istimewa juga menerima kursus-kursus politik dari tokoh-tokoh pergerakan nasional.

Di Kota Surabaya seseorang kepercayaan Syahrir, Johan syahruzzah menghimpun kelompok kecil pemuda yang bekerja di perusahaan minyak maupun perusahaan yang berhubungan dengan perminyakan. Untuk menghindari kecurigaan Jepang pada akhir tahun 1943 mereka membentuk organisasi non formal. Di kota yang sama berdiri pula kelompok Pemuda lain yang dipimpin oleh Ruslan Abdul Gani. Kelompok ini tidak membentuk organisasi formal dan mempunyai ciri yang sama yakni Merasa tidak senang terhadap kekuasaan Jepang.

Di dua kota yang berdekatan yakni di Jakarta dan Bandung terbentuk angkatan muda. Semula Ruslan Abdul Gani mencurigai organisasi ini dan menolak untuk mendukungnya. Berkat kunjungan Khairul Saleh dan Sukarni ke Surabaya akhirnya Rusman berhasil diyakinkan akan tetapi ia mengadakan modifikasi. Ia memakai nama komite angkatan muda yang bergerak di kampung-kampung melakukan propaganda tentang kemerdekaan dibalik kedua organisasi resmi.

Pada Bulan yang sama yaitu Mei 1945 para pemuda pelajar mengadakan rapat di gedung Hosokyoko. Pada akhir rapat para pemuda mengeluarkan resolusi:

Pelajar-pelajar Sekolah Lanjutan Surabaya menuntut kemerdekaan Indonesia tidak Bersyarat selekas-lekasnya, mengubah semua aba-aba berbahasa Jepang dengan aba-aba Indonesia. Pada umumnya Pemuda Pelajar kemudian menjadi anggota tentara Republik Indonesia pelajar atau TRIP.

Pada bulan Mei 1945 para pelajar di Solo yang mengadakan rapat dan mereka berikrar: *Kami bersembahkan berjuang untuk kemerdekaan bangsa nusa dan tanah air Indonesia. Setiap penghalang dan penajah Tanah Air kami tentang dan kami terjang serta kami hancurkan.*

Di Semarang pada tanggal 16 Juli 1945 didirikan markas angkatan muda sebagai realisasi rapat yang diadakan di rumah sakit perusahaan. Semakin terdesaknya posisi Jepang dalam perang menyebabkan mereka terpaksa memberikan konsensi kepada pihak Indonesia dan memungkinkan para pemuda meningkatkan kegiatannya secara terbuka.

Pada tanggal 16 Mei sampai 18 Mei diadakan Kongres Pemuda seluruh Jawa di Bandung yang penyelenggaranya disponsori oleh angkatan muda Indonesia. Angkatan muda Indonesia ini dibentuk oleh inisiatif Jepang pada pertengahan 1944 tetapi kemudian berkembang menjadi suatu pergerakan pemuda yang anti Jepang.

Para pemimpin angkatan muda Indonesia di dalam Kongres yang dihadiri oleh lebih dari 100 utusan pemuda pelajar dan mahasiswa antara lain Jamal Ali, Khairul Saleh, Sukarni, Anwar Cokroaminoto, Harsono cokroaminoto, serta sejumlah mahasiswa Ika Daigaku Jakarta seperti Lus Ratu langie menganjurkan para pemuda di Jawa hendaknya bersatu dan mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan yang bukan hadiah Jepang.

Pertemuan berlangsung dalam suasana militan dan nasionalisme di mana hanya dinyanyikan lagu Indonesia Raya Tanpa Lagu kebangsaan Jepang serta hanya dikibarkan bendera merah putih tanpa didampingi bendera Jepang. Selama 3 hari lamanya kongres berjalan akhirnya diterima baik 2 resolusi sebagai berikut:

1. Semua golongan Indonesia terutama golongan Pemuda dipersatukan dan dibulatkan di dalam satu pimpinan nasional saja.
2. Dipercepatnya pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia akan tetapi sebagaimana yang diberitakan oleh pers resmi resolusi kongres pun ditambah dengan menyatakan dukungan sepenuhnya dan kerjasama erat dengan Jepang dalam usaha mencapai kemenangan akhir.

Pernyataan tersebut tidak memuaskan beberapa tokoh pemuda yang hadir seperti utusan dari Jakarta yang dipimpin oleh Soekarni, Harsono Cokroaminoto dan Chairul Saleh. Mereka bertekad untuk tidak mengambil bagian dalam gerakan angkatan muda Indonesia dan bermaksud untuk menyiapkan suatu gerakan pemuda yang lebih radikal.

Sebagai realisasi tekad itu pada tanggal 3 Juni 1945 diadakan suatu pertemuan rahasia di Jakarta yang dihadiri oleh 100 pemuda yang membentuk suatu panitia khusus yang diketuai oleh BM Diah dengan para anggotanya soekarno, Sudiro, Syarif Tjaheb, Harsono Cokroaminoto, Wikana, Khairul Saleh, P. Gultom, Supeno dan dan asmara Hadi.

Pertemuan rahasia diadakan lagi pada tanggal 15 Juni 1945 yang menghasilkan pembentukan gerakan anggota baru Indonesia yang kegiatannya sebagian besar digerakkan oleh para pemuda dari Menteng 31.

Tujuan gerakan tersebut tercantum di dalam surat kabar Asia Raja pertengahan bulan Juni 1945 yang menunjukkan sifat yang lebih radikal sebagai berikut:

1. Mencapai persatuan kompak diantara seluruh golongan masyarakat Indonesia
2. Menanamkan semangat revolusioner masa atas dasar kesadaran mereka sebagai rakyat yang berdaulat
3. Membentuk negara kesatuan Republik Indonesia
4. Mempersatukan Indonesia bahwa membahu dengan Jepang tetapi jika perlu gerakan itu bermaksud untuk mencapai kemerdekaan dengan kekuatannya sendiri.

Tokoh-tokoh Pemuda radikal seperti Khairul Saleh, Sukarni, BM Diah, Asmara Hadi, Harsono Cokroaminoto, Wikana, Sudiro, Supeno, Adam Malik, Trimurti, Sutomo, dan Pandu A Kartawiguna telah diikutsertakan di dalam suatu gerakan yang disebut gerakan rakyat baru. Gerakan tersebut diperkenankan pembantunya oleh Saiko Shikikan yang baru, Letnan Jenderal Y Nagano di dalam suatu pertemuan pada tanggal 2 Juli 1945.

Gerakan rakyat baru disusun berdasarkan hasil sidang ke-8 Chuo Sangi In yang mengusulkan didirikannya suatu gerakan untuk mengorbankan semangat cinta kepada tanah air dan semangat perang. Susunan pengurus pusat gerakan terdiri dari 80 orang. Di samping anggotanya terdiri atas penduduk asli Indonesia dan bangsa Jepang juga terdapat golongan Cina, golongan Arab dan golongan peranakan Eropa.

Adapun pengangkatan wakil-wakil golongan pemuda di dalamnya dimaksudkan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi kegiatan-kegiatan mereka. Somubuco Mayor Jenderal Nishimura menegaskan bahwa setiap pemuda yang tergabung dalamnya harus tunduk sepenuhnya kepada pemerintah militer Jepang dan mereka pun harus pula bekerja di bawah pengawasan pejabat-pejabat pemerintah.

Dengan demikian, berarti kebebasan bergerak para pemuda dibatasi sehingga timbulnya rasa tidak puas dan terjadi curang yang lebar antara pemikiran golongan muda dan pemikiran golongan tua. Kekecewaan pun timbul ketika panitia bersidang untuk membicarakan anggaran dasar gerakan rakyat baru.

Para pemuda menuntut dicantumkannya kata-kata Republik Indonesia dalam anggaran dasar tersebut. Tuntutan mereka menemui jalan buntu setelah terjadi perdebatan dengan pimpinan yang lebih tua yang yakin bahwa Jepang tidak akan mengabulkan tuntutan mereka. Oleh karena itu tatkala gerakan rakyat baru diresmikan pada tanggal 28 Juli 1945 di

mana Dua organisasi besar yaitu Jawa Hokokai dan Masyumi digabungkan menjadi satu di dalamnya tidak seorang tokoh golongan Pemuda radikal yang bersedia menduduki kursi yang telah disediakan untuk mereka. Perselisihan paham terjadi antara golongan tua dan golongan muda tentang cara melaksanakan pembentukan negara Indonesia merdeka.

BAB 7

PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN

INDONESIA (PPKI) DAN GOLONGAN PEMUDA

Memancarnya perjuangan menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tampaknya disebabkan oleh golongan muda. Golongan muda maupun golongan tua sama-sama berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus di segera diproklamasikan, hanya mengenai cara melaksanakan proklamasi itu terdapat beda pendapat. Golongan tua sesuai dengan perhitungan politik yang berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah hanya jika tetap bekerja sama dengan Jepang.

Mereka menggantungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Peresmian pembentukan badan itu dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1945 sesuai dengan keputusan Jenderal besar Terauchi, panglima tentara umum Selatan yang membawahi semua tentara Jepang di Asia Tenggara.

Para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu diizinkan melakukan kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri tetapi mereka diwajibkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan ialah menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena itu bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya.
2. Negara Indonesia merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya maka cita-cita bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang yang bersemangat Hallo Ichiu.

Dengan diumumkannya pembentukan PPKI tanggal 7 Agustus 1945 pada saat yang sama BPUPKI dianggap bubar. Kepada para anggota PPKI Mayor Jenderal Yamamoto mengucapkan terima kasihnya dan menegaskan bahwa para anggota yang duduk dalam PPKI itu tidak dipilih oleh pejabat di lingkungan tentara ke-16 saja tetapi oleh Jenderal besar Terauchi sendiri menjadi penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara.

Untuk pengangkatan itu Jenderal besar tersebut memanggil tiga tokoh pergerakan nasional yang terdiri dari Soekarno Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat. Pada tanggal 9 Agustus 1945 mereka berangkat menuju markas besar Mayor tersebut di Dalat atau Vietnam Selatan. Dalam pertemuan di darat itu pada tanggal 21 Agustus 1945 Jenderal besar Terauchi menyampaikan kepada ketiga pemimpin tersebut bahwa pemerintah kemaharajaan telah

memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk melaksanakannya telah dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah persiapannya selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Mungkin pelaksanaannya tidak dapat sekaligus untuk seluruh Indonesia tetapi bagian demi bagian sesuai dengan kondisi setempat.

21 anggota telah dipilih tidak hanya terbatas pada wakil-wakil dari Jawa yang ada di bawah pemerintahan tentara keenam tetapi juga dari berbagai Pulau sebagai berikut:

1. 12 wakil dari Jawa
2. Tiga wakil dari Sumatera
3. Dua dari Sulawesi
4. Seorang dari Kalimantan
5. Satu orang dari Sunda Kecil atau Nusa Tenggara
6. Seorang dari Maluku dan seorang dari golongan penduduk Cina.

Yang diangkat sebagai ketua dalam PPKI adalah Insinyur Soekarno sedangkan Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakil ketua. Sedangkan yang ditunjuk sebagai penasehat adalah Ahmad Soebardjo, kemudian oleh orang Indonesia sendiri PPKI ditambah dengan 6 orang lagi tanpa seizin pihak Jepang. Anggota-anggota itu adalah Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr Kasman singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo.

Pada saat ketiga tokoh PPKI yakni Insinyur Soekarno dokter Muhammad Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat berangkat Kembali menuju Jakarta dari Vietnam pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang mengalami pengeboman oleh sekutu atas Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom, sedangkan Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang Seraya melakukan penyerbuan ke Mancuria.

Dengan demikian dapat diduga bahwa kekalahan Jepang akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat sehingga Proklamasi Kemerdekaan harus segera dilaksanakan. Dalam hal ini Muhammad Hatta berpendapat bahwa soal kemerdekaan Indonesia datangnya dari pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak akan menjadi soal karena Jepang sudah kalah.

Kini kita menghadapi sekutu yang berusaha akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Oleh karena itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi. Soekarno dan Hatta ingin memperbincangkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia sehingga dengan demikian tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang yang menetapkan

waktu berkumpulnya para anggota atau PPKI yang pertama pada keesokan harinya dihitung dari saat pembentukannya.

Sikap inilah yang tidak disetujui oleh Golongan muda yang menganggap PPKI adalah badan bikinan Jepang yang tunduk pada kemauan Jepang. Mereka juga tidak menyetujui dilaksanakannya proklamasi kemerdekaannya secara digariskan oleh Jenderal besar Terauchi dalam pertemuan di Dalat sebelumnya mereka menghendaki terlaksananya Proklamasi Kemerdekaan dengan kekuatan sendiri lepas sama sekali dari Jepang.

Sutan Syahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tanpa menunggu janji Jepang yang dikatakannya sebagai tipu Mas lihat belaka. Karena mendengarkan radio yang tidak disegel pemerintah Jepang ia mengetahui bahwa Jepang sudah memutuskan untuk menyerah. Desakan tersebut dilaksanakannya pada tanggal 15 Agustus 1945 dalam suatu pertemuan dengan Muhammad Hatta begitu Hatta kembali dari Dalat. Akan tetapi, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta masih ingin mengecek kebenaran membicarakan pelaksanaan proklamasi pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia.

Langkah berikut yang diambil oleh golongan pemuda adalah terlebih dahulu mengadakan rapat di salah satu ruangan lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur Jakarta atau sekarang fakultas kesehatan masyarakat Universitas Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.30 waktu Jawa zaman Jepang pukul 19.00 WIB.

Di antara hadirin tampak Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono di samping Wikana dan Armansyah. Keputusan rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh menunjukkan tuntutan radikal golongan pemuda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan seorang rakyat Indonesia sendiri tidak dapat digantungkan pada orang lain dan kerajaan lain

Keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana dan Darwis pada pukul 22.30 waktu Jawa zaman Jepang pukul 21.50 WIB di rumah kediaman Insinyur Soekarno Pegangsaan Timur atau sekarang Jalan Proklamasi 56 Jakarta. Tuntutan Wikana agar proklamasi dinyatakan oleh Insinyur Soekarno pada keesokan harinya telah menegangkan suasana karena ia juga menyatakan bahwa akan terjadi pertumbuhan darah jika Keinginan mereka tidak dilaksanakan.

Mendengar ancaman itu Insinyur Soekarno menjadi marah dan melontarkan kata-kata yang bunyinya lebih kurang sebagai berikut:

Ini leherku saudara Boleh saya sekarang juga saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI karena itu saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok.

Ketegangan itu disaksikan oleh tokoh-tokoh nasionalis angkatan tua lainnya seperti Muhammad Hatta, dokter buntaran, dokter Samsi, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri. Dampak perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda memunculkan empat Pemuda telah mendesak agar keesokan harinya tanggal 16 Agustus 1945 itu juga proklamasi dilaksanakan sedangkan pimpinan golongan tua masih menekankan perlunya diadakan rapat PPKI terlebih dahulu.

BAB 8

PERISTIWA RENGASDENGKLOK

Adanya perbedaan paham itu telah mendorong golongan pemuda untuk membawa Soekarno dan Hatta ke luar kota. Tindakan itu berdasarkan keputusan rapat terakhir yang diadakan oleh para pemuda pada pukul 00.30 waktu Jawa zaman Jepang pukul 23.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di asrama baperpi, Cikini 71 Jakarta. Selain dihadiri oleh pemuda-pemuda yang sebelumnya merapat di ruangan lembaga bakteriologi Pegangsaan Timur Apa itu juga dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto dan Muwardi dari barisan pelopor serta Shodanco Singgih dari Dandan Peta Jakarta Syu.

Bersama Chairul Saleh mereka telah bertahan untuk melaksanakan keputusan rapat pada waktu itu yaitu antara lain menyingkirkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke luar kota dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Guna menghindari kecurigaan dan tindakan Jepang, Shudancho Singgih mendapat kepercayaan untuk melaksanakan rencana tersebut.

Rencana berjalan lancar karena diperoleh dukungan berupa perlengkapan tentara PETA dari Chudancho Lately Hendraningrat yang pada saat itu sudah mengantikan Dai Dancow Kasman singodimedjo yang bertugas ke Bandung. Demikianlah pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 waktu Jawa zaman Jepang pukul 03.00 WIB Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh sekelompok Pemuda dibawa ke luar kota menuju ke Rengasdengklok sebuah kota kewedanan di Kabupaten Karawang.

Rengasdengklok dipilih untuk mengamankan Soekarno Hatta berdasarkan perhitungan militer. Antara peta daiden Purwakarta dan Medan Jakarta Terdapat hubungan erat sejak mereka mengadakan pelatihan bersama-sama. Di samping itu Rengasdengklok letaknya terpencil yakni 15 km dari kedunggede, Kerawang pada Jalan Raya Jakarta Cirebon. Dengan demikian, deteksi dapat dengan mudah dilaksanakan terhadap setiap gerakan tentara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok baik dari arah Jakarta maupun dari arah Bandung atau Jawa Tengah. Di mana mereka harus melalui kedunggede di mana pasukan peta telah bersiap-siap untuk menahannya.

Sehari penuh Soekarno Hatta berada di Rengasdengklok. Maksud para pemuda untuk menekan mereka berdua supaya segera melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan terlepas dari setiap kaitan dengan Jepang rupa-rupanya tidak terlaksana. Agaknya kedua pemimpin senior itu mempunyai bahwa yang cukup besar sehingga para pemuda yang membawanya ke Rengasdengklok Sekjen untuk melakukan penekanan.

Namun dalam suatu pembicaraan berdua dengan Soekarno, Shudancho Singgih menganggap Soekarno menyatakan kesediaannya untuk mengadakan proklamasi itu segera sesudah kembali ke Jakarta. Berdasarkan anggapan itu tinggi pada tengah hari kembali ke Jakarta untuk menyampaikan rencana proklamasi itu kepada kawan-kawannya pemimpin Pemuda.

Sementara itu di Jakarta antara Ahmad Subarjo dari golongan tua dan wikana dari golongan muda mencapai kata sepakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta. Didapat pula penegasan bahwa laksamana Tadashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu Yusuf Kunto dari pihak Pemuda pada hari itu juga mengantarkan Ahmad Soebardjo bersama sekretaris pribadinya atau Sudiro ke Rengasdengklok untuk menjawab Soekarno dan Hatta.

Rombongan itu tiba pada pukul 18.00 waktu Jawa zaman Jepang pukul 16.30 WIB di Rengasdengklok oleh Ahmad Subarjo diberi jaminan dengan taruhan nyawa bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 keesokan harinya selamat lamanya pukul 12.00 dengan jaminan tersebut komandan Kompi peta setempat Chudancho Subeno bersedia melepaskan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta.

BAB 9

PERUMUSAN TEKS PROKLAMASI

Sesampainya di Jakarta pada pukul 23.30 waktu zaman Jepang pukul 22.00 WIB rombongan menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 sekarang perumusan naskah Proklamasi atau Depdikbud. Setelah Soekarno dan Hatta singgah di rumah masing-masing terlebih dahulu. Di rumah itulah naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disusun.

Sebelumnya Soekarno dan Hatta telah menemui Somubuco, sebagai penerjemah. Pada pertemuan tersebut tidak dicapai kata sepakat antara Soekarno Hatta di satu pihak dan nishimura di lain pihak. Di satu pihak Soekarno Hatta bertekad untuk melangsungkan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945 itu tidak jadi diadakan karena mereka dibawa oleh para pemuda ke Rengasdengklok.

Mereka menekankan kepada Nishimura bahwa Jenderal besar Terauchi telah menyerahkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada PPKI. Di lain pihak nishimura menegaskan garis kebijakan panglima tentara ke-16 di Jawa yakni dengan menyerahkannya Jepang kepada sekutu berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo. Sejak tengah hari sebelumnya tentara Jepang semata-mata sudah merupakan alat sekutu dan harus tunduk kepada perintah sekutu.

Berdasarkan garis kebijakan itu Nishimura melarang Soekarno Hatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Akhirnya sampailah Soekarno Hatta pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Hanya mereka mengharapkan dari pihak Jepang supaya tidak menghalangi-halangi pelaksanaan proklamasi oleh rakyat Indonesia sendiri.

Setelah hampir 2 jam lamanya mereka mengadakan pertemuan dengan Nishimura tanpa dicapai kesepakatan pendapat di antara mereka Soekarno dan Hatta dengan didampingi Miyoshi kembali ke rumah Maeda. Di rumah Maeda kedua pimpinan itu bertemu dengan Subarjo. Demikian pula Meida yang pulang ke rumahnya lebih dahulu secara zam-zam dari rumah nishimura.

Rumah Laksamana Jepang itu dianggap tempat yang aman dari tindakan pemerintah militer Angkatan Darat. Kedudukan Maeda sebagai kepala kantor penghubung angkatan laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat memungkinkan berhubungannya dengan Mr Ahmad Soebardjo dan sejumlah pemuda Indonesia yang bekerja pada kantornya. Berdasarkan

hubungan baik itu rumah Maeda dijadikan tempat pertemuan antara berbagai golongan pergerakan nasional b golongan tua maupun golongan Pemuda.

Di ruangan makan rumah itu dirumuskan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri dari Kamar tidurnya di lantai kedua tatkala peristiwa bersejarah itu berlangsung. Mosis sebagai orang kepercayaan nishimura bersama tiga tokoh pemuda yaitu Sukarni, mbah diri, dan B. M. Diah menyaksikan Insinyur Soekarno Muhammad Hatta dan Ahmad Soebardjo membahas perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh lainnya baik dari golongan tua maupun muda menunggu di serambi Muka.

Perumusan berlangsung dengan lancar dan diantara rumusan proklamasi dapat di kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yaitu BAB pembukaan undang-undang Dasar 1945 yang disusun oleh panitia yang diketuai oleh Soekarno.

Pada saat itu Soekarno memegang perdana dan menulis teks proklamasi yang kalimat ini terdiri dari dua ayat ayat pertama yang ditulis:

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia adalah Kalimat yang diingat oleh Mr Ahmad Subarjo dari Piagam Jakarta yang antara lain berbunyi atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian Hatta menyempurnakan teks proklamasi dengan ayat kedua hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Soekarno lahir menuliskan konsep teks proklamasi pada searah kertas sedangkan Muhammad Hatta dan Soebardjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Sebagai hasil pembicaraan mereka diperoleh rumusan yang ditulis oleh Insinyur Soekarno sebagai berikut.

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta 17 Agustus 1945 wakil wakil bangsa Indonesia.

Kalimat pertama merupakan saran Mister Ahmad Soebardjo yang diambil dari rumusan dalam sidang BPUPKI sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan pikiran Muhammad Hatta boleh menganggap Kalimat pertama hanyalah pernyataan dari kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri menurut pendapatnya perlu ditambahkan pernyataan mengenai

pengalihan kekuasaan maka dihasilkan rumusan kalimat terakhir dari naskah Proklamasi tersebut.

Setelah Soekarno Hatta dan Ahmad Soebardjo selesai merumuskan naskah Proklamasi kemudian mereka menuju Serambi Mekah untuk menemui hadirin yang telah berkumpul waktu pada saat itu menunjukkan pukul 04.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 03.00. Insinyur Soekarno membuka pertemuan dengan membacakan rumusan Naskah Proklamasi yang masih merupakan konsep.

Kepada mereka yang hadir Insinyur Soekarno menyarankan agar bersama-sama menandatangani naskah Proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Saran tersebut diperlukan oleh Muhammad Hatta dengan mengambil contoh kepada naskah Amerika Serikat namun saran ini ditentang oleh pihak Pemuda.

Mereka tidak setuju kalau tokoh-tokoh golongan tua yang disebut sebagai budak-budak Jepang turut menandatangani naskah Proklamasi maka tokoh-tokoh golongan tua yang bukan orang pergerakan nasional mereka anggap sebagai opportunitis yang memperoleh kedudukan menjadi pejabat kepala pemerintahan militer Jepang, akan tetapi kepada salah seorang tokoh pemuda yaitu Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani naskah Proklamasi cukup dua orang saja yaitu Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Bukankah mereka berdua yang pada masa itu di mana-mana dikenal sebagai pimpinan utama bangsa Indonesia dengan disetujui usul Soekarno itu oleh usaha hadirin Insinyur Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik bersin naskah itu berdasarkan naskah tulisan tangan Soekarno disertai dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui.

Sayuti Melik mengetik naskah bersih rumusan proklamasi ada tiga perubahan yang terdapat pada naskah di situ yakni kata-kata tempo diganti menjadi tempo sedangkan wakil-wakil bangsa Indonesia pada bagian akhir diganti dengan atas nama bangsa Indonesia demikian pula perubahan terjadi pada cara menulis tanggal yaitu Jakarta 17 805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05 dengan perubahan tersebut naskah yang sudah diketik kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta.

Demikianlah proses dan peristiwa yang menghasilkan naskah Proklamasi kemerdekaan itu telah berlangsung pada dini hari 17 Agustus 1945.

BAB 10

PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Pada pukul 05.00 waktu Jawa pada zaman Jepang tanggal 17 Agustus 1945, anggota PPKI dan tokoh-tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda pulang ke rumah masing-masing setelah berhasil merumuskan teks proklamasi. Mereka sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 atau sekarang Jalan Proklamasi gedung Perintis Kemerdekaan pada pukul 11.30 waktu Jawa pada zaman Jepang atau pukul 10.00 WIB sekarang. Sebelum pulang Bung Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di lembaga pers dan kantor berita terutama BM dia untuk memperbanyak teks Proklamasi dan menyirkannya ke seluruh dunia.

Para pemuda langsung melakukan kegiatan-kegiatan membagi pekerjaan dalam kelompok-kelompok tiap-tiap kelompok mengirimkan kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat proklamasi telah tiba. Kelompok Sukarni misalnya yang bermarkas di Jalan Bogor lama atau sekarang Jalan Dokter Suharjo SH melakukan rapat di Kepu atau Kemayoran kemudian pindah ke definisi religin Van De Bosch sekarang Jalan Bungur Besar untuk mengatur penyiaran berita proklamasi. Semua alat komunikasi yang ada akan dipergunakan untuk maksud itu seperti pamflet pengeras suara dan mobil-mobil akan dikarenakan ke segenap seluruh penjuru kota diusahakan juga pengarahan massa untuk mendengarkan pembacaan proklamasi di Pegangsaan Timur 56.

Ribuan teks proklamasi berhasil dicetak dengan Romeo dan segera disebarluaskan ke berbagai penjuru kota ditempelkan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh pabrik juga secara berhenti berita ini disampaikan ke luar kota Jakarta.

Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 barisan Pemuda datang berbondong-bondong menuju lapangan Ikada di sudut Tenggara lapangan monumen nasional atau Monas yang sekarang. Ternyata lapangan Ikada sudah dijaga oleh pasukan Jepang yang bersenjata lengkap rupanya Jepang sudah mengetahui kegiatan para pemuda dan karena itu mereka berusaha menghalanginya.

Para pemuda datang ke lapangan Ikada Berdasarkan informasi dari ke mulut bahwa proklamasi Akan diucapkan ke tempat tersebut. Mereka tidak mengetahui keputusan terakhir yang diambil oleh PPKI bahwa proklamasi Akan diucapkan di Pegangsaan Timur 56. Bahkan Sudiro pemimpin barisan pelopor pun tidak mengetahuinya. Pagi itu ia Berangkat ke lapangan Ikada. Setelah melihat lapangan itu dijaga oleh pasukan Jepang ia menemui Dokter Muwardi kepala keamanan Insinyur Soekarno. Dari Dokter Muwardi Ia mendapat Penjelasan bahwa

proklamasi Akan diucapkan di Pegangsaan Timur 56. Sudiro kembali ke Ikada untuk memberitahukan hal itu kepada anak buahnya.

Pada pagi itu pekarangan rumah Insinyur Soekarno sudah dipadati oleh sejumlah masa Pemuda. Untuk menjaga keamanan Dokter Muwardi meminta kepada Cu Danco Latief hendraningrat untuk menugasi beberapa orang anak buahnya berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Sesuai dengan permintaan itu Latif menempatkan beberapa orang prajurit Peta berjaga-jaga di sekitar jalan kereta api yang membujur di belakang rumah itu. Di samping itu di kesatriaan mereka dijaga monyet disiagakan pula Pasukan yang dipimpin oleh sudanco Arifin Abdurrahman.

Sementara itu wakil walikota soewirjo memerintahkan Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan yaitu mikrofon dan beberapa pengeras suara. Wilopo dan Yono Prawoto berhasil meminjam peralatan tersebut dari Gunawan pemilik toko radio Satria di Salemba Tengah 24. Gunawan yang mengirimkan seorang pemuda kepercayaannya untuk melayani penggunaannya.

Sudiro yang merangkap sebagai sekretaris Insinyur Soekarno memerintahkan S Suhud komandan pengawal rumah Insinyur Soekarno untuk menyiapkan satu tiang untuk mengerek bendera. Karena situasi tegang suhu tidak ingat bahwa di depan rumah masih ada dua Tiang Bendera dari besi yang tidak digunakan dan salah satu diantaranya dapat dipindahkan. Malahan ia mencari sebatang bambu yang berada di belakang rumah kemudian dibersihkan dan diberi tali lalu ditanam beberapa langkah dari teras. Bendera yang akan dikibarkan ialah bendera yang dijahit oleh tangan Nyonya Fatmawati Soekarno bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar karena kainnya berukuran tidak sempurna.

Sebagaimana yang telah disepakati semula para anggota PPKI menjelang pukul 10.30 telah berdatangan di Pegangsaan Timur di antara mereka adalah dokter boentaran martoatmodjo, Mr AA Maramis, Mr Latuharhary, abikusno tjokrosujoso, Anwar Cokroaminoto, Harsono Cokroaminoto, Otto Iskandardinata, Ki Hajar Dewantara, Sam Ratulangi, Ki Haji Mas Mansyur, Mr Sartono, **Sayuti Melik**, Pandu kartawiguna, m Tabrani, dokter Moewardi dan AG pringgodigdo.

Rangkaian acara yang akan dilaksanakan dalam upacara itu adalah pembacaan proklamasi pengibaran bendera merah putih dan sambutan walikota soewirjo dan Dokter Muwardi. Ketika waktu mendekati pukul 10.00 sedangkan acara belum juga dimulai para pemuda yang berdiri menunggu Sejak pagi mulai tidak sabar mereka yang diliputi suasana tegang dan diiringin keinginan keras agar pembacaan proklamasi segera dilakukan.

Mereka mendesak Dokter Muwardi agar segera mengingatkan Bung Karno bahwa hari telah siang karena disahkan itu Dokter Muwardi memberanikan diri menemui Bung Karno yang masih berada di kamar dan menyampaikan keinginan para pemuda. Bung Karno menolak membacakan proklamasi sendiri tanpa hadirnya Hatta Mawarni terus mendesak ia menyatakan bahwa hal itu lebih baik dikerjakan oleh Bung Karno sendiri saja tanpa kehadiran Bung Hatta sebab naskah Proklamasi sudah ditandatangani berdua Bung Karno menjawab dengan nada marah Saya tidak akan membacakan proklamasi Kalau harta tidak ada kalau Mas Muwardi tidak mau menunggu Silakan baca proklamasi sendiri.

5 menit sebelum acara dimulai harta datang ia langsung menuju ke kamar Soekarno beberapa menit sebelum pukul 10.00 kedua pimpinan itu keluar bersama-sama menuju tempat upacara diiringi oleh Nyonya Fatmawati Soekarno. Upacara berlangsung tanpa protokol segera latih memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu Sejak pagi semua berdiri tegak dengan sikap sempurna Latif mempersilahkan Bung Karno dan Bung Hatta maju beberapa langkah dari tempatnya semula Soekarno mendekati mikrofon sebelum membacakan teks proklamasi Bung Karno menyampaikan pidato singkat atau dikatakannya:

bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan sudah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun dan mengalami gelombang naik turun, mengenai perjuangan dalam zaman Jepang dikatakannya tampaknya saja kita yang menyadarkan diri kepada mereka tetapi pada hakekatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri pada bagian terakhir pidato singkat itu, Bung Karno mengatakan hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya sesudah menyampaikan pidato singkat itu Bung Karno dengan didampingi Hatta membacakan teks proklamasi tersebut.

Pembacaan proklamasi diakhiri Bung Karno dengan penegasan:

Kita sekarang telah merdeka tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita mulai saat ini kita menyusun negara kita negara merdeka negara Republik Indonesia merdeka kekal dan abadi Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.

Tepat pada saat pengucapan proklamasi itu pengeras suara yang dipakai rusak padahal sebelum dipergunakan telah dicoba beberapa kali dan berjalan dengan baik hal ini mungkin disebabkan kabel-kabelnya rusak terija-injak oleh massa.

Acara selanjutnya ialah pengibaran bendera merah putih S Suhud mengambil bendera dari atas Baki yang telah disediakan dan mengikatkannya pada tali dengan bantuan Cudanculatif bendera dinaikkan perlahan-lahan tanpa ada yang memimpin hadirat spontan

menyanyikan lagu Indonesia Raya bendera dikeret dengan lambat sekali untuk menyelesaikan Irama dengan lagu Indonesia Raya yang cukup panjang sesuai pergerakan bendera walikota soewirjo dan Dokter Muwardi menyampaikan sambutan masing-masing.

Peristiwa besar itu berlangsung hanya selama lebih kurang satu jam dengan penuh kenikmatan sekalipun sangat sederhana ia membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Berita proklamasi yang telah lulus di seluruh Jakarta segera disebarluaskan ke seluruh Indonesia pada Pagi tanggal 17 Agustus itu juga teks proklamasi telah sampai di tangan kepala bagian radio kantor berita domei dan venelewan ia menerima teks itu dari syahruddin seorang wartawan domei.

Segara ia memerintahkan F. Wuz seorang markonis supaya berita itu disiarkan tiga kali berturut-turut. Baru dua kali menyiarkan masuklah orang Jepang ke ruangan radio dengan marah Orang Jepang itu memerintahkan agar penyiaran berita itu dihentikan akan tetapi Weiden Panelewen memerintahkan F. Wuz untuk terus menyiarkan berita itu tanpa dihentikan kemudian Diulangi setiap setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti. Akibat dari penyiaran itu pucuk pimpinan tentara Jepang di jawa memerintahkan untuk merawat berita tersebut dan menyatakan bahwa sebagai Kelurahan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 1945 pemancar itu disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk.

Sekalipun pemancar pada kantor berita Domei di segel para pemuda tidak hilang akal mereka membuat pemancar baru dengan bantuan beberapa orang teknisi radio Sukarmen, Sutanto, Susiloharjo dan Suhandar pemancar yang diambil dari kantor berita Domei bagian demi bagian di bawah ke rumah waidan B panel dan sebagian keminting 31 akhirnya terciptalah pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DKI 1.

Dari sinilah seterusnya berita proklamasi disiarkan usaha para pemuda dalam penyiaran berita ini tidak terbatas radio tetapi juga lewat pers dan surat selebaran akhirnya seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus memuat berita proklamasi dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia.

BAB 11

SIDANG-SIDANG PPPI

Kesibukan para pemimpin sesudah proklamasi adalah menyusun tatanan kehidupan kenegaraan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan rapat pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu rapat yang pertama sesudah proklamasi. Pada waktu itu Soekarno Hatta merencanakan untuk menambah 9 orang anggota baru termasuk dari golongan Pemuda antara lain Soekarno Chairul saleh dan Wikana akan tetapi setelah berlangsung pembicaranya tidak memuaskan antara Hatta dan Khairul para pemuda meninggalkan tempat mereka masih menganggap bahwa PPKI adalah aparat Jepang.

Rapat diadakan di Pejambon di gedung Departemen Luar Negeri sekarang Sebelum rapat dimulai Soekarno Hatta meminta bagus Hadikusumo, Kyai Haji Wahid Hasan, Mr Kasman Singodimedjo, dan Mr Tengku Muhammad Hasan untuk membahas rancangan pembukaan undang-undang dasar yang dibuat pada 22 Juni 1945 khususnya mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya karena pemeluk agama lain merasa keberatan terhadap kalimat tersebut.

Adanya keberatan ini di kesehatan sore tanggal 17 Agustus dari seorang Perwira kaigun atau angkatan laut Jepang. Perwira ini mengatakan bahwa dicantumkannya kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya akan menyebabkan penganut agama lain di daerah Indonesia Timur merasa didiskriminasikan dan karena itu mereka lebih suka berdiri di luar RI.

Dengan dipimpin oleh Hatta tokoh-tokoh Islam tersebut membahas masalah yang cukup sensitif di antara tokoh-tokoh ini adalah Ki bagus Hadikusumo merupakan tokoh berpaham keras artinya ingin tetap mempertahankan 7 kata tersebut sikap keras Hadikusumo dapat digunakan oleh tema Hasan dengan mengemukakan argumentasi bahwa persatuan bangsa lebih penting daripada kepentingan golongan akhirnya dalam waktu 15 menit dicapai kata sepakat untuk mengganti 7 kata tersebut dengan yang maha esa sehingga lengkapnya berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kesepakatan yang dicapai oleh tokoh-tokoh Islam itu memperlancar pembicaraan dalam rapat pleno PPKI sebab bila dibicarakan dalam rapat pleno rapat akan memakan waktu yang lama dan berlarut-larut. Setelah bertukar pikiran itu rapat pleno PPKI dibuka pada pukul 11.30 di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta. Rapat dihadiri oleh 27 orang anggota Soekarno membuka rapat dengan pidato singkat ia mengingatkan anggota PPKI bahwa mereka berada dalam zaman yang beralih secepat kilat dan karena itu harus bertindak kilat pula pada akhir

pidato itu dikatakannya janganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak Yang kecil-kecil tetapi marilah kita menurut garis besar saja yang mengandung sejarah.

Rapat pertama ini berlangsung dengan lancar pembahasan masalah rancangan pembukaan undang-undang dasar yang telah disiapkan oleh badan penyelidik usaha Persiapan Kemerdekaan berhasil dibahas dalam tempo kurang dari 2 jam disepakati bersama rancangan pembukaan dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia sedangkan diskors pada pukul 12.50 dan akan dimulai lagi pukul 13.15 pada awal pembukaan sidang kedua ini Soekarno mengumumkan 6 orang anggota baru PPKI yaitu Wiranata Kusuma Ki Hajar Dewantara Mr Kasman Sayuti Melik Mr Iwa Kusuma Sumantri dan Mr Soebardjo.

Sebelum meningkatkan acara baru yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden Soekarno meminta agar disahkan pasal 13 aturan peralihan kemudian Otto Iskandardinata mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan aklamasi yang mengajukan calon Bung Karno sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden semua hadirin menerima dengan aklamasi sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Setelah acara pemilihan presiden dan wakil presiden sidang meneruskan acara membahas pasal-pasal rancangan aturan peralihan dan aturan tambahan dengan perubahan-perubahan kecil seluruh rancangan tersebut disepakati oleh sidang.

Presiden Soekarno menutup acara pembahasan itu dengan menyatakan bahwa undang-undang dasar negara Republik Indonesia serta peraturan peralihan telah sah ditetapkan. Dengan demikian pada tanggal 18 Agustus 1945 bangsa Indonesia memperoleh landasan kehidupan bernegara yang meliputi dasar negara yakni sebuah undang-undang dasar yang kini dikenal sebagai undang-undang Dasar 45 pembukaan undang-undang Dasar 45 itu mengandung dasar negara yang kita kenal dengan Pancasila.

Sila-sila itu adalah ketuhanan yang maha esa kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan pancasila ini dari rumusan yang terdapat dalam Pembukaan undang-undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang merupakan sintesis dari rumusan yang diajukan oleh Insinyur Soekarno Mr Muhammad Yamin dan Profesor Soepomo pada sidang pertama BPUPKI serta oleh panitia sembilan tanggal 22 Juni 1945.

Sebelum rapat PPKI pertama ini ditutup Presiden Soekarno menunjuk 9 orang sebagai anggota panitia kecil yang ditugasi menyusun rancangan yang berisi hal-hal yang meminta perhatian mendesak yakni pembagian wilayah negara kepolisian tentara kebangsaan dan

perekonomian mereka adalah Otto Iskandardinata, Subarjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma, Soemantri, Wiranata Kusuma, dokter Amir hamidan, dokter Ratulangi dan Ketut puja.

Rapat dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi acara pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata sebelum acara dimulai Presiden Soekarno menunjuk Mr Ahmad Subarjo, Sutarjo kartohadikusumo dan Mr Kasman untuk membentuk panitia kecil yang merencanakan bentuk Departemen tetapi bukan personalianya.

Hasil panitia kecil ot Iskandardinata kemudian dibahas dan menghasilkan keputusan:

1. Pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi beserta para calon gubernurnya yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan calon Insinyur Muhammad Nur, Sulawesi calon Dr Ratulangi, Maluku calon Mister latuhar Hari, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara calon Mister Puja, Sumatera calon Mister T Muhammad Hasan, dan 2 Daerah Istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta.
2. Adanya komite nasional atau daerah

Kemudian panitia kecil yang dipimpin oleh Mr Ahmad Soebardjo menyampaikan laporannya diusulkan oleh panitia itu adanya 13 Kementerian setelah dibahas sidang memutuskan adanya:

- a. Departemen dalam negeri
- b. Departemen Luar Negeri
- c. Departemen kehakiman
- d. Departemen Keuangan
- e. Departemen kemakmuran
- f. Departemen Kesehatan
- g. Departemen pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan
- h. Departemen sosial
- i. Departemen Pertahanan
- j. Departemen penerangan
- k. Departemen Perhubungan
- l. Departemen pekerjaan umum

Departemen Urusan Agama yang diusulkan oleh panitia Soebardjo ditolak oleh sidang, sedangkan Departemen kesejahteraan diganti namanya menjadi Departemen Sosial 1, departemen yang tidak terdapat dalam usul panitia Soebardjo ialah Departemen penerangan dalam kabinet yang dibentuk tanggal 4 September 1945 atau menteri negara hanya satu tetapi lima orang.

Pembahasan mengenai masalah Departemen ditunda kemudian presiden kembali membahas masalah tentara kebangsaan. Panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata mengajukan dua usul pertama menolak rencana pembelaan negara yang disusun oleh BPUPKI sebab rencana itu mengandung politik perang. Dalam rencana itu antara lain disebutkan bahwa tentara Indonesia akan dibentuk bekerja sama dengan Jepang dan dikukuhkan dalam perjanjian, dalam bagian lain disebutkan perlunya mengumumkan perang terhadap Amerika Inggris serta Belanda dan sekutunya.

Rencana ini disetujui oleh BPUPKI tanggal 16 Juli 1945 kedua membubarkan tentara PETA di Jawa dan Bali serta Laskar rakyat di Sumatera dengan alasan kesatuan militer ini merupakan buatan Jepang dan kedudukannya di dunia internasional tidak berketentuan sebagai gantinya diusulkan oleh Presiden memanggil tokoh-tokoh yang mempunyai kemampuan militer untuk membentuk tentara kebangsaan.

Usul tersebut diterima secara aklamasi oleh sidang urusan kepolisian oleh panitia kecil dimasukkan ke dalam Departemen dalam negeri sesuai dengan usul sidang Presiden Soekarno menunjuk Abdul Kadir Kasman singodimedjo dan Otto Iskandardinata untuk mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan Abdul Kadir ditunjuk sebagai ketuanya.

Pembicaraan lainnya ialah mengenai perlunya ketentraman dan segera dimulainya perjuangan rapat pada siang hari tanggal 19 Agustus ini ditutup pada pukul 14.55 pada waktu Presiden dan Wakil Presiden akan pulang Mereka diminta oleh pemuda-pemuda untuk hadir pada rapat yang mereka Adakan di Jalan Prapatan 10.

Rapat ini dipimpin oleh Adam Malik bersama Mister Kasman dan Ki Hajar Dewantara, hadir pula di situ Sutan Syahrir mereka mengharapkan agar Soekarno Hatta melakukan perebutan kekuasaan terhadap Jepang yang diatur dengan cepat dan serentak. Presiden Soekarno memberikan tanggapan bahwa apa yang mereka kehendaki tidak dapat dilakukan tergesa-gesa, para pemuda menolak pendapat presiden yang dianggapnya berbahaya dan merugikan bangsa Indonesia di mata dunia. Adam Malik kemudian membacakan dekrit mengenai lahirnya tentara Republik Indonesia yang berasal dari bekas peta hubung Karno dan Hatta menyetujui usul Pemuda tersebut tetapi belum dapat memutuskan pada saat itu rapat kemudian bubar.

Pada malam tanggal 19 Agustus 1945 itu di Jalan Gambir Selatan atau sekarang Merdeka Selatan Nomor 10 Presiden Soekarno wakil presiden Hatta Mr Sartono soewirjo Otto Iskandardinata, Sukarjo wirjopranoto, dokter Buntaran, Mr AG pringgodigdoserjo, Kartohari, Kusumo dan dokter Tajaluddin berkumpul untuk membahas siapa saja yang diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP.

Disepakati bahwa anggota KNIP berjumlah 60 orang rapat pertama KNIP direncanakan tanggal 29 agustus 1945 malam bertempat di gedung komedi jalan pos sekarang Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta.

Rapat PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 22 Agustus 1945 dalam rapat itu diputuskan tiga persoalan pokok yang sudah dibahas dalam rapat-rapat sebelumnya yakni pembentukan komite nasional Partai Nasional Indonesia dan badan keamanan rakyat.

Komite Nasional Indonesia akan dibentuk di tingkat pusat dan tingkat daerah tujuan komite seperti dijelaskan Presiden Soekarno antara lain mempersatukan semua lapisan dan bidang pekerjaan agar tercapai solidaritas dan kesatuan nasional yang erat dan utuh, membantu menentramkan rakyat dan melindungi keamanan serta membantu para pemimpin untuk mewujudkan cita-cita bangsa di tingkat pusat pembentukan Komite Nasional Indonesia atau KNIP yang kemudian dikenal dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat diresmikan pada tanggal 29 agustus 1945.

Anggotanya berjumlah 137 orang dan Mr Kasman Singodimedjo diangkat sebagai ketua dibantu oleh 3 wakil ketua yakni Sutardjo Kartohadikusumo atau wakil ketua 1 Mr. Johanes latuharhari, wakil ketua 2 dan Adam Malik wakil ketua 3. Dengan terbentuknya KNIP tugas PPKI sukses berakhir pembentukan KNIP dengan cepat diikuti oleh pembentukan KNI daerah atau knid sejak awal September 1945 sudah terbentuk di berbagai daerah dari tingkat karesidenan sampai tingkat desa.

Dalam pasal 4 aturan peralihan undang-undang Dasar 45 disebutkan bahwa komite nasional adalah sebuah badan yang bertugas membantu Presiden menjalankan kekuasaan MPR, DPR dan DPR sebelum lembaga-lembaga terbentuk berarti KNIP hanya merupakan lembaga pembantik eksekutif pada tanggal 7 Oktober 1945. Kelompok pemuda dalam KNIP mengajukan petisi yang ditandatangi oleh 50 orang kepada Presiden Soekarno agar KNIP diberi wewenang legislatif berdasarkan petisi ini pada tanggal 16 Oktober 1945 wakil presiden Hatta mengeluarkan maklumat Nomor X (baca X bukan 10) yang menyatakan bahwa sebelum DPR terbentuk KNIP diberi kekuasaan legislatif dan ikut serta menentukan garis-garis besar haluan negara. Nyatakan pula bahwa tugas sehari-hari KNIP dijalankan oleh Bandar pekerja KNIP atau BP KNIP.

Sehari kemudian juga atas desakan golongan pemuda dalam KNIP dilangsungkan pemilihan pemimpin baru Sultan Syahrir diangkat menjadi ketua dan Amir Syarifuddin menjadi wakil ketua yang sekaligus juga menjadi ketua dan wakil ketua BP KNIP. Setelah Syahrir menjadi perdana menteri kedudukannya digantikan oleh Mr saat yang memegang jabatan tersebut sampai akhir tahun 1949.

Selama keberadaannya KNIP mengadakan 5 kali sidang pleno sidang yang terpanas adalah sidang tanggal 25 Februari sampai 6 Maret 1947 di Malang berkaitan dengan penambahan jumlah anggota dalam rangka meratifikasi persetujuan Linggajati. Sidang pleno KNI yang berakhir berlangsung dari tanggal 6 sampai 15 Desember 1949 dalam rangka meratifikasi hasil-hasil Konferensi Meja Bundar atau KMB sebagai badan pembuat dan pengesahan undang-undang KNIP menghasilkan 113 undang-undang dan 32 peraturan.

Setelah Republik Indonesia Serikat atau Ris terbentuk dan pada akhir tahun 1949 dan RI menjadi negara bagian dalam Ris KNIP berfungsi sebagai parlemen RI dalam DPR RIS 42 orang, diantara 150 anggotanya berasal dari anggota KNIP Ada pula yang diserap tugas pemerintahan antara lain Mr. Asaat sebagai pejabat Presiden RI dan dokter Abdul Halim sebagai Perdana Menteri RI.

Berbeda dengan KNIP yang bertahan sampai masa akhir perang kemerdekaan PNI sebagai partai Negara hanya bertahan dalam bilangan hari PNI dimaksudkan sebagai wadah untuk memperkuat persatuan bangsa memperbesar rasa cinta setia dan bakti kepada tanah air. Pemimpin partai terdiri atas pengurus besar, pengurus daerah dan pengurus cabang setiap orang Indonesia yang sudah berumur 18 tahun ke atas berhak menjadi anggota. Presiden Soekarno mengatakan bahwa PNI akan menjadi motor perjuangan rakyat dalam segala urusan lapangan berbeda dengan KNI yang merupakan sebuah komite yang diadakan untuk sementara penin dimaksudkan akan hidup terus pada masa yang akan datang.

Pengurus harian PNI diumumkan pada tanggal 27 Agustus 1945 mereka adalah Sayuti Melik, Iwa Kusuma, sumantri, Mister Sujono, wikana dan Mr A.A Maramis. 2 hari kemudian diumumkan pengurus yang lebih lengkap terdiri atas Insinyur Soekarno atau pimpinan besar pertama Drs Muhammad Hatta, pemimpin besar kedua Mr. Gatot Taruna Miharja pemimpin umum atau disebut juga ketua partai Abikusno Tjokrosujoso ketua umum seksi politik dan dokter Moewardi atau ketua seksi organisasi.

Pembentukan PNI sebagai partai negara ini mengundang reaksi penolakan dari berbagai pihak, partai ini dianggap sangat berbau Jawa Hokokai sebab sebagian besar anggotanya adalah orang yang dahulu duduk dalam organisasi buatan Jepang itu partai ini juga tidak mewakili segenap golongan dalam masyarakat golongan Islam misalnya sangat sedikit diwakilan dan Tidak seorangpun tokoh utama gerakan bawah tanah pada masa pendudukan Jepang yang ikutsertakan lagi pula PNI dianggap akan menggusur parenki dari 34 anggota pengurus TNI hanya 4 orang saja yang bukan anggota KNI.

Syahrir dan kelompoknya menganggap pembentukan partai tunggal berenang dengan paham demokrasi yang mengidentikan PNI dengan partai Nazi di Jerman dan partai fasis Italia

sebagai perang dunia ke-2 karena sebagian besar anggotanya adalah bekas anggota Jawa Hokokai diperkirakan pihak luar terutama negara-negara sekutu akan menganggap partai ini buatan Jepang Hal ini akan mempersulit usaha pemerintah untuk memperoleh Pengakuan dari luar negeri.

Akibat banyaknya reaksi menolak pada tanggal 3 Agustus pembentukan PNI dibatalkan atau seperti dikatakan presiden Soekarno untuk sementara waktu ditunda sebab segala aktivitas harus dicurahkan ke dalam komite nasional Indonesia yang kedudukannya sangat penting untuk memusatkan segala tindakan dan susunan rakyat, akan tetapi beberapa daerah cabang Partai ini sudah terbentuk dan dalam proses pembentukan seperti di Palembang di bawah pimpinan dokter AK Gani dan di Makassar di bawah pimpinan Manai Sophiann

Keputusan PPKI tanggal 22 Agustus tentang pembentukan BKR merupakan perubahan dari keputusan untuk membentuk tentara kebangsaan yang diambil dalam sidang tanggal 19 Agustus hal-hal yang berhubungan dengan BKR akan diuraikan di bagian lain.

BAB 12

DUKUNGAN TERHADAP PROKLAMASI

Proklamasi kemerdekaan tidak diketahui di semua daerah pada waktu yang bersamaan hal itu disebabkan oleh sulitnya komunikasi dan adanya penyegelan radio yang dilakukan oleh Jepang pada waktu sebelumnya akan tetapi begitu diketahui tokoh-tokoh di daerah segera menyatakan dukungannya Raja Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono IX misalnya tanggal 18 Agustus sudah mengirimkan telegram Ucapan selamat atas diproklamasikannya kemerdekaan kepada Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta dan dokter Radjiman Wedyodiningrat.

Dukungan daerah pada umumnya diwujudkan dengan pembentukan pemerintahan dan KNIP setempat untuk menyebut beberapa contoh pemerintah RI di Semarang terbentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 di Surabaya pada tanggal 3 September 1945 di Bogor, walaupun dekat dengan Jakarta pemerintahan baru terbentuk pada awal Oktober 1945 keterlambatan pembentukan pemerintahan di beberapa daerah disebabkan pula oleh sikap Jepang yang berusaha menghalangi atau oleh sikap ragu-ragu tokoh setempat namun secara umum dapat dikatakan bahwa pada bulan Oktober 1945 pemerintah RI di daerah-daerah sudah berhasil didirikan.

Dukungan juga dinyatakan oleh para pegawai Indonesia yang tadinya bekerja di jawatan jawatan pemerintahan pendudukan Jepang pada tanggal 30 Agustus 1945 para pegawai ini disertai anggota polisi mengadakan konferensi di Jakarta dalam Konferensi yang diprakarsai oleh Sutardjo Kartohadikusumo ini mereka menyatakan diri sebagai pegawai dan polisi Indonesia sejak itulah mulailah mereka mengambil alih kantor kantor pemerintahan dari tangan Jepang.

Masyarakat umum menyatakan dukungannya dalam bentuk rapat-rapat raksasa, penduduk Surabaya misalnya pada tanggal 11 September mengadakan rapat raksasa di Tambaksari disusul kemudian di Pasar Turi pada tanggal 17 september 1945 dalam kedua Rapat raksasa itu tokoh-tokoh pemuda berseru agar kekuasaan segera diambil alih dari tangan Jepang di Medan Rapat raksasa diadakan pada tanggal 6 Oktober bersamaan dengan diumumkannya secara resmi proklamasi kemerdekaan.

Rapat raksasa yang berskala dan bersifat nasional karena dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden RI serta sejumlah menteri berlangsung pada tanggal 19 September 1945 di Lapangan Ikada Jakarta. Rapat ini direncanakan oleh komite Van Aksi tujuannya ialah agar para pemimpin pemerintahan berbicara langsung dengan rakyat.

Rencana pelanggaran Rapat raksasa ini dilakukan dengan dua cara yaitu persiapan penyerahan massa dan menyampaikan rencana itu kepada presiden dan wakil presiden. Pada prinsipnya Presiden Soekarno dan wakil presiden Hatta setuju, demikian pula para menteri persoalannya ialah bagaimana sikap penguasaan Jepang setelah mereka menyerah dan menjadi alat sekutu bila Jepang bersikap bermusuhan dan menghalang-halangi pasti akan terjadi malapetaka yang hebat yang akan menimpa masa rakyat.

Masalah yang sulit ini kemudian dibicarakan dalam sidang kabinet bertempat di kediaman presiden, sidang berlangsung sampai dini hari tanggal 19 September 1945 tetapi tidak menghasilkan keputusan yang bulat lalu ditangguhkan sampai pukul 10.00 pagi sedang dimulai lagi pada pukul 10.00 di lapangan banteng barat yang dihadiri juga oleh para pemimpin Pemuda.

Para pemimpin Pemuda menyatakan agar rapat tidak dibatalkan sementara itu masa sudah berbondong-bondong membanjiri Lapangan Ikada siap mendengarkan pidato dari pemimpin-pemimpinnya, situasi menjadi sangat tegang karena lapangan Ikada telah dijaga secara ketat oleh pasukan bersenjata Jepang yang juga mengarahkan tentangnya sewaktu-waktu dapat terjadi benturan berdarah akhirnya sidang memutuskan agar para pemimpin datang untuk berhadapan muka dengan masa guna meminta kesediaan mereka untuk mematuhi perintah-perintahnya selanjutnya menyerukan kepada mereka supaya bubar dan pulang ke rumah masing-masing.

Kemudian presiden wakil presiden dan para menteri menuju ke lapangan Ikada. Pada waktu itu lapangan Ikada telah melimpah ruah dengan masa yang membawa berbagai macam senjata tajam tampak pula pasukan-pasukan Jepang dengan bayonet terhunus di samping teng-tengnya. Mobil presiden dan wakil presiden sebelum memasuki lapangan ditahan sebentar oleh Komandan jaga. Mereka saling mengadakan pembicaraan kemudian diperbolehkan meneruskan perjalanan.

Presiden Soekarno langsung menuju panggung berpidato singkat ia meminta kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dengan jalan mematuhi perintah-perintahnya dan tunduk kepada disiplin. Kemudian massa diperintahkan bubar dengan tenang. Ternyata perintah itu ditaati. Rapat raksasa 19 September 1945 itu adalah manifestasi pertama dari kewibawaan pemerintah Republik Indonesia kepada rakyatnya.

Sekalipun Rapat raksasa di lapangan Ikada ini berlangsung hanya beberapa menit berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia yang baru berusia sebulan itu dengan rakyat dan memberikan kepada rakyat kepercayaan kepada potensinya sendiri.

BAB 13

PEREBUTAN KEKUASAAN DAN SENJATA

Di beberapa daerah di Indonesia terjadi perebutan kekuasaan baik dengan cara kekerasan maupun dengan jalan perundingan. Di beberapa keresidenan di Jawa pada bulan September 1945 pemimpin masing-masing menyambut Proklamasi Kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai pemerintah Republik Indonesia dan mengancam bahwa terhadap segala tindakan yang menentang pemerintah RI akan diambil tindakan keras.

Pegawai-pegawai Jepang dirumahkan dilarang memasuki kantor-kantor mereka pada tahap selanjutnya para pemuda berusaha merebut senjata dan gedung-gedung vital. Di Surabaya selama bulan September terjadi perebutan senjata di Arsenal atau gudang mesiu dan Bosco perebutan markas pertahanan Jawa Timur pangkalan angkatan laut ujung dan markas markas tentara Jepang serta pabrik-pabrik yang tersebar di seluruh kota.

Pada tanggal 19 September 1945, ketika perebutan senjata Jepang masih berlangsung terjadi insiden bendera di Hotel Yamato insiden ini pecah Ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki hotel tersebut dibantu oleh serombongan pasukan Inggris yang diterjunkan di Gunung Sahari untuk mendirikan markas RAPWI. Orang-orang Belanda tersebut mengibarkan bendera mereka di puncak hotel.

Hal ini memancing kemarahan para pemuda. Hotel tersebut diserbu oleh para pemuda setelah permintaan residen Sudirman dengan cara baik-baik untuk menurunkan bendera Belanda ditolak oleh penghuni hotel. Bentrokan tidak dapat dihindarkan beberapa orang pemuda berhasil memanjat atap Hotel serta menurunkan bendera Belanda yang berkibar di atasnya mereka merobek warna birunya dan mengibarkan kembali sebagai merah putih.

Sasaran perebutan selanjutnya adalah markas kompeitai, yang dianggap sebagai lambang kekejaman pemerintah Jepang. Pada tanggal 1 Oktober 1945 markas itu diserbu oleh rakyat. Gedung dipertandingkan dengan Gigi oleh pihak Jepang tetapi jatuh ke tangan rakyat setelah pertempuran selama 5 jam. Dalam pertempuran ini 25 orang pemuda gugur dan 60 luka-luka sedangkan 15 orang prajurit Jepang mati.

Di Yogyakarta perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10.00 pagi semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan semua kantor kepada orang Indonesia pada tanggal 27 September 1945 KNI daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah

berada di tangan pemerintah RI pada hari itu juga di Yogyakarta terbit surat kabar kedaualatan rakyat.

Para pemuda yang tergabung dalam BKR berusaha memperoleh senjata. Usaha untuk melucuti Jepang melalui perundingan sama sekali gagal pada tanggal 7 Oktober malam para pemuda BKR bersama dengan Pemuda polisi istimewa bergabung menuju Kota Baru mereka menyebut tongsi sekarang gudang SMA di sebelah Central telepon atau disebut otsukabutai pada hari itu juga sukabutai menyerah korban yang gugur dalam penyerbuan ini 18 orang terdiri dari pemuda dan polisi.

Di Bandung pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas Constructie Winkel (ACW), sekarang Pindad dan terus berlangsung sampai kedatangan pasukan Inggris di kota Bandung pada 17 Oktober 1945.

Di Semarang perebutan senjata menimbulkan korban yang cukup banyak di kedua belah pihak. Di kota ini terdapat pasukan Jepang di bawah pimpinan Mayor Kido dan karena itu disebut pasukan Kido butai. Gubernur Jawa Tengah wongsonegoro meminta agar Mayor Kido menyerahkan senjata pasukannya kepada pemerintah RI dengan jaminan tidak akan digunakan untuk melawan Jepang. Mayor Kido hanya menyerahkan sebagian kecil dan itupun senjata usaha hal ini menimbulkan rasa tidak puas di kalangan pemuda yang tergabung dalam BKR dan Laskar Laskar Mereka pun mengadakan aksi merampas senjata dan kendaraan-kendaraan Jepang secara paksa.

Pada tanggal 14 Oktober 1945 dalam situasi yang sudah panas itu 400 tawanan Jepang dengan dikawal oleh Polisi Indonesia diangkut dari pabrik gula Cipiring ke Semarang untuk dimasukkan ke penjara bulu. Dalam perjalanan sebagian tawanan itu berhasil melarikan diri dan bergabung dalam pasukan Kido butai di Jatingaleh Sekarang pukul 03.00 tanggal 15 Oktober pasukan Kido butai bergerak ke dalam kota. Pertempuran pun berkobar antara lain di Simpang Lima dan Di Hotel du Pavillon. Pasukan Jepang membunuh siapa saja yang mereka temui bahkan para pemuda yang menyerah para pemuda pun melakukan pembalasan dengan membunuh orang-orang Jepang yang ditawan di penjara bulu.

Pertempuran berlangsung sampai tanggal 19 Oktober dan karena itu dikenal dengan nama pertempuran lima hari di Semarang dalam pertempuran itu ditaksir jatuh korban sebanyak 990 orang di kedua pihak. Pertempuran berhenti setelah pasukan sekutu yang mendarat di Semarang tanggal 19 Oktober langsung melucuti pasukan Jepang.

Pertempuran atau lebih tepat pembantaian yang dilakukan Jepang terhadap rakyat terjadi di Tebing Tinggi Sumatera Utara selama 4 hari Mulai tanggal 13 Desember 1945. Dua hari sebelumnya 11 Desember para pemuda Tebing Tinggi menahan kereta api yang

mengangkut orang-orang sipil Jepang ke tempat penampungan mereka di Kisaran. Mereka dikawal oleh tentara di bawah pimpinan Kapten Namura. Para pemuda meminta agar Jepang menyerahkan senjatanya karena ditolak 4 orang Jepang disandera oleh para pemuda 3 orang diantaranya termasuk Kapten Namora mereka bunuh akibatnya pada tanggal 13 Desember Jepang menyerang Kota Tebing Tinggi dengan mengarahkan pancer-pancer selama 4 hari mereka melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap rakyat pihak Jepang mengatakan bahwa penduduk yang tewas berjumlah antara 500 sampai 800 sedangkan menurut pihak Indonesia antara 2000 sampai 5000 orang.

Di Lengkong Tangerang Banten sampai pertengahan Januari 1946 masih terdapat pasukan Jepang di bawah pimpinan Kapten AB pemimpin resimen 4 TKR menghubungi Kapten Abe untuk meminta senjata, tetapi ditolak dengan alasan senjata harus diserahkan kepada sekutu komandan resimen 4 Letnan Kolonel Singgih akhirnya memutuskan untuk merebut senjata secara paksa, ia mengarahkan para Taruna Akademi Militer Tangerang di bawah pimpinan Mayor Daan Mogot untuk melakukan hal itu. Para Taruna ini menyamar sebagai tentara sekutu bahkan delapan orang tentara India muslim yang sudah menyeberang ke pihak RI diikutsertakan.

Pada mulanya rencana berjalan lancar sejumlah senjata dapat diperoleh namun kemudian penyamaran mereka diketahui oleh Kapten AB ia segera memerintahkan pasukannya melancarkan serangan Jepang berhasil merebut kembali senjata yang sudah mereka serahkan dan oleh para Taruna ditumpuk di halaman markas sehingga tidak sempat mereka gunakan. Dalam pertempuran yang tidak seimbang itu Mayor Daan Mogot dan 37 Taruna gugur sedangkan 35 orang tertawan.

Tidak semua usaha merebut senjata Jepang berakhir dengan pertempuran ada kalanya senjata diperoleh melalui perundingan atau melalui perang pirang pura. Di Banyumas misalnya komandan divisi 5 TKR Kolonel Sudirman dan Residence Tjokroadisurjo berhasil memperoleh senjata yang cukup banyak melalui perundingan dengan komandan Jepang.

Di Indonesia bagian timur Kalimantan Sulawesi dan lain-lain pasukan Australia yang mewakili sekutu lebih cepat tiba dibandingkan dengan pasukan Inggris di Jawa dan Sumatera. Di Makassar misalnya mereka sudah tiba menjelang akhir september 1945 sesudah melucuti Jepang mereka menyerahkan pemerintahan sipil kepada aparat NICA atau Belanda. Oleh karena itu, pada umumnya pihak Indonesia di daerah bagian timur ini langsung berhadapan dengan Belanda walaupun perebutan senjata dengan Jepang juga terjadi di beberapa tempat.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 rombongan dokter Sam Ratulangi Gubernur Sulawesi mendarat di sampaia Bulukumba, setibanya kembali di Makassar Gubernur mulai menyusun

pemerintahan akan tetapi dalam segala tindakan Gubernur oleh para pemuda dianggap terlalu berhati-hati, para pemuda mulai mengorganisasikan diri dan merencanakan untuk merebut gedung-gedung vital seperti studio, radio dan sanksi polisi yang sudah dikuasai oleh Belanda dibawah perlindungan pasukan Australia. Kelompok Pemuda tersebut terdiri dari kelompok barisan berani mati bekas Kaigun Heiho dan pelajar SMP. Pada tanggal 28 Oktober mereka bergerak menuju sasaran dan mendudukinya. Karena peristiwa itu pasukan Australia bergerak dan melucuti para pemuda. Sejak itu pusat gerakan Pemuda dipindahkan dari Makassar ke Polombangkeng.

Di Sulawesi Utara sekalipun telah hampir setengah tahun dikuasai NICA usaha menegakkan kedaulatan tidaklah padam. Pada tanggal 14 Februari 1946 Pemuda Indonesia anggota KNIL yang tergabung pada pasukan Pemuda Indonesia atau PPKI mengadakan gerakan di Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di Teling Manado. Mereka membebaskan tokoh-tokoh propri yang di Tanica di penjara tersebut antara lain Taulu, Wuisan, Sumanti, G. A. Maengkom, kusno dhanupojo, dan G. E. Udhan.

Sebaliknya mereka menahan komandan garnisun Manado dan semua pihak Belanda diteling dan penjara Manado. Dengan diawali oleh peristiwa itu para pemuda menguasai markas Belanda di Tomohon dan Tondano. Berita mengenai perebutan kekuasaan mereka kirim ke pemerintahan pusat di Yogyakarta dan mengeluarkan maklumat nomor 1 yang ditandatangani oleh CH taulu pemerintah sipil dibentuk pada 16 Februari dan sebagai presiden dipilih BW latihan satuan lokal Tentara Indonesia disusun dengan pimpinan kolektif Ch. Taulu, Wuisan dan J. Ka seger.

Di beberapa kota di Kalimantan timbul bulat gerakan yang mendukung proklamasi, akan tetapi tentara Australia yang sudah mendarat mengeluarkan ultimatum milarang semua aktivitas politik seperti demonstrasi dan mengibarkan bendera merah putih memakai Lencana Merah Putih dan menyelenggarakan rapat-rapat namun kaum nasionalis tetap melaksanakannya di Balikpapan pada tanggal 14 November 1945 sejumlah 8000 orang berkumpul di depan Kompleks Indonesia sambil membawa Bendera Merah Putih.

Di Gorontalo pada tanggal 13 September 1945 terjadi perebutan senjata terhadap markas-markas Jepang kedaulatan RI berhasil ditegakkan dan pemimpin-pemimpin Republik menolak setiap ajakan untuk berunding dengan pasukan pendudukan Australia kekuatan mereka berjumlah 600 orang pemuda yang terlatih.

Di Pulau Sumbawa pemuda-pemuda Indonesia pada bulan Desember 1945 berusaha merebut senjata dari Jepang di GMP terjadi bentrokan antara 200 Pemuda dan Jepang di Sape

4 seorang pemuda berusaha merebut senjata di markas Jepang juga diraba terjadi peristiwa yang sama.

Di Bali para pemuda membentuk beberapa organisasi pemuda seperti Ami dan pemuda Republik Indonesia pada akhir bulan Agustus mereka berusaha menegakkan kekuasaan RI melalui perundingan tetapi mendapat hambatan dari pihak Jepang pada tanggal 13 Desember 1945 mereka melakukan gerakan serentak untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang tetapi gagal.

Di Biak timbul pemberontakan 14 Maret 1948 yang sasarannya adalah Kampung NICA Tangsi sorido, pemberontakan itu gagal dua orang pemimpinnya dihukum mati dan lainnya dihukum seumur hidup.

Di Banda Aceh pada tanggal 6 Oktober 1945 para pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat membentuk angkatan Pemuda Indonesia atau API pada tanggal 12 Oktober 1945 Shucokan Jepang memanggil para pemimpin Pemuda ia menyatakan sekalipun Jepang telah kalah keamanan dan ketertiban masih menjadi tanggung jawab pemerintah Jepang. Oleh karena itu, ia meminta agar semua kegiatan mendirikan perkumpulan yang tanpa izin dihentikan perkumpulan yang sudah terlanjur didirikan supaya dibubarkan para pemimpin menolak dengan keras pertemuan berubah menjadi pembantahan sejak hari itu dimulai dari perebutan dan pengambil alihan kantor-kantor pemerintahan dan pengibaran bendera merah putih. Pelucutan senjata Jepang terjadi di beberapa tempat bentrokan bentrokan dengan pasukan Jepang terjadi di Langsa loanga ulelehu dan tempat-tempat lain di Aceh.

Di Sumatera Selatan perebutan kekuasaan terjadi pada tanggal 8 Oktober 1945 ketika residen Sumatera Selatan dokter AK Gani bersama seluruh pegawai Gun Seibu dalam suatu upacara menggerek bendera merah putih setelah upacara itu para pegawai negeri kembali kantornya masing-masing untuk di sana menggeret bendera merah putih pada hari itu juga diumumkan bahwa di seluruh karesidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan yaitu kekuasaan Republik Indonesia perebutan kekuasaan di Palembang ini berlangsung tanpa insiden karena orang-orang Jepang telah menghindar ketika terjadi demonstrasi.

BAB 14

MENYUSUN KEKUATAN PERTAHANAN KEAMANAN

Di bagian depan sudah disebutkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengambil keputusan untuk membentuk badan keamanan rakyat atau BKR. Keputusan itu merupakan perubahan dari keputusan yang diambil tiga hari sebelumnya tentang pembentukan tentara kebangsaan. BKR bertugas sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi Komite Nasional Indonesia atau KNI setempat.

Pembentukan BKR diumumkan presiden Soekarno tanggal 23 Agustus 1945. Presiden berseru agar para bekas tentara PETA Heiho dan pemuda-pemuda lain memasuki BKR sambil menunggu dibentuknya tentara kebangsaan. Di daerah-daerah yang dengan cepat mengetahui Pengumuman itu segera terbentuk BKR. Di Jakarta terbentuk BKR pusat di bawah pimpinan Kasman singodimedjo bekas daidanco peta Jakarta. Setelah Kasman diangkat menjadi ketua KNIP kedudukannya digantikan oleh keperawih bekas jahitan Sukabumi. BKR pusat ini dimaksudkan sebagai koordinator dan pengendali BKR BKR daerah. Selain BKR pusat di Jakarta terbentuk pula BKR Jakarta di bawah pimpinan mufraeni Mukmin.

Para pemuda bekas kaigun Heiho karyawan Jawa Unko Kaisa serta para siswa dan guru-guru Sekolah Tinggi pelayaran membentuk BKR laut di daerah-daerah pelabuhan. Di Jakarta terbentuk BKR laut Pusat di bawah pimpinan m Pardi dibantu antara lain oleh RE Martadinata. BKR laut pusat ini mengeluarkan instruksi-instruksi dan mengirim utusan ke daerah-daerah pelabuhan sehingga di tempat-tempat tersebut terbentuk pula BKR laut. Di Jawa misalnya terbentuk dekat laut di Banten Tegal Semarang dan Pasuruan sedangkan di Sumatera terbentuk di Palembang Tanjung Karang Sibolga Belawan dan Pariaman.

Sementara itu para pemuda di sekitar pangkalan udara membentuk BKR udara antara lain di Bugis, Malang, Maospati atau Madiun Kalibanteng Semarang Tasikmalaya dan Cililitan atau Jakarta serta berapa tempat di Sumatera.

Padang Bulan September 1945 tokoh-tokoh BKR pusat menghubungi para bekas perwira KNIL yang ada di Jakarta. Mereka bersama-sama menghadap menteri penerangan Amir Syarifuddin dengan maksud mendesak Presiden Soekarno agar segera dibentuk tentang reguler. Amir Syarifudin meminta jaminan dari para bekas perwira knil bahwa mereka akan berdiri di belakang perjuangan bangsa dengan segala konsekuensinya.

Untuk Memperoleh jaminan itu bekas perwira KNIL di Kartasasmita ditugasi Amir menghubungi rekan-rekannya di kota lain di Jogja Didi mendapat jaminan dari bekas Mayor knil Oerip Sumarhardjo yang oleh bekas perwira KNIL dan Perwira lainnya dianggap sebagai

sesepuh dan sangat dihormati. Di Bandung Didi menemui perwira yang lebih unik yakni lulusan Corps Opleidinh Reserve Officieren, antara lain A.H Nasution. Mereka pun berikan jaminan.

Akhirnya barang bekas KNIL ini mengeluarkan pernyataan bersama bahwa mereka tidak terikat lagi dengan sumpah sebagai KNIL dan siap membantu perjuangan sebagai para pemuda tidak puas dengan pembentukan BKR para pemuda di Jakarta yang pada zaman Jepang telah membentuk kelompok-kelompok politik yang besar peranannya dalam mencetuskan proklamasi menginginkan dibentuknya tentara nasional.

Setelah usul mereka mengenai pembentukan tentara nasional ditolak oleh presiden dan wakil presiden mereka menempuh jalan lain. Mereka membentuk badan-badan perjuangan yang kemudian menyatukan diri dalam bentuk komite Van Aksi yang bermarkas di Jalan Menteng 31 di bawah pimpinan Adam Malik Sukarni Chairul Saleh, Marut Nitimihardjo dan lain lain.

Badan-badan perjuangan yang bernaung dibawah komite Van Aksi adalah angkatan Pemuda Indonesia tapi barisan rakyat Indonesia Barat dan barisan Buruh Indonesia atau BBI. Badan- badan lainnya dibentuk di seluruh Jawa seperti barisan banteng kebaktian rakyat Indonesia Sulawesi atau keris Pemuda Indonesia, Maluku atau tim Hizbullah Sabilillah Pemuda sosialisasi Indonesia atau pesindo, dan barisan pemberontakan rakyat Indonesia atau BPRI. Di samping itu terdapat pola badan perjuangan yang bersifat khusus seperti kesatuan-kesatuan pelajar Tentara Pelajar atau TP tentara Geni pelajar atau TGP dan tentara Republik Indonesia pelajar atau TRIP.

Pembentukan badan-badan perjuangan juga terjadi di Sumatera sulawesi dan pulau lainnya di Aceh dibentuk angkatan Pemuda Indonesia atau API di bawah pimpinan jama'un gaharu dan barisan pemuda Indonesia yang kemudian menjadi Pemuda Republik Indonesia atau BRI. Di bawah pimpinan A hasyimi di Medan terbentuk barisan Pemuda Indonesia atau BPI di bawah pimpinan Ahmad Tahir, sedangkan di Padang terbentuk Balai penerangan Pemuda Indonesia atau BPPIdi bawah pimpinan Ismail lengah.

Sementara itu barisan pelopor yang dibentuk pada zaman Jepang pada bulan September menyatakan diri berenang di bawah KNI di Sulawesi setelah Selatan dibentuk pusat Pemuda Nasional Indonesia atau PPNI di bawah pimpinan Monai shopiaan serta kelompok angkatan muda Republik Indonesia Thamrin Pemuda Merah Putih dan penunjang Republik Indonesia atau PRI.

Setelah mengalami sendiri tindakan-tindakan provokatif dan bahkan agresif dari pasukan-pasukan Belanda yang oleh tentara sekutu dikeluarkan dari tawanan Jepang serta

kemudian dipersenjatai pemerintah RI menyadari bahwa sebuah tentara reguler bukanlah merupakan suatu luks. Karenanya pemerintah kemudian memanggil pensiunan Mayor KNIL Oerip Sumoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan kepadanya disertai tugas menyusun tentara nasional.

Pada tanggal 5 Oktober dikeluarkan Maklumat pemerintah yang menyatakan berdirinya tentara nasional yang disebut tentara keamanan rakyat atau TKR sebagai pimpinan TKR ditunjuk Supriyadi tokoh pemberontakan tentara pembela tanah air atau peta terhadap Jepang di Blitar dan sebagai Menteri keamanan rakyat ada interim diangkat bekas Daidanco peta. Dengan dasar Maklumat pemerintah tersebut segera dibentuk markas tertinggi TKR oleh Oerip Sumoharjo yang berkedudukan di Yogyakarta. Di Pulau Jawa terbentuk 10 divisi dan di Sumatera 6 divisi.

Berkembangnya kekuatan pertahanan dan keamanan yang begitu cepat memerlukan suatu pemimpin yang kuat dan berwibawa untuk mengatasi segala persoalan akibat dari pengembangan tersebut suprijadi yang telah ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi TKR ternyata tidak pernah menduduki posnya diperkirakan ia sudah dibunuh Jepang setelah pemberontakan yang dipimpinnya di Blitar gagal pada bulan November 1945 atas prakarsa markas tertinggi TKR diadakan.

Pemilihan pemimpin tertinggi TKR yang baru yang terpilih adalah Kolonel Sudirman komando divisi 5 atau Banyumas sebulan Kemudian pada tanggal 18 Desember 1945 Sudirman dilantik sebagai panglima besar atau pangsar TKR dengan pangkat Jenderal wirid Sumoharjo tetap menduduki jabatan lamanya kepala staf umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal.

Terpilihnya Sudirman merupakan titik tolak agama organisasi kekuatan pertahanan keamanan TKR berubah menjadi TNI pada bulan Januari 1946, Sudirman berpendapat bahwa TNI adalah tentara nasional dan tentara rakyat yang percaya pada kekuatan sendiri tanpa mengharap bantuan dari luar negeri sementara itu kekuatan di luar TKR yaitu badan-badan perjuangan.

Pada tanggal 10 November 1945 Mengadakan kongres pemuda seluruh Indonesia di Yogyakarta, kongres dipimpin oleh Chairul Saleh dan Sukarno yang dihadiri oleh 332 utusan dari 30 organisasi pemuda seluruh Indonesia sekalipun di dalam Kongres ini lahir 2 kekuatan yang bersaing yaitu kelompok Khairul Saleh dan kelompok Sumarsono atau pesindo tetapi berhasil membentuk badan Kongres Pemuda Indonesia atau BKMI.

Sselanjutnya badan-badan perjuangan yang ditampung di dalam wadah biro perjuangan dalam Kementerian Pertahanan baik anggota BKR maupun badan-badan perjuangan ini menganggap dirinya adalah pejuang BKR yang kemudian menjadi TKR dan

TRI menganggap dirinya sebagai pejuang bersenjata yang juga aktif di dalam bidang sosial, politik antara lain dalam KNIP dan pemerintah sedangkan badan-badan perjuangan menganggap diri mereka berjuang di bidang sosial politik juga aktif dalam pertahanan negara.

Kedua kelompok pejuang ini kemudian diintegrasikan menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada bulan Juni 1947 yaitu tentara yang bukan semata-mata alam negara atau pemerintah melainkan alat rakyat alat revolusi dan alat bangsa Indonesia pada pertengahan tahun 1947 alat pertahanan dan keamanan berhasil dikonsolidasikan dan sekaligus diintegrasikan.

Alat pertanian keamanan lainnya ialah kepolisian negara berbeda dengan peta dan Heijo kesatuan-kesatuan polisi tidak dibubarkan oleh Jepang senjata Mereka pun tidak dilucuti kesatuan-kesatuan inilah yang ditransformasikan menjadi kepolisian negara.

Pada tanggal 29 September 1945 RS Soekanto tjokroadiatmodjo diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara atau KKN. Pada mulanya kepolisian ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama jawatan Kepolisian Negara atau DKN dan hanya mengurus hal-hal yang bersifat administrasi sedangkan yang berhubungan dengan operasional bertanggung jawab kepada jaksa agung Barulah pada 1 Juli 1956 kepolisian negara dipisahkan dari Departemen dalam negeri yang ditempatkan langsung di bawah perdana menteri.

Mula-mula kepolisian berkedudukan di Jakarta namun setelah Kementerian Dalam Negeri pindah ke Purwokerto kepolisian negara pindah pula ke Purwokerto. Di Purwokerto inilah sesungguhnya dimulai usaha pembinaan kepolisian di Jawa dibentuk tiga daerah kepolisian kemudian dijadikan dua yakni penilik kepolisian Jawa Timur berkedudukan di Blitar dan pendiri kepolisian di Jawa Tengah berkedudukan di Magelang di Sumatera dibentuk cabang kepolisian di samping menata organisasi dibentuk pula pasukan khusus yaitu mobrik atau mobile brigade yang pada tahun 1956 berganti nama menjadi brigade mobil atau Brimob.

Pada waktu Belanda melancarkan Agresi Militer pertama Kepolisian Negara di militerisasi dan ditempatkan teknis di bawah komando militer setempat setelah Purwokerto diduduki Belanda kedudukan pusat polisi negara dipindahkan ke Jogja.

BAB 15

PERTEMPURAN MELAWAN SEKUTU

Ketika Perang Pasifik masih berlangsung sekutu membagi Indonesia menjadi dua Daerah Operasi Sumatera dimasukkan ke dalam operasi South East Asia Command (SEAC) di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Maubattan, sedangkan Jawa dan Indonesia bagian Timur ke dalam daerah operasi South West Pacific Command (SWPC) di bawah komando jenderal Mac Arthur.

Daerah Operasi itu berubah setelah perang dunia 2 di Eropa berakhir dengan menyerahkan Jerman bulan Mei 1945. Dalam Konferensi gabungan kepala staf sekutu di Postdam bulan Juli seluruh wilayah Indonesia dijadikan daerah operasi SEAC sebab MacArthur ingin mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya untuk langsung menyerbu Kepulauan Jepang. Serah terima resmi kedua komando utama sekutu itu baru dilaksanakan tanggal 15 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah.

Daerah yang menjadi tanggung jawab sehat meliputi Pulau pulak Burma atau Myanmar Thailand Indocina dan semenanjung Tanah Melayu. Untuk Indonesia dibentuk komando khusus yaitu Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) di bawah komando Letnan Jenderal Sir Philips Christison. Sebelum pasukan ini sempat melancarkan operasi militer Jepang sudah menyerah Oleh karena itu tugas AFNEI dialihkan dari tugas militer ke tugas administratif tugas itu adalah:

1. Menerima penyerahan dari tangan Jepang
2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu
3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan
4. Menegakkan dengan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil
5. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan sekutu

Pasukan AFNEI tidak cukup banyak untuk memasuki seluruh Indonesia sehingga Indonesia di bagian timur diserahkan kepada tanggung jawab pasukan Australia. Pasukan AFNEI hanya akan menjalankan tugasnya di Jawa dan Sumatera. Semula Mountbatten memperkirakan pasukan yang akan dikirimkan itu cukup satu divisi namun setelah mempelajari perkembangan situasi diputuskannya Untuk mengerahkan tiga divisi.

Divisi-divisi tersebut ialah divisi India ke-26 di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hm Chambers untuk Sumatera divisi India ke-23 di bawah pimpinan DC Houten untuk Jawa Barat dan divisi India kelima di bawah pimpinan Mayor Jenderal E. C. Mansergh untuk Jawa Timur

pengiriman divisi-divisi itu tidak dapat dilakukan secara serentak sebab sekutu kekurangan kapal pengangkut.

Sebelum melakukan pendaratan sekutu terlebih dahulu mengirim Mayor greenhagh untuk mempersiapkan markas besar sekutu di Jakarta. Ia diterjunkan dengan perasaan di lapangan terbang Kemayoran pada tanggal 14 September 1945. 15 hari kemudian 29 september 1945 Rombongan pertama yang diangkut dengan kapal Chamberlain mendarat di Tanjung Priok Jakarta dalam rombongan ini terdapat Laksamana Muda WR Peterson sesudah itu menyusul pendaratan di tempat-tempat lain.

Sampai akhir Oktober 1945 sekutu sudah mendarat di tiga kota pelabuhan utama di Jawa yaitu Jakarta Semarang dan Surabaya dan 3 Kota pelabuhan utama di Sumatera yaitu Medan Padang Palembang. Dari kota-kota ini mereka bergerak ke kota-kota pedalaman antara lain Bandung dan Magelang untuk membebaskan para internet dan menerima penyerahan Jepang sementara itu pasukan Australia mendarat di pulau di beberapa tempat di Indonesia bagian timur.

Kedatangan pasukan Sekutu disambut dengan sikap Netral oleh pihak Indonesia apalagi dalam wawancara dengan pers di Singapura tanggal 29 September 1945 Kristen mengatakan bahwa tugas sekutu hanyalah untuk membebaskan tawanan perang dan interniran serta mewujudkan pasukan Jepang sekutu tidak akan mencampuri urusan politik dan tidak akan menyingkirkan pemerintah RI Bahkan ia bermaksud mengadakan musyawarah dengan pemimpin RI pernyataan ini menghebohkan pemerintah Belanda sebaliknya dianggap sebagai pengakuan de facto terhadap RI apalagi pada tanggal 1 Oktober 1945 krisis mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno oleh karena itulah kedatangan pasukan sekutu ini diterima dengan tangan terbuka oleh pejabat-pejabat RI.

Akan tetapi setelah diketahui bahwa dalam pasukan sekutu terdapat serdadu Belanda dan aparat NICA yang terang-terangan termasuk menegakkan kembali pemerintah Hindia Belanda sikap pihak Indonesia berubah menjadi curiga bahkan memperlihatkan sikap permusuhan.

Situasi keamanan dengan cepat memburuk sebab NICA mempersenjatai kembali anggota KNIL yang baru dibebaskan dari tawanan Jepang. Di kota-kota yang diduduki oleh sekutu seperti Jakarta dan Bandung anggota KNIL ini memanjang kerusuhan dengan mengadakan provokasi-provokasi bersenjata bahkan di Jakarta mereka berusaha membunuh Perdana Menteri Sutan Syahrir, menteri penerangan Amir Syarifuddin aksi-aksi Terror terhadap penduduk mereka lakukan dengan memakai seragam sekutu.

Hal inilah yang antara lain menyebabkan Presiden Soekarno dan wakil presiden Hatta pada tanggal 4 Januari 1946 pindah ke Yogyakarta yang sampai akhir tahun 1949 dijadikan ibukota RI. Pihak Indonesia menilai bahwa sekutu melindungi kepentingan Belanda. Oleh karena itu, kehadiran mereka ditentang yang dengan sendiri menimbulkan bentrokan-bentrokan senjata bahkan di beberapa kota meledak menjadi pertempuran di bawah ini diceritakan beberapa pertempuran yang akan terjadi antara pihak Indonesia dan sekutu atau Inggris.

BAB 16

PERTEMPURAN SURABAYA

Pertempuran Surabaya tidak lepas kaitannya dengan peristiwa yang mendahuluinya yaitu usaha perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai tanggal 2 September 1945, perebutan kekuasaan dan senjata ini membangkitkan suatu pergolakan sehingga berubah menjadi situasi revolusi yang konfrontatif.

Para pemuda berhasil memiliki senjata dan para pemuka pemerintah menguasai pemuda yang keduanya siap menghadapi berbagai ancaman yang datang dari manapun pada tanggal 25 Oktober 1945 Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir a.w.s Mallaby mendarat di Surabaya pribadi ini adalah bagian dari divisi India ke-23 di bawah pimpinan Mayor Jenderal DC Howtorn mereka mendapat tugas dari Panglima AFNEI untuk melucu dasar dari Jepang dan dilamar dan para Inter Milan sekutu kedatangan mereka diterima secara enggan oleh pemerintah Jawa Timur yang dipimpin oleh Gubernur Soerjo setelah diadakan pertemuan antara wakil-wakil pemerintah RI dan Brigadir Mallaby dicapai kesepakatan:

1. Inggris berjanji bahwa diantara tentara mereka tidak terdapat Angkatan perang Belanda
2. Tidak berlebihan akan bekerja sama untuk menjamin keamanan dan ketentraman
3. Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang

Kemudian pihal RI memperkenankan tentara Inggris memasuki kota dengan syarat hanya objek-objek yang sesuai dengan tugasnya yang boleh didukung diduduki seperti kampung-kampung tawanan.

Pihak Inggris juga menyatakan bahwa di antara Tentara mereka tidak terdapat tentara Belanda dalam perkembangan selanjutnya ternyata pihak Inggris mengingkari janjinya pada tanggal 26 Oktober 1945 malam 1 peleton dari field security section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan ke penjara kalisosok untuk membebaskan Kolonel huiyer. Seorang kolonial angkatan laut Belanda dan kawan-kawannya.

Tindakan Inggris dilanjutkan pada keesokan harinya dengan menduduki pangkalan udara Tanjung Perak kantor pos besar gedung international dan objek-objek lainnya pada tanggal 27 Oktober pukul 11.00 pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet yang berisi Perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata-senjata yang dirampas dari Jepang pemerintah RI menanyakan perang tersebut kepada Mallaby.

Mallaby mengaku tidak mengetahui perihal pamflet tersebut tetapi ia berpendirian bahwa sekalipun sudah ada perjanjian dengan pemerintah RI yang akan melaksanakan tindakan sesuai dengan isi konflik tersebut sikap ini menghilangkan kepercayaan pemerintah RI

terhadapnya pemerintah memerintahkan kepada para pemuda untuk siaga menghadapi segala kemungkinan baik Inggris melalui menyita kendaraan-kendaraan yang lewat.

Pada pukul 14.00 tanggal 27 Oktober 1945 terjadi kontak senjata yang pertama antara pihak Pemuda dan Inggris. Peristiwa meluas menjadi serangan umum terhadap kedudukan Inggris di seluruh kota selama 2 hari. Pertempuran seru terjadi beberapa sektor pada tanggal 28 Oktober kedudukan Inggris bertambah kritis, teknik mereka berhasil dilumpuhkan pada tanggal 29 Oktober 1945, beberapa objek vital dapat direbut kembali oleh pemuda untuk menyelamatkan pasukannya dari bahaya kehancuran total, pihak Inggris menghubungi Presiden Soekarno dan meminta presiden agar memerintahkan ke Indonesia menghentikan serangan pada keesokan hari ini tanggal 29 Oktober 11.30 Presiden Soekarno bersama-sama dengan Mayor Jenderal DC Howthotn atasannya Brigadir Mallaby tiba di Surabaya.

Presiden Soekarno didampingi oleh wakil presiden Muhammad Hatta dan menteri penerangan Amir Syarifudin segera berunding dengan Mallaby. Perundingan menghasilkan keputusan menghentikan kontak senjata perundingan dilanjutkan pada malam hari antara Presiden Soekarno Wakil pemerintah RI di Surabaya wakil Pemuda dan ke Inggris yang didampingi oleh Jenderal Horton dalam perundingan tersebut didapat dikesempakan eksistensi RI diakui oleh Inggris dan cara-cara menghindari bentrokan senjata diatur sebagai berikut:

1. Surat-surat selebaran yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal DC Howtorn dinyatakan tidak berlaku.
2. Inggris mengaku eksistensi TKR dari polisi
3. Pasukan Inggris hanya bertugas menjaga kampung-kampung tawanan penjaga yang dilakukan bersama dengan TKR
4. Untuk sementara waktu Tanjung Perak dijaga bersama TKR polisi dan tentara Inggris guna menyelesaikan tugas menerima obat-obatan untuk tawanan perang

Hasil perundingan yang bertugas kembali oleh menteri penerangan bahwa:

- a. Dibentuk suatu kontak biru yang terdiri dari unsur 2 memiliki NKRI di Surabaya bersama-sama tentara Inggris
- b. Daerah Pelabuhan dijaga bersama dan kedudukan masing-masing ditentukan oleh kontak biro
- c. Daerah Dharma daerah Kampung Intermilan orang-orang Eropa dijaga oleh tentara Inggris hubungan antara Dharma dan Pelabuhan Tanjung Perak diamankan untuk mempercepat pelaksanaan pemindahan tawanan
- d. Tawanan dari kedua belah pihak harus dikembalikan kepada pihak masing-masing

Perundingan selesai pada tanggal 30 Oktober 1945 Presiden Soekarno dan Jenderal DC Horton meninggalkan Surabaya pada pukul 13.00 hari itu juga dalam perundingan tersebut juga disepakati nama-nama anggota kontak merah dari kedua belah pihak dari pihak Inggris 5 orang dari pihak Indonesia 9 orang.

Sementara itu di beberapa tempat masih terjadi pertempuran sekalipun sudah diumumkan kejadian senjata. Oleh karena itu, para anggota kontak biru dari kedua belah pihak mendatangi tempat-tempat tersebut dengan maksud menghentikan pertempuran setempat itu pada pukul 17.00 tanggal 30 Oktober 1945 seluruh anggota kontak di Arab Saudi bersama-sama menuju beberapa tempat.

Tempat yang terakhir adalah gunung Bank Internasional di Jembatan Merah gedung ini masih diduduki oleh pasukan Inggris dan pemuda-pemuda masih mengepungnya. Setibanya di tempat ini terjadi insiden pemuda-pemuda menuntut agar pasukan Mallaby menyerah melalui tidak dapat menerima tuntutan itu tiba-tiba terdengar tembakan gencar dari dalam gedung yang dilakukan oleh pasukan Inggris, pemuda-pemuda membalas di tengah-tengah keributan dan kekacauan itu, para anggota kontak biru mencari perlindungan sendiri-sendiri. Mallaby menjadi sasaran para pemuda dia ditusuk dengan bayonet dan bambu runcing pengawal-pengawal melarikan diri dan Mallaby terbunuh.

Dengan terbunuhnya Brigadir Mallaby pihak Inggris menuntut bertanggungjawaban pada tanggal 31 Oktober 1945 Jenderal Christison Panglima AFNEI memperingatkan kepada rakyat Surabaya agar mereka menyerah apabila tidak mereka akan dihancurkan.

Kontak Biro Indonesia mengumumkan bahwa kematian Mallaby adalah akibat kecelakaan tidak dapat dipastikan Apakah akibat tembakan rakyat atau tembakan dari tentaranya sendiri.

Sesudah kematian Mallaby pihak Inggris mendatangkan pasukan baru di bawah pimpinan Mayor Jenderal E. C Mansergh, Kemudian pada tanggal 7 November di Banser menulis surat kepada Gubernur Suryo berisi tuduhan bahwa Gubernur tidak menguasai keadaan, seluruh kota telah dikuasai oleh para ekstremis, mereka menghalang-halang tugas Inggris, akhirnya ia mengancam akan menduduki Kota Surabaya untuk melucuti korban yang tidak mengenal tertib hukum itu ia juga mengambil Gubernur Suryo untuk menghadap.

Dalam surat jawaban tanggal 9 November 1945 Gubernur Surya membantah semua tuduhannya, ia mengutus residen Sudirman dan Ruslan abdulgani untuk menyampaikan suratnya, kemudian utusan itu pihak Inggris menyampaikan dua surat satu diantaranya berisi ultimatum kepada bangsa Indonesia di Surabaya. Ultimatum itu pada tanggal 9 November 1945 isi dan maknanya merupakan penghinaan terhadap martabat dan harga diri bangsa

Indonesia isi pokoknya adalah tuntutan agar semua pemimpin Indonesia , pemimpin pemuda, dan kepala Polisi serta kepala pemerintahan harus melapor pada tempat dan waktu yang ditentukan dengan menetapkan tangan mereka di atas kepala kemudian menandatangani dokumen yang disediakan sebagai tanda menyerah tanpa syarat.

Pemuda-pemuda bersenjata diharuskan menyerahkan senjatanya dengan berbaris serta membawa Bendera putih batas waktu dan tentukan antara pukul 06.00 tanggal 10 November 1945, apabila tidak diindahkan, Inggris akan menggerakkan seluruh kekuatan dari laut dan udara. Kalimat ini ditandatangani oleh Jenderal mansergh untuk menentukan sikap terhadap ultimatum ini.

Para pemimpin di Surabaya mengadakan pertemuan, mereka berusaha menghubungi Presiden Soekarno, dan meminta instruksi mengenai tindakan apa yang akan diambil menerima atau menolak ultimatum, namun mereka hanya berhasil mengadakan hubungan dengan menteri luar negeri Ahmad Soebardjo, menteri luar negeri menyerahkan kata putus kepada rakyat Surabaya secara resmi pukul 22.00, gubernur melalui radio menyatakan menolak ultimatum Inggris.

Sementara itu para pemuda yang sudah siap siaga mendapat pertahanan negara, kemudian pertahanan kota Sungkono pada tanggal 19 November pukul 17.00 mengundang semua unsur kekuatan rakyat yang terdiri dari komandan TKR, BRI, BPR RI, Tentara Pelajar polisi istimewa PBI, PTKR dan TKR laut untuk berkumpul di markas pringgolan 4 Sungkono menyatakan bahwa siapa yang ingin meninggalkan kota dipersilahkan. Ternyata semuanya merdeka untuk mempertahankan Surabaya mereka masing-masing membubuhkan tanda tangan pada acara kertas sebagai tanda setuju dan diteruskan dengan ikrar bersama Sungkono dipilih sebagai komandan pertahanan.

Kota Surabaya dibagi ke dalam tiga sektor pertahanan, garis pertahanan dibentuk dari Jalan Jakarta tetapi penempatan pasukannya agar mundur ke belakang kekembangan Kapasan dan Kedung Cowek garis kedua di sekitar viaduk garis ketiga di daerah Darmo.

Pembagian tiga sektor meliputi sektor barat sektor Tengah dan sektor timur, sektor Barat dipimpin oleh koenkiyat. Sektor tengah oleh kreko dan marhadi sedangkan sektor Timur oleh Kadim prawirodihardjo.

Sementara itulah dia pemberontakan yang dipimpin oleh Bung Karno membakar semangat juang rakyat, siaran ini dipancarkan dari Jalan Mawar Nomor 4, sesudah batas waktu ultimatum habis karena semakin eksplosif kontak senjata pertama terjadi di Perak yang berlangsung sampai pukul 18.00 Inggris berhasil menguasai Garis pertama dari pertahanan pihak Indonesia, gerakan pasukan Inggris disertai dengan pengeboman yang ditujukan pada

sasaran yang diperkirakan menjadi tempat pemuatan Pemuda Surabaya yang digempur oleh Inggris itu berhasil dipertahankan oleh para pemuda hampir 3 minggu lamanya sektor dan sektor dipertahankan secara gigih, walaupun pihak Inggris mempergunakan senjata-senjata modern dan Barat pertempuran terakhir terjadi di Gunung Sahari pada 28 November 1945 tetapi berlawanan secara sporadis masih dilakukan setelah itu markas pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa lebanowaras yang terkenal dengan nama markas kali.

BAB 17

PERTEMPURAN AMBARAWA

Pertempuran di Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 November dan berakhir pada 15 Desember 1945. Ambarawa adalah kota yang terletak antara Semarang, Magelang dan Semarang, Solo. Latar belakang peristiwa ini dimulai dari insiden yang terjadi di Magelang. Brigade Artilleri dari divisi India ke-23 yang mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigadir Battle oleh pihak RI diperkenankan untuk mengurus perwujudan pasukan Jepang dan evakuasi 1900 Inter Milan sekutu yang berada di kampung Banyu Biru Ambarawa dan Magelang.

Ternyata mereka diboncengi oleh orang-orang NICA yang kemudian mempersenjatai para tawanan Jepang itu pada tanggal 22 Oktober 1945 bacaan insiden di Magelang yang berlanjut menjadi pertempuran antara TKR dan tentara Inggris insiden ini berhenti setelah kedatangan presiden Soekarno dan mereka hadir Battle di Magelang pada tanggal 2 November 1945 mereka mengadakan perundingan atau melakukan gencatan senjata Dan tercapai kata sepakat yang diturunkan ke dalam 12 pasal antara lain:

1. Pihak Inggris akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi APWI.
2. Jalan Raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan Inggris
3. Inggris tidak akan mengakui aktivitas manusia dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya.

Ternyata pihak Inggris ingkar janji, kesempatan dan kelemahan dari pasal-pasal bertujuan itu dipergunakan Inggris untuk menambah jumlah serdadu yang berada di Magelang.

Sementara itu pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan pasukan Inggris. Pasukan Inggris yang berada di Magelang pada tanggal 21 November 1945 ditarik ke Ambarawa dan dilindungi oleh pesawat udara, pertempuran berkobar di dalam kota pada tanggal 22 November 1945.

Pasukan Inggris melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa, pasukan TKR bersama pasukan pemuda yang berasal dari Boyolali Salatiga dan Kartasura bertahan di kuburan Belanda sehingga membentuk garis pertahanan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa dari arah Magelang.

Pasukan TKR terdiri dari divisi 5 atau Purwokerto di bawah pimpinan Imam androngi pada tanggal 21 November 1945 melakukan serangan Fajar dengan tujuan memukul pasukan Inggris yang berkedudukan di desa pingit, pasukan Imam berhasil menduduki pingit dan

merebut desa-desa sekitarnya, kemudian pasukan ini meneruskan gerakan pengajarannya. Sementara itu kekuatan di Ambarawa bertambah dengan datangnya 3 Batalyon yang berasal dari Yogyakarta yaitu Batalyon sebelum divisi 10 di bawah pimpinan Mayor Soeharto 48 di bawah pimpinan Mayor sarjana dan Batalyon Sugeng sehingga kedudukan bangsa menjadi terkepung.

Sekalipun telah tergabung Inggris mencoba mengatakan gabungan itu mereka mengadakan gerakan melambung dan mengancam kedudukan pasukan TKR dari belakang dengan menggunakan pentingnya sehingga kedudukan TKR terancam. Kota Berawa dihujani dengan tembakan meriam, untuk mencegah jatuhnya korban pasukan TKR diperintahkan oleh komandananya masing-masing untuk mundur ke bedono.

Datangnya bala bantuan dari resimen 2 di bawah pimpinan m Sarbini dan Batalyon polisi istimewa di bawah Oni sastroamidjo serta batalion dari Yogyakarta gerakan musuh berhasil ditahan di desa jambu.

Sementara itu di desa jambu para Komandan pasukan mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh kolonel Holland Iskandar. Rapat ini menghasilkan terbentuknya suatu komando yang disebut markas pimpinan pertempuran. berikut ini kemudian ditempatkan di Magelang setelah itu Medan Ambarawa dibagi atas 4 sektor yaitu sektor Utara, sektor Selatan, sektor Timur dan sektor Barat.

Adapun kekuatan pasukan ikut bertempuran di Ambarawa ini yang berjumlah 19 batang MTKR dan beberapa batalion badan-badan perjuangan yang bertempur secara berganti-ganti pada tanggal 26 November 1945 berasal dari Purwokerto. Letnan Kolonel Isdiman gugur, Kolonel Sudirman Panglima divisi di Purwakarta mengambil alih pimpinan pasukan situasi pertempuran berubah menjadi semakin menguntungkan pasukan TKR musuh telah terjepit dan desa Banyu Biru merupakan garis pertahanan yang terdapat pada tanggal 5 Desember 1945.

Setelah mempelajari situasi pertempuran Kolonel Sudirman pada tanggal 11 Desember 1945 mengambil prakarsa untuk mengumpulkan para komandan, sektor mereka melaporkan situasi pada sektor masing-masing akhirnya Kolonel Sudirman menyimpulkan bahwa bangsa telah terjepit dan perlu segera dilancarkan pukulan terakhir rencana pelaksanaannya disusun sebagai berikut:

1. Serangan peledakan dilakukan serentak dari sama sektor
2. Tiap-tiap komandan sektor memimpin serangan
3. Pasukan-pasukan badan-badan perjuangan Laskar disiapkan sebagai tenaga cadangan
4. Serangan akan dimulai pukul 12 Desember pukul 04.30

Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari pasukan-pasukan TKR bergerak maju menuju sasaran masing-masing dalam waktu satu setengah jam mereka berhasil mengepung kedudukan musuh dalam kota, diperkirakan pertanian musuk yang terkuat terdapat di benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa kota Ambarawa di kebun selama 4 hari 4 malam, pasukan Inggris yang berhasil kedudukannya terjamin berusaha keras untuk melakukan pemutusan pertempuran pada tanggal 15 Desember 1945 mereka meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang

Pertempuran di Ambarawa ini mempunyai arti penting dan diakui oleh pihak Inggris bahwa pasukan Indonesia sudah dilakukan sekalipun dengan gerakan seluruh kekuatannya atau kota Ambarawa sangat strategis apabila masuk-masa yang berawal 3 Kota utama Jawa Tengah akan terancam sekaligus yaitu Surakarta Magelang dan terutama Yogyakarta sebagai tempat kedudukan markas tertinggi TKR.

BAB 18

PERTEMPURAN MEDAN AREA

Pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Kelly mulai mendarat di Sumatera Utara, pada tanggal 9 Oktober 1945 kekuatan mereka adalah salah satu Brigade yaitu Brigade 4 dari divisi India ke-26 ikut serta membantu mereka adalah orang-orang NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Pemerintah RI Sumatera Utara memperkenankan mereka menempati beberapa wakil di kota Medan seperti Hotel De boer Grand Hotel dan Hotel Astoria karena menghormati tugas mereka sebagian dari mereka kemudian ditempatkan di Binja,i Tanjung Morawa dan beberapa tempat lainnya.

Dengan memasang tenda-tenda lapangan sehari setelah mendarat tim dari rapi mendatangi kampung kampung tawanan di Pulau Brayan saintilis Rantau Prapat Pematangsiantar dan Berastagi untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur M. Hasan ternyata dari kelompok mereka Langsung dibantu menjadi medan magnet KNIL, dengan kekuatan ini tampaknya perubahan sikap dari para bekas tawanan tersebut mereka bersikap sombong karena merasa sebagai pemenang dalam perang. Sikap ini menimbulkan berbagai insiden yang dilakukan secara spontan oleh para pemuda dari hotel di Jalan Bali Medan pada tanggal 13 Oktober 1945 awal. Dari insiden ini adalah seorang penghuni Hotel merampus dan menginjak-injak Tanah Merah Putih yang dipakai oleh seorang yang ditemuinya akibatnya hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda dalam satu korban 96 orang luka-luka ada bukti sebagian besar adalah orang-orang nica.

Insiden ini kemudian menjalar di beberapa kota lainnya seperti Pematang Siantar dan Berastagi sementara itu pada tanggal 10 Oktober 1945 terbentuk TKR Sumatera Timur yang dipimpin oleh Ahmad Tahir selanjutnya diadakan pemanggilan terhadap para bekas giyugun dan heiho seluruh Sumatera Timur.

Panggilan ini mendapat hambatan yang luar biasa dari mereka. Di samping TKR di Sumatera Timur terbentuk pula badan-badan perjuangan badan-badan perjuangan ini sejak tanggal 15 Oktober berfungsi menjadi Pemuda Republik Indonesia Sumatera Timur dan sebulan kemudian berubah menjadi pesindo setelah terbentuknya partai-partai politik pada bulan November 1945 terbentuklah Laskar Laskar partai. PNI memiliki nasional pelopor Indonesia atau napindo PKI mempunyai baris merah Masyumi memiliki hizbulah dan parkindo membentuk Pemuda perkindo.

Sebagaimana dikatakan selain di Indonesia Inggris memulai isinya untuk memperlemah kekuatan republik dengan cara memberikan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjatanya kepada sekutu hal ini juga dilakukan oleh Brigadir Kelly terhadap Pemuda Medan pada tanggal 18 Oktober 1945.

Sejak saat itu Tentara Indonesia merasa memperoleh dukungan dari pihak Inggris. demikian pula pasukan Serikat pun melakukan aksi-aksi terornya sehingga timbul rasa bermusuhan di kalangan Pemuda patroli-patroli Inggris ke luar kota tidak pernah merasa aman, keselamatan mereka tidak dijamin oleh pemerintah RI meningkatnya korban demi Inggris menyebabkan mereka memperkuat kedudukannya dan menentukan sendiri secara sepihak batas kekuasaannya pada tanggal 1 Desember 1945 pihak Amerika memasang papan-papan Tuliskan Fixed biundaries medan area di berbagai sudut pinggiran kota Medan.

Sejak saat inilah medan daerah yang menjadi terkenal tindakan pihak Inggris ini merupakan tantangan bagi para pemuda pihak Inggris bersama dengan Indonesia melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik yang berada di Kota Medan, para pemuda membalas aksi tersebut sehingga daerah tersebut menjadi tidak aman, setiap usaha pengusiran dibalas dengan pengepungan bahkan seringkali terjadi tembak menembak.

Pada tanggal 10 Desember 1945 pasukan Inggris NICA berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di trepes ,berhasil digagalkan. Selanjutnya seorang Perwira Inggris diculik oleh pemuda, beberapa truk berhasil dihancurkan dengan peristiwa ini brigadir kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka barangsiapa yang nyata nyata melanggar akan ditembak mati.

Daerah yang ditentukan adalah kota Medan dan delapan setengah kilometer dari Batas Kota Medan dan Belawan perlawanan terus memuncak Pada bulan April 1946 tentara Inggris mulai bersama Desa pemerintah yang keluar kota Medan, gubernur markas divisi TKR Walikota RI pindah ke Kota Pematangsiantar dengan demikian Inggris berhasil menguasai kota Medan tanpa adanya 1 komando mustahil dapat melakukan serangan yang efektif terhadap kedudukan kedudukan pasukan Inggris.

Pada tanggal 9 Agustus 1946 di Tebing Tinggi diadakan suatu pertemuan antara komandan Komandan pasukan yang berjuang di Medan Area pertemuan mereka memutuskan dibentuknya 1,2 bernama komando resimen Laskar Rakyat Medan area yang dibagi atas 4 sektor dan tiap sektor dibagi atas 4 subsektor setiap sektor berkekuatan 1 Batalyon markas Komando berkedudukan di Saudi mengerti atau trepes di bawah kemudian adalah kemudian mereka meneruskan perjuangan di bidang area.

BAB 19

PERTEMPURAN PADANG DAN SEKITARNYA

Pasukan Inggris Lincoln fifth regiment pimpinan Brigadir huschinson mendarat di Pelabuhan Teluk Bayur pada tanggal 13 Oktober 1945. Dua hari kemudian mengadakan pertemuan dengan pemerintah RI Sumatera Barat. Dalam pertemuan itu ia mengatakan bahwa pasukannya hanya bertugas menjalankan tugas-tugas sekutu tidak akan mencampuri urusan pemerintahan dan akan berkonsultasi dengan pemerintah RI sebelum melakukan suatu tindakan.

Dalam pertemuan kedua ia minta kesediaan pemerintah Sumatera Barat meminjamkan kantor residen yang akan digunakan sebagai kantornya pihak Indonesia menafsirkan permintaan itu sebagai pengakuan Inggris terhadap kekuasaan de facto pemerintah RI.

Kesepakatan yang telah dicapai dalam pertemuan tersebut tidak seluruhnya ditaati Inggris mereka menggelar rumah-rumah penduduk untuk mencari senjata, mengobrak-abrik kantor balai penerangan pemuda Indonesia yang mereka curigai sebagai pusat kegiatan Pemuda. Orang-orang Belanda yang baru saja dibebaskan dari kampung tahanan mereka persenjatai, dengan perlindungan Inggris maka tawanan ini menduduki secara paksa gedung sekolah ,teknik mesin pengharu bahkan memukuli kembali Kepala Sekolahnya.

Tindakan orang-orang Belanda ini dibalas oleh TKR dan para pemuda dengan melakukan serangan pada tanggal 17 November 1945, sebagai balasan terhadap serangan itu Inggris menghilang dari rumah-rumah di sekitar Simpang harum bahkan ada yang dibakar, beberapa orang pemuda mereka tangkap dan dimasukkan ke penjara Inggris juga memberlakukan jam malam dari pukul 18.00 sore sampai pukul 16.00 pagi.

Insiden yang berdampak luas terjadi pada tanggal 5 Desember 1945 seorang Perwira Inggris Mayor Anderson dan Seorang anggota Palang Merah sekutu Miss Aligham ditemukan terbunuh dekat pemandian sungai barami kira-kira 11 KM di selaput dan kota Padang, Inggris melakukan pembalasan yang tidak kepalang tangguh membakar 3 kampung dekat terjadinya peristiwa itu menyerbu pos TKR yang menyebabkan berapa orang TKR tewas dan membunuh 12 orang penduduk.

Pertempuran yang cukup besar antara pasukan Inggris dan pasukan Indonesia terjadi Tanggal 21 Februari 1946 di Rimbo kaluang pasukan TNI di bawah pimpinan Ahmad Husein dengan bantuan naskah berhasil menganjurkan beberapa pos pertanian Inggris membongkar

gudang senjata sesudah itu terjadi lagi berapa serangan malam sehingga Inggris menarik pasukannya dari Rimbo kaluang serangan ini dilancarkan dari Kuranji sehingga Inggris menyebut pasukan ini dengan istilah harimau kuranji.

Pada tanggal 14 Juni 1946 pasukan Inggris yang menyerang batu bisuak untuk membebaskan kaki tangan mereka yang ditangkap oleh pasukan TNI pihak RI yang sudah mengetahui akan adanya serangan tersebut mengatur siasat dengan membiarkan pasukan Inggris memasuki batu-batuhan, serangan dilancarkan pada waktu pasukan itu kembali ke kota Padang dalam pertempuran ini 13 anggota dari Bogor dan pendorong mengalami luka-luka satu regu tentara India masih melakukan desersii dengan bergabung dengan Laskar Hizbulah.

Daerah-daerah sekitar Simpang Haru merupakan Medan yang cukup panas selama 3 hari dari tanggal 7 sampai 9 Juli 1946 pasukan TNI dan Laskar melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di tempat ini pada mulanya pasukan Inggris hanya melancarkan serangan malam dan paginya mereka mundur ke basis mereka pada hari ketiga terjadi pertempuran jarak dekat akhirnya Simpang Harun ditinggalkan Inggris dengan korban beberapa sebenarnya tewas dan sejumlah senjata ringan jatuh ke tangan TRI.

Malam tanggal 28 Oktober 1945 bertepatan dengan malam takbiran menjelang Idul Fitri TNI dan Laskar melancarkan serangan besar-besaran serangan ini langsung diamati oleh Komandan divisi 3 atau banteng kolonial Dahlan. Pertempuran berkobar dalam kota dari pukul 00.00 sampai pukul 05.00 menjelang pagi pasukan TNI menarik diri ke Pangkalan masing-masing Pagi hari ketika penduduk Padang sedang melakukan salat Idul Fitri yang harus menyiapkan pasukannya namun rencana tersebut untuk melancarkan serangan dibatalkan.

Tugas Inggris atau melucuti pasukan Jepang membebaskan pada tawanan dan memulangkan orang Jepang ke negeri mereka sudah selesai pada bulan Juni 1946 namun mereka tetap bertahan di Padang menunggu kesiapan pasukan Belanda untuk mengambil alih kedudukan mereka pasukan Belanda di bawah pimpinan Kolonel sluyter tiba di bareng pertengahan November 1946. Serah terima antara pasukan Inggris dan pasukan Belanda dilangsungkan tanggal 28 November dan seorangnya pada sekering Inggris meninggalkan Padang Sejak saat itu pasukan RI di sekitar Padang terhadap berlangsung dengan pasukan Belanda sampai terjadinya Agresi Militer pertama Belanda bulan Juli 1947.

BAB 20

PERTEMPURAN BANDUNG ATAU BANDUNG LAUTAN API

Pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945, sejak semula hubungan mereka dengan pemerintah Inggris sudah tegang mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk kecuali TKR dan polisi diserahkan kepada mereka. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kampung-kampung tahanan mulai pula melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan akibatnya benturan senjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari.

Malam tanggal 24 November 1945 TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan tersebut sebagian Utara termasuk hotel homan dan hotel preanger yang mereka gunakan sebagai markas 3 hari kemudian McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung ke daratan Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia termasuk pasukan bersenjata ultimatum ini harus dilaksanakan pada alamat pukul 12.00 tanggal 29 November 1945 dengan Pancasila itu Inggris sebagai Kota Bandung menjadi bagian utara yang berada di bawah kekuasaan mereka dan bagian Selatan di bawah kekuasaan RI.

Ultimatum itu dijawab pasukan Indonesia dengan mendirikan pos-pos Gerilya di berbagai tempat, selama bulan Desember terjadi beberapa kali pertempuran antara lain di Ci Haurgeulis Sukajadi Pasirkaliki dan viaduk. Inggris berusaha merebut Balai Besar kereta api tetapi gagal ketika bersama membebaskan interniran Belanda di Ciater mereka terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Indonesia di Lengkong Besar dalam bulan bulan pertama tahun 1946 pertempuran berkobar secara sporadis.

Selama berlangsungnya pertempuran banyak saudara di India yang merupakan bagian dari pasukan Inggris melakukan dispersi dan bergabung dengan pasukan Indonesia salah satu diantaranya ialah Kapten Mirza dengan pasukannya ketika terjadi pertempuran di jalan Poker atau sekarang Jalan Garuda pada pertengahan Maret 1946 pihak Inggris menghubungi Panglima divisi 3 Jenderal AH Nasution meminta agar pasukan India tersebut diserahkan kepada mereka presiden menolak bukan hanya untuk mengembalikan pasukan India mereka juga untuk mengadakan pertemuan dengan pihak Inggris.

Serangan-serangan sporadis yang dilancarkan pasukan Indonesia dan kegagalan mencari penyelesaian di tingkat daerah menyebabkan Inggris bermain di tingkat atas pada tanggal 23 Maret 1946 mereka menyampaikan ultimatum kepada para dana menteri Syahrir agar selamat lambatnya pukul 24.00 tanggal 24 Maret 1946 pasukan Indonesia sudah harus

meninggalkan Bandung selatan sejauh 10 sampai 11 km dari pusat Kota. Syahrir menugasi Syaripuddin dan Jenderal Mayor didi ke Bandung untuk menyampaikan ultimatum tersebut.

Baik jenderal Mayor Nasution maupun aparat pemerintah menolak ultimatum sebagai tidak mungkin memindahkan ribuan pasukan dalam waktu yang sangat singkat itu mereka menemui channel layar Jendral holton meminta agar batas seperti materi terendah sementara itu yang biasanya pengumuman bahwa sebelum pukul 24.00 tanggal 24 Maret 1946 dan 2 selatan sudah harus dikosongkan oleh pasukan Indonesia.

Sore hari tanggal 23 Maret Nasution ikut bersama Syarifudin dan didi ke Jakarta untuk menemui Perdana Menteri Syahrir dengan alasan untuk menyelamatkan TRI dari kehancuran, Syahrir mendesak nasution agar bisa dipenuhi, ia berpendapat bahwa TRI Belum mampu menghadapi pasukan inggris. Nasuton kembali esok harinya dan meminta inggris agar menunda dan memperpanjang waktu batas ultimatum tersebut.

Dalam pertempuran yang diadakan Nasution dengan para komandan RI para pemimpin naskah dan antara pemerintah dicapai kesepakatan untuk membumihanguskan Bandung sebelum kota itu ditinggalkan, menurut rencana bumi hangus akan dilakukan pukul 06.00 sampai 24 Maret ternyata rencana dilakukan lebih awal yakni pukul 21.00. pertama yang dibakar ialah Bank Rakyat dengan pembakaran di beberapa tempat seperti Banceuy, cudadas, braga dan tagellaga. Anggota TNI membakar sendiri asrama-asrama mereka malam tanggal 24 Maret 1946 bukan hanya pasukan bersenjata melainkan juga di Merak yang meninggalkan kota Bandung ketika kota itu terbakar.

BAB 21

KARAKTERISTIK NEGARA INDONESIA

Arafat (2018: 32-39), menjelaskan karakteristik negara Indonesia sebagai berikut:

1. Bendera Negara Sang Merah Putih

Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam undang-undang nomor 24 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945 pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera sang merah putih dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka sang saka merah putih. Bendera pusaka sang saka merah putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.

2. Bahasa Negara Indoenesia

Ketentuan bahasa negara diatur dalam undang-undang dasar Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan setelah itu diangkat dan di diikrarkan sebagai bahasa persatuan Pada kongres pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia.

3. Lambang Negara Garuda Pancasila dan Simbol-simbol Pancasila

a. Lambang negara garuda pancasila

Pada tanggal 13 Juli 1945 dalam rapat panitia perancangan undang-undang Dasar 1945 salah seorang anggota panitia bernama Parada Harahap mengusulkan tentang lambang negara. Tanggal 16 November 1945 baru dibentuk panitia Indonesia Raya. Panitia ini bertugas menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara. Panitia Indonesia Raya diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dengan sekretaris umum Muhammad Yamin.

Adapun ciri-ciri lambang negara Garuda Pancasila adalah sebagai berikut:

1) Warna dan jumlah helai bulu

a) Warna

(1) Seluruh burung garuda, Bintang, kapas, padi dan rantai berwarna kuning emas

(2) Ruangan perisai di tengah-tengah berwarna merah putih (kiri atas dan kanan bawah) berwarna merah, (kanan atas dan kiri bawah) berwarna putih.

(3) Dasar bintang yang berbentuk perisai berwarna merah

(4) Kepala banteng berwarna hitam

(5) Pohon beringin berwarna hijau

(6) Pita berwarna putih

(7) Huruf berwarna hitam

b) Jumlah helai bulu

(1) Pada tiap sayap berjumlah 17 helai

(2) Pada ekor berjumlah 8 helai

(3) Kecil di bawah perisai berjumlah 10 helai

(4) Kecil di leher berjumlah 45 helai

2) Arti dan makna lambang negara

Menurut Kansil dan Chistine Adapun arti dan makna simbolik dari lambang negara ialah Garuda ialah burung yang dinamakan juga sang Rajawali seperti yang disebutkan dalam cerita Ramayana dan Bharatayuda:

a) Burung tersebut merupakan lambang kekuasaan dan kekuatan

b) Sayap yang masing-masing terdiri dari 17 hari berarti tanggal 17 ekor burung yang terdiri dari 8 helai berarti bulan ke-8 atau bulan Agustus

c) Jumlah bulu kecil di bawah perisai sebanyak 19 helai dan jumlah bulu kecil di bawah leher sebanyak 45 helai berarti tahun 1945.

Hal ini mengingatkan kita pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikumandangkan oleh di t tanggal soekarno-hatta di Jalan Pegangsaan Timur atau sekarang Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta

d) Perisai

(1) Perisai atau tameng yang berbentuk jantung yang digantungkan dengan rantai emas pada leher burung garuda adalah lambang perlindungan

(2) Garis melintang di tengah-tengah perisai melukiskan khatulistiwa hal ini menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia laksana Ratna Mutu Manikam bertaburan di khatulistiwa

e) Ruangan pada perisai

Lima buah ruangan pada perisai memuat simbol-simbol dasar negara kesatuan Republik Indonesia yaitu

- (1)Nur Cahaya berbentuk bintang yang bersudut lima melambangkan dasar ketuhanan yang maha esa atau theokrasi
- (2)Rantai bermata bulat atau lambang pria dan persegi atau lambang wanita saling berkaitan mata rantai persatuan melambangkan dasar kemerdekaan yang adil dan beradab atau perikemanusiaan atau humanisme
- (3)Pohon beringin melambangkan persatuan Indonesia atau kebangsaan atau nasionalisme
- (4)Kepala banteng adalah lambang tenaga rakyat dan menunjukkan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan atau demokrasi Pancasila
- (5)Kapas dan padi atau sandang pangan melambangkan tujuan kemakmuran bersama yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sosialisme.

3) Bhineka Tunggal Ika

Di atas pita yang dicengkeram oleh kedua kaki burung garuda tercantum dalam huruf latin sebuah semboyan Dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi bhineka tunggal ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kalimat ini pernah dipakai oleh seorang pejuang Indonesia yang terkenal Mpu Tantular dalam arti di antara pusparagam adalah kesatuan.

b. Simbol-simbol Pancasila

Dalam pasal 36 undang-undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan empat kali yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002 di cantumkan kalimat lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Adapun makna yang terkandung dalam simbol simbol sila Pancasila menurut Erwin dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bintang yang memiliki sudut lima melambangkan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Bintang melambangkan sebuah cahaya seperti cahaya yang dipancarkan oleh tuhan kepada setiap manusia. Lambang bintang juga diartikan sebagai sebuah cahaya untuk menerangi dasar negara yang lima atau Pembukaan undang-undang 45 alinea 4.
- 2) Rantai melambangkan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan

lingkaran yang saling berkaitan yang membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan bahwa setiap manusia laki-laki dan perempuan membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Maka simbol kedua sila Pancasila adalah manusia yang berkemanusiaan dalam filosofi Pancasila adalah manusia Indonesia yang menerapkan nilai kemanusiaan ke dalam bentuk sikap tindakan yang mengakui persamaan derajat dengan mengembangkan sikap saling mencintai bersikap tenggang rasa tidak semena-mena dengan orang lain.

- 3) Pohon beringin melambangkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawah nya. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Makna sila kedua Pancasila adalah pusat Indonesia merupakan nilai yang mengajarkan untuk selaras dengan hakikat satunya Indonesia. Hakikat satunya Indonesia merupakan prinsip atau kehendak untuk tetap utuh tidak bisa dipecah belah dan dengan semangat Kesatuan Pancasila menghendaki agar Indonesia dapat Mandiri dan bersaing dalam hal yang positif dengan bangsa-bangsa lain. Nilai kesatuan ini dapat saja dipertahankan bila ada semangat yang bangga sebagai bangsa Indonesia.
- 4) Kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan nilai yang memiliki prinsip untuk selaras dengan hakikat rakyat. Hakikat rakyat merupakan keseluruhan dalam kebersamaan.
- 5) Padi dan kapas melambangkan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran.

4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu

kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan.

A. Proses Tumbuhnya Negara

Pada hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial memiliki kemauan untuk hidup bersama dengan manusia-manusia lain terutama dengan manusia-manusia yang sama alat-alat hidupnya sehingga dapat memunculkan kolektivitas dengan kemauan-kemauan yang kolektif. Dari kemauan-kema yang kolektif tersebut maka mudah sekali mengadakan kelompok-kelompok ataupun suku-suku.

Atas dasar persamaan Apakah dalam bentuk persamaan asal bahasa sejarah cita-cita maka suku bangsa ataupun beberapa suku bangsa pada akhirnya akan mengalami kesadaran yakni dalam kesadaran merasa diri sebagai satu bangsa sebagaimana yang dinyatakan oleh Ernest Renan bahwa bangsa adalah sebagai kehendak untuk bersatu.

Bangsa adalah satu persamaan satu persatuan karakter atau watak yang tumbuh lahir terjadi karena persatuan pengalaman. Oto membantah mutlak perlunya persatuan bahasa kesamaan agama kesamaan warna kulit kesamaan keturunan meskipun agamanya warna kulitnya ataupun bahasa yang berbeda-beda asalkan dalam bentuk persekutuan manusia yang mengalami nasib yang sama selama berpuluhan-puluhan tahun bahkan beratus-ratus Tahun Lamanya maka persamaan Nasib itu akan menjelma menjadi suatu watak yang sama. Dari persamaan mata inilah yang nantinya akan menjelma menjadi suatu bangsa.

Pada perkembangan peradaban berikutnya maka suatu bangsa akan memerlukan suatu bentuk pemerintahan untuk mencapai dan memelihara ketertiban masyarakat dalam suatu bangsa tersebut. Sebagaimana kita pahami bahwa apabila telah dipenuhinya unsur pemerintahan pada suatu bangsa maka sudah dekatlah bangsa itu menjelma menjadi suatu negara setelah dipenuhinya unsur-unsur negara secara de facto dan de jure bersamaan pula dengan pernyataan atau proklamasi bangsa tersebut maka jadilah bangsa itu sebagai bangsa yang bernegara. Jadi pada hakikatnya genera negara merupakan organisasi tertinggi dalam suatu bangsa yang menjaga kedaulatan bangsa dan mengatur ketertiban umum.

B. Teori-Teori Terbentuknya Negara

1. Teori ketuhanan

Teori ini beranggapan bahwa negara diciptakan Tuhan penciptaan negara oleh Tuhan adanya secara langsung dan adat yang secara tidak langsung untuk ciri negara yang diciptakan oleh Tuhan secara langsung yaitu penguasa berkuasa karena menerima wahyu dari Tuhan

sedangkan ciri Tuhan menciptakan negara tidak secara langsung yaitu penguasaan berkuasa karena kodrat Tuhan.

Menurut Thomas aquinas negara itu timbul dari pergaulan antar manusia yang ditentukan oleh hukum dan tata alam tetapi hukum tata alam ini pun terjadi dari kehendak Tuhan dan menurut hukum Tuhan. Secara umum dalam pandangan teori ketuhanan negara adalah ciptaan Tuhan dan raja adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan sehingga pertanggungjawaban pemimpin negara ditunjukkan secara langsung pada Tuhan.

2. Teori kekuatan

Intisari dari teori dirumuskan bahwa Siapa yang berkemampuan memiliki kekuatan maka mereka akan mendapat kekuasaan dan memegang tumpuk pemerintah. Kekuatan itu meliputi kekuatan jasmani kekuatan rohani atau kekuatan materi maupun kekuatan politik. Inti ajaran teori kekuatan mengenai terbentuknya negara adalah bahwa suatu negara akan terbentuk sebagai akibat adanya dominasi atau penaklukan dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.

Menurut teori evolusi Charles Darwin bahwa kehidupan semesta alam ini diliputi oleh serba perjuangan untuk mempertahankan hidup masing-masing. Yang kuat akan menindas yang lemah maka semuanya berusaha untuk menjadi kuat Dan unggul dalam perjuangan. Setiap perjuangan harus senantiasa berusaha menambah kekuatan dan kemampuannya agar tetap berkuasa. Dalam keadaan itulah terjadi evolusi terjadi proses dan pertumbuhan yang terus-menerus yang dibawakan oleh penyesuaian diri pada kondisi perjuangan hidup.

Semua Imperium yang pernah berjaya dalam sejarah peradaban negara dapat dikatakan berdiri dengan dasar teori kekuatan ini sebagaimana yang diterapkan oleh pemerintahan Napoleon atau filler Benito Mussolini dan Lenin. Menurut Franz seperti yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul deer staat bahwa negara adalah suatu susunan masyarakat yang oleh golongan yang menang dipaksakan kepada golongan yang ditaklukkan dengan maksud untuk mengatur kekuasaan golongan yang satu atas golongan yang lain dan melindungi terhadap ancaman pihak lain. Tujuan dari semua itu adalah dalam rangka pemerasan ekonomi dari golongan yang menang terhadap golongan yang kalah.

3. Teori perjanjian masyarakat

a. Thomas Hobbes

Dalam pandangan Thomas Hobbes pada teori perjanjian masyarakat diungkap bahwa pada mulanya kehidupan antar manusia itu sama seperti kehidupan Serigala yang di analogikan dengan sebutan homo homini Lupus yang artinya bahwa manusia itu memangsa manusia yang lainnya atau manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain.

Perkembangan berikutnya manajemen bisnis saling berinteraksi dan membuat kelompok-kelompok. Kemudian terjadilah situasi Anarki lain dalam bentuk perang antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain atau disebut oleh Hobbes dengan sebutan belum omnium contra omnes yang artinya perang semua melawan semua.

Selanjutnya lama-kelamaan manusia manusia dalam kelompok-kelompok itu tidak tahan juga dengan keadaan Anarki tersebut situasi energi ini telah sangat mengancam keadaan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia menurut Hobbes Pada tahapan ini manusia telah mengalami situasi kesadaran atau disebut dengan istilah resultante.

Setelah manusia mengalami situasi resultan T atau kesadaran maka manusia-manusia yang bergabung dalam kelompok-kelompok tersebut mengadakan perjanjian dengan kelompok yang paling kuat atau penguasa untuk mengadakan yang disebut oleh hobbi sebagai pembentuk negara namun sebelum membentuk negara itu diadakan individu-individu dalam kelompok-kelompok yang lama itu telah menyerahkan hak-hak mereka sepenuhnya kepada para penguasa yang tergabung dalam kelompok yang kuat tersebut.

Karena hak individu dalam masyarakat itu telah diserahkan sepenuhnya kepada para penguasa dalam negara tersebut maka terbentuk negara kekuasaan dan pada akhirnya muncullah situasi dalam negara yang disebut dengan tiada kekuasaan yang dapat menandingi kekuasaan negara.

b. John locke

Berbeda dengan home base yang mengawali teori perjanjian masyarakatnya dari situasi antar manusia yang Anarki ia dalam teori perjanjian masyarakatnya mengawali teorinya berangkat dari keadaan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial sebagai makhluk sosial kehidupan antar manusia diatur melalui hukum akal kemudian interaksi hukum akal antar manusia dalam lingkungan sosial tersebut pada akhirnya akan sampai pada titik yang disebut dengan keadaan ideal.

Ada selanjutnya jika interaksi antara individu-individu dalam suatu masyarakat sudah ideal maka muncullah suatu kesepakatan antara individu-individu dalam masyarakat tersebut dalam bentuk perjanjian masyarakat yang disebut olehnya sebagai pactum onioness

Adapun isinya yaitu pertama tentang Perjanjian pembentukan negara dan kedua perjanjian mengenai perlindungan hak asasi manusia oleh karena kedua klausul dalam Prima masyarakat itu bersifat konstitusional maka yang terbentuk adalah negara konstitusional.

c. Jean Jacques Rousseau

Dalam teori perjanjian masyarakat yang dirumuskan olehnya pada hakikatnya manusia itu dilahirkan bebas dan sederajat oleh karena kebebasan dan kesederajatan manusia Maka

manusia sebagai individu-individu sangat berpeluang untuk mengadakan kesepakatan yang disebut sebagai perjanjian masyarakat.

Menurutnya apabila individu-individu telah mengadakan perjanjian masyarakat maka timbulnya keadaan bernegara dan jika suatu sudah keadaan bernegara maka terbentuklah negara sebagai badan kooperatif kolektif yang fungsinya untuk memberikan perlindungan terhadap kehendak atau kepentingan umum dan sekaligus juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan khusus.

4. Teori integralistik

Teori ini diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller dan Hegel, negara terbentuk oleh karena adanya susunan masyarakat yang begitu berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis dimana negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat atau yang paling besar tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat akan tetapi Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan.

C. Proses Bangsa Indonesia Yang Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut Soekarno bangsa adalah satu persamaan satu persatuan karakter watak yang lahir tumbuh karena persatuan pengalaman. Soekarno juga menambahkan bahwa apa yang disebutnya sebagai tanah air adalah sebagai tempat di mana orang-orang memiliki kehendak bersatu dan merasa senasib dan sepenanggungan berkumpul sementara itu untuk konsep bangsa Indonesia Soekarno menegaskannya sebagai berikut:

Pendek kata bahasa Indonesia bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau Jogja Sunda dan Bugis tetapi bangsa Indonesia adalah seluruh manusia menurut geopolitik yang telah ditentukan Allah tinggal di satu kesatuan semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian dan seluruhnya.

Konsepsi bangsa Indonesia terbentuk oleh pengalaman atau empiris dari peran dari segenap suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara. Belajar dari pengalaman perlawanan yang sifatnya kesukuan tidak membawa hasil malahan membuat pemerintah kolonial Belanda bertambah kerja maka konsep perlawanan ditempuh melalui wadah pendidikan. Perjuangan melalui pendidikan itu dimulai dengan berdirinya pergerakan nasional Budi Utomo atau 20 Mei 1908 yang kini diperingati sebagai hari kebangkitan nasional.

Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang membangkitkan kesadaran sebagai bangsa kehadirannya itu kemudian menjadi inspirasi tumbuh kembalinya organisasi-

organisasi pergerakan kemerdekaan Pemuda seperti Jong Java Jong Batak Bond Jong sumatranen dan lain-lain. Kemudian organisasi-organisasi pergerakan kemerdekaan Pemuda meleburkan diri dalam satu organisasi yang bersifat kebangsaan dengan nama Perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia atau PPI pada tahun 1922.

Kesadaran sebagai bangsa yang telah diletakkan oleh Budi Utomo itu kemudian dipertegas dalam Kongres Pemuda 2 yang digagas oleh p3i dalam dapat dikatakan bahwa pada Kongres Pemuda 2 ini semua elemen kekuatan bangsa khususnya pemuda dari seluruh penjuru nusantara hadir dan perwakili termasuk beberapa tokoh pemuda Tionghoa. Minggu depan Oktober 1928 di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta pada saat penutupan Kongres Pemuda 2 diumumkan rumusan hasil Kongres yang berupa Sumpah Pemuda yang isinya sebagai berikut.

Puncak dari perkembangan kejiwaan bangsa Indonesia menjelma menjadi satu bentuk negara akhirnya terjadi pada saat pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 menurut Bung Karno Republik Indonesia bukan negara agama tetapi adalah negara nasional di dalam arti meliputi seluruh badannya bangsa Indonesia dengan jiwa sifat corak yang sama dan hidup di atas wilayah yang nyata nyata sebagai satu kesatuan.

D. Unsur-Unsur Negara

Unsur-unsur negara sebagai prasyarat berdirinya suatu negara dapat dikatakan telah menjadi kesepakatan Global saat ini telah ditentukan atas empat unsur dalam hal ini terdiri atas rakyat wilayah pemerintahan dan pengakuan dari negara lain.

Unsur rakyat wilayah dan pemerintahan umumnya diterjemahkan sebagai pemenuhan unsur atau syarat secara kenyataan atau fakta atau di fakta sementara unsur yang berupa Pengakuan dari negara lain dipandang sebagai pembangunan unsur syarat secara hukum atau yuridis atau disebut de jure.

Unsur rakyat dalam unsur yang terutama dari terbentuknya suatu negara dibandingkan dengan tiga unsur lainnya karena Bagaimana akan terbentuk suatu negara Kalau tidak ada rakyat yang akan membentuk hukum negara dan sekaligus akan menjadi objek dari hukum negara tersebut. Rakyat itu sendiri merupakan satu persekutuan hidup manusia yang mempunyai keinginan untuk bersatu dan mempunyai persamaan cita-cita.

Lalu dalam rangka menjamin Aktivitas kehidupan rakyat Indonesia suatu negara harus memiliki wilayah-wilayah yang ditempati oleh rakyat suatu negara harus telah didiami dan dikelola secara berkesinambungan dan memiliki batas-batas yang jelas agar dapat memperoleh legitimasi atau pengakuan sebagai wilayah negara.

Dari penampakannya secara fisik wilayah suatu negara itu merupakan ruang yang meliputi wilayah daratan Wilayah perairan dan wilayah udara serta pada batas-batas termasuk juga wilayah antariksa.

Wilayah daratan adalah seluruh wilayah permukaan tanah yang tampak muncul di atas wilayah perairan.

Wilayah perairan adalah ruang perairan yang berada pada perairan pedalaman laut teritorial zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif suatu negara.

Wilayah udara adalah ruangan udara yang berada di atas permukaan daratan ataupun perairan suatu negara sampai sejauh 110 km dari permukaan daratan atau perairan suatu negara tersebut.

Dan yang terakhir wilayah antariksa adalah ruang kedap udara di atas wilayah udara suatu negara atau 110 km sampai dengan ketinggian 33,761 KM yang diukur dari permukaan wilayah daratan ataupun perairan dari negara yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan ketertiban rakyat dan dalam upaya menyejahterakan kehidupan rakyat suatu negara membutuhkan kekuasaan. Kemudian kekuasaan di dalam negara tersebut memerlukan pemerintahan Adapun pemerintahan itu sendiri merupakan perwakilan negara untuk menjalankan kekuasaan negara untuk mencapai tujuan negara. Menurut Utrecht Jika ditinjau dari pertanggungjawaban kekuasaan maka pemerintahan itu mempunyai tiga pengertian yakni:

Pemerintah dalam pengertian yang luas yaitu yang dimaksud pemerintah di sini adalah keseluruhan badan-badan kenegaraan yang bertugas menjalankan kekuasaan negara termasuk di dalamnya badan yang membuat undang-undang badan yang menjalankan undang-undang dan badan yang bertugas mengadili pelaksanaan undang-undang.

Pemerintah dalam pengertian yang sempit yang dimaksud pemerintah di sini adalah seluruh aparat yang bertugas melaksanakan pemerintahan sehari-hari jadi dalam hal ini adalah keseluruhan anggota eksklusif atau kabinet. Misalnya di Indonesia yang dimaksud anggota eksklusif adalah kabinet presidensial Indonesia seperti presiden wakil presiden dan menteri-menterinya.

Pemerintah dalam pengertian lebih sempit yang dimaksud pemerintah di sini adalah penanggung jawab tertinggi dari pelaksanaan pemerintahan sehari-hari jadi dalam hal ini adalah kepala pemerintahan atau pimpinan kabinet.

Di samping ketika syarat minimal seperti yang telah diuraikan di atas menurut hukum internasional masih ditambahkan satu syarat lagi yakni adanya pengakuan dari negara-negara lain di mana sebagai suatu masyarakat baru dapat diakui sebagai suatu masyarakat politik di

dunia internasional setelah adanya pengakuan dari negara-negara lain atas berdirinya negara tersebut. Jadi hari Selasa terlebih dahulu ada pengakuan dari negara lain baru negara tersebut dapat memperoleh hak sebagai negara dalam pergaulan internasional.

E. Unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagai suatu negara yang berdaulat Indonesia telah memenuhi semua unsur-unsur negara yang telah digariskan oleh teori hukum internasional Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Rakyat Indonesia

Rakyat Indonesia adalah warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia. Pernyataan atas keduanya itu Sebagaimana telah ditentukan oleh konstitusi negara Indonesia tepatnya pada pasal 26 ayat 1 2 dan 3 amandemen kedua undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pengaturan lebih lanjut tentang warga negara Indonesia ini terdapat pada undang-undang nomor 12 tahun 12 tentang kewarganegaraan republik Indonesia untuk pembahasan mengenai warga negara ini lebih detailnya terdapat pada bab 5 tentang konsepsi warga negara Indonesia.

2. Wilayah Indonesia

Wilayah negara Republik Indonesia terdiri atas sebagai berikut:

a. Wilayah daratan

Wilayah perairan, terdiri dari:

- 1) Perairan pedalaman Indonesia
- 2) Laut teritorial
- 3) Zona tambahan Indonesia
- 4) Zona ekonomi eksklusif
- 5) Landasan kontinen

b. Wilayah udara nasional

3. Pemerintah negara Republik Indonesia

Pemerintah negara Republik Indonesia menjalankan kekuasaan negara Indonesia. Artinya pemerintah negara Republik Indonesia memiliki kekuasaan yang tidak didapat dari dan

tindak tanduk pada Kekuasaan penguasa negara lain. Pemerintah negara Republik Indonesia terdiri atas badan-badan kenegaraan yang masing-masing memiliki kekuasaan dalam pengelolaan negara.

Adapun kekuasaan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a. Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar ada di tangan majelis permusyawaratan rakyat
- b. Kekuasaan untuk membuat undang-undang dan peraturan daerah dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
- c. Kekuasaan dalam pelaksanaan undang-undang dijalankan oleh presiden dan wakil presiden menteri-menteri gubernur bupati Walikota beserta jajarannya
- d. Kekuasaan dalam bidang peradilan terletak di tangan Mahkamah Agung beserta jajarannya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- e. Kekuasaan dalam bidang pengawasan keuangan dipegang oleh badan pemeriksaan keuangan

Negara Indonesia tidak menganut asas pemisahan kekuasaan secara murni yang ada pada teori trias politika dari Montesquieu yang memisahkan secara tegas kekuasaan legislatif eksekutif dan yudikatif. Indonesia menganut Adanya pembagian yang dalam hal-hal tertentu terdapat kerjasama dan koordinasi di antara badan-badan kenegaraan tersebut misalnya dalam pembuatan undang-undang terdapat kerjasama antara Presiden dan DPR RI.

4. Pengakuan terhadap negara Republik Indonesia

Rakyat Indonesia yang berkehendak untuk mengadakan negara Indonesia melalui kekuatan politik yang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia sekaligus mengadakan Kekuasaan pemerintah yang dipimpin oleh Soekarno Hatta.

Kemudian sehari berikutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia telah pula berhasil menciptakan hukum dasar bagi negara Indonesia yakni undang-undang Dasar 1945 artinya secara de facto Indonesia telah menjadi suatu negara terlebih beberapa waktu kemudian Indonesia memperoleh pengakuan sebagai negara berdaulat oleh negara India Mesir Australia sehingga secara de jure telah secara lengkap memenuhi unsur-unsur atau syarat sebagai suatu negara sebagaimana telah ditentukan oleh hukum internasional.

F. Tujuan Negara

Dalam pengertian umum tujuan diadakannya negara terutama terletak pada tiga tujuan utama yang berurutan dan saling mendasari yaitu:

1. Untuk menanamkan kedaulatan pemerintah kalau kedaulatan sudah tertanam maka berupaya.
2. Untuk menyelenggarakan ketertiban umum jika ketertiban umum sudah tercipta maka
3. Untuk mencapai Kesejahteraan Sosial.

Sementara kalau melihat dari pendapat-pendapat para ahli maka telah ditemui beraneka ragam pendapat diantaranya:

1. Plato

Tujuan diadakannya negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia baik sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial.

2. Roger H. Soltau

Menurutnya diadakannya negara bertujuan untuk membuat masyarakat berkembang dan menyelenggarakan daya cipta dan kreasinya sebebas-bebas mungkin

3. Thomas aquinas

Dalam ajaran teokratis yang diwakili oleh aquinas tujuan diadakannya negara adalah untuk mencapai kehidupan yang aman dan tenram dengan taat kepada Tuhan

4. Ibnu Arabi

Dalam pandangan Ibnu Arabi keberadaan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang baik jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing

G. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tujuan itu terdiri dari visi dan misi. Visi adalah pantauan kedepan tentang sesuatu yang hendak dicapai sementara misi adalah bagaimana cara-cara untuk mencapainya. Hakikat tujuan dari negara Indonesia terdapat pada filsafat bangsanya yaitu Pancasila yang terletak pada sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah suatu negara yang adil dan makmur dari visi dari tujuan negara Indonesia adalah negara yang adil dan makmur. Sementara Bagaimana cara atau visi untuk mencapai negara Indonesia yang adil dan makmur tersebut telah diletakkan pondasinya oleh para pendiri negara kita yaitu pada pembukaan undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4 Yakni dengan:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

H. Bentuk-Bentuk Negara

Pada dasarnya pembedaan bentuk negara dapat dibedakan berdasarkan rumusan konsepsi negara dan berdasarkan subjek pemegang kekuasaan dalam negara tersebut. Berdasarkan konsepsi bentuk negara-negara dapat dibedakan atas bentuk negara kesatuan dan negara serikat. Sementara kalau ditinjau dari siapa yang menjadi subjek pemegang kekuasaan bagi negara tersebut maka bentuk negara dapat dibedakan atas negara republik negara monarki negara oligarki dan negara demokrasi.

1. Bentuk negara berdasarkan konsepsi

a. Negara kesatuan

Negara kesatuan negara adalah negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa mengatur daerah-daerah. Maka kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang menonjol sementara Pemerintah Daerah bersifat tidak langsung dan seringkali dalam bentuk otonomi yang luas.

Dalam pandangan CF strong ciri yang mutlak melekat pada suatu negara kesatuan ialah kedaulatan yang tidak terbagi atau yakni dekonstruksi yang merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wakilnya di daerah dan didesentralisasi yaitu penyerahan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi itu sering diserahi tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkan tugas itu kepada pemerintah pusat.

Pada perkembangan kontemporer pengantin atas bentuk negara kesatuan ini umumnya dibedakan atas negara kesatuan yang menggunakan sistem sentralisasi dan negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi.

Dalam ciri negara kesatuan yang menggunakan sistem sentralisasi segala kewenangan urusan pemerintahan dan negara diurus secara terpusat oleh pemerintah pusat. Kalaupun ada kewenangan Pemerintah Daerah hal itu semata-mata hanya merupakan perintah dari pusat jadi pemerintah daerah sifatnya hanya menjalankan kehendak dari pemerintah pusat.

Adapun kelebihan dari penggunaan asas sentralisasi ini diantaranya merupakan simbol yang tangguh untuk menghadapi daerah-daerah yang hendak memisahkan diri dari negara. Selain itu dengan penerapan asas sentralisasi ini cost yang digunakan untuk organisasi pemerintahan akan menjadi lebih efisien sementara kelemahannya asas sentralisasi ini

cenderung untuk menimbulkan suatu bentuk pemerintahan yang otoriter dan menghambat Daya Kreasi daerah dalam mengelola daerahnya.

Kemudian dalam hal pengambilan keputusan terhadap permasalahan di daerah seringkali sulit untuk segera diselesaikan karena segala sesuatunya harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Selain daripada itu sasaran yang hendak dicapai oleh pemerintah pusat kepada daerah seringkali tidak tepat sasaran karena tidak memperhatikan kemampuan daerah karakteristik daerah atau nilai-nilai yang hidup di daerah termasuk kearifan budaya lokal.

Sedangkan pada negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Asas desentralisasi ini menghendaki adanya penyimpangan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dipilih oleh rakyat di daerah yang bersangkutan untuk segera bertingkat dengan alat perlengkapan sendiri mengurus kepentingan rumah tangga sendiri atas inisiatif dan beban biaya sendiri sejauh tidak menyimpang dari kebijaksanaan pemerintah pusat.

Asas desentralisasi memiliki beberapa keuntungan seperti pemusatan dan penumpukan kekuasaan dapat dihindari di samping itu juga dapat mengefektifkan pemerintahan karena hal-hal yang dianggap lebih penting kalau diurus oleh pemerintah daerah diserahkan pengurusannya kepada pemerintah setempat.

Selain itu terhadap hal-hal yang sifatnya merupakan kekhususan daerah dalam hal seperti karakteristik kebudayaan sejarah daerah dan lain-lain akan lebih diperhatikan dan diperhitungkan oleh pemerintah setempat Namun demikian asas desentralisasi juga memiliki kelemahan diantaranya membuka kemungkinan timbulnya ketimpangan perkembangan di antara masing-masing daerah karena perbedaan kemampuan dari masing-masing daerah sehingga dapat saja menimbulkan kesenjangan sosial antar daerah.

b. Negara serikat

Pada dasarnya negara serikat merupakan gabungan dari negara-negara bagian. Kekuasaan dalam negara serikat dibagi antara kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah Serikat atau Federal dengan negara-negara bagian. Negara bagian yang satu terbebas dari intervensi negara bagian lain dan berhubungan secara sendiri-sendiri kepada pemerintah Serikat serta kekuasaan antara negara bagian yang satu dengan negara bagian lainnya adalah sama. Sementara untuk ke kosan pemerintah Serikat memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari negara-negara bagian karena terdapat bidang-bidang tertentu yang hanya merupakan Kekuasaan pemerintah pusat misalnya dalam bidang urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan moneter dan sebagainya.

2. Bentuk negara berdasarkan subjek pemegang kekuasaan

a. Republik

Negara republik adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden. Presiden dalam pemerintahan republik yang demokratis dipilih dan diangkat dalam satu peristiwa tertentu oleh lembaga atau pilihan rakyat. Sementara dalam pemerintah Republik yang tidak demokratis presiden bisa berasal dari tindakan mengangkat dirinya sendiri atau dengan menunjuk orang yang akan menggantikannya.

b. Monarki

Bentuk negara monarki ini identik dengan negara kerajaan. Monarki merupakan suatu bentuk negara di mana yang menjadi Pemegang kedaulatan pada negara tersebut terletak di tangan satu orang.

Kedaulatan yang ada pada satu orang itu pun sifatnya ditentukan berdasarkan keturunan atau pertalian darah dari orang yang sebelumnya memegang tumpuk kekuasaan di negara tersebut. Pada perekaman sekarang bentuk negara menurut ini masih terdapat pada beberapa negara di dunia seperti Arab Saudi dan Brunei Darussalam.

c. Oligarki

Oligarki adalah pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia yang menganggap dirinya sendiri tercakup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan di atas segenap rakyat. Yang menjadi ciri utama pada negara oligarki yakni terletak pada Kekuasaan di negara tersebut yang dipegang oleh kelompok tertentu lalu ciri yang keduanya adalah bahwa dalam negara oligarki tidak terdapat hubungan pertanggungjawaban antara kelompok yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan dengan rakyatnya. Keberlakuan untuk negara yang satu ini sebagaimana berlangsung di Korea Utara ataupun di Myanmar.

d. Demokrasi

Negara demokrasi adalah negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat sehingga Segala keputusan dalam negara tersebut diambil berdasarkan pada keputusan bersama rakyat. Hakikat dari keputusan yang diambil berdasarkan pada keputusan bersama rakyat terletak pada Pemerintahan dari rakyat yang artinya keabsahan atau legitimasi suatu pemerintahan berasal dari rakyat. Kemudian pemerintahan oleh rakyat yang maknanya untuk menunjuk bahwa pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dilakukan oleh rakyat. Selanjutnya pemerintah untuk rakyat yang menekankan bahwa pemerintahan tersebut haruslah dilangsungkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

I. Bentuk negara Indonesia

Sebagai sebuah negara bagi Muhammad Yamin Indonesia yang masyarakatnya majemuk harus menjadikan dirinya sebagai negara kesatuan yang kuat demi mengayomi seluruh warganya. Indonesia menurut Yamin harus lebih menetap ke masa depan daripada mengungkit masa lalu. Indonesia harus melepaskan diri dari idealisme kerajaan tradisional dan primordialisme kesukuan lama untuk membentuk sebuah negara baru yang lebih modern sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Begitupun jikalau hendak dihubungkan dengan beberapa bentuk negara modern Soepomo memandang bahwa paham liberal yang individualis maupun paham komunis yang didasarkan atas teori kelas sama-sama tidak cocok untuk Indonesia sebaliknya paham yang cocok adalah paham integralistik atau negara kesatuan karena memandang hubungan antara pemimpin dan rakyatnya dalam kesatuan.

Dalam disertasi Anak Buyung Nasution yang berjudul aspirasi pemerintahan konstitusional di Indonesia studi sosial legal atas konstituante 1956 sampai 1959 juga dibahas konsep negara integralistik yang diperkenalkan oleh Soepomo. Menurut Soepomo negara integralistik adalah sebagai negara persatuan atau negara yang merangkul seluruh bangsa mempersatukan semua orang. Semua perbedaan akan diubah menjadi kesamaan nilai-nilai dan kepentingan negara dan melambangkan rakyat sebagai kesatuan organik. Dalam konsep ini tidak ada idealisme negara dan masyarakat serta tidak ada pula dualisme pemerintahan dan rakyat.

Apabila dilihat dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 1 Negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tumpuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Akan tetapi sistem pemerintah Indonesia yang salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan menyebabkan ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan pengawasan dan kewenangan.

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah negara yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang.

Kesepakatan itu digugurkan dalam pasal 37 ayat 5 Amandemen Keempat undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Prinsip persatuan sangat dibutuhkan karena keragaman suku bangsa agama dan budaya yang diwarisi bangsa Indonesia dalam sejarah yang mengharuskan bangsa Indonesia bersatu dengan syarat-syaratnya dalam keragaman itu. Keragaman itu harus dipersatukan tetapi tidak boleh disatukan atau diseragamkan. Oleh karena itu prinsip persatuan Indonesia tidak boleh diidentikkan dengan kesatuan. Prinsip persatuan juga tidak boleh dipersempit maknanya ataupun diidentikkan dengan pengertian pelembagaan bentuk negara kesatuan yang merupakan bangunan Negara yang dibangun atas motto Bhinneka Tunggal Ika.

Bentuk negara kita adalah kesatuan sedangkan persatuan Indonesia adalah prinsip dasar negara yang harus dibangun atas dasar persatuan bukan kesatuan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara persatuan dalam arti sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Dalam negara kesatuan itu otonomi individu diakui kepentingan secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat negara persatuan ini mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena prinsip Kewargaan yang berkesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan namun konsepsi negara persatuan itu sering disalah pahami seakan-akan bersifat integralistik yang mempersatukan rakyat secara totaliter bersama-sama dengan pemimpinnya seperti konsep Hitler yang didasarkan atas pandangan Hegel tentang negara Jerman.

Istilah negara persatuan cenderung dipahami sebagai konsepsi atau cita negara yang bersifat totalitarian atau otoritarian yang mengabaikan pluralisme dan menafikan otonomi individu rakyat yang dijamin hak dan kewajiban asasinya dalam undang-undang dasar.

Oleh karena itu untuk tidak menimbulkan salah pengertian istilah persatuan harus Dikembalikan pada bunyi rumusan sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia bukan persatuan dan kesatuan Indonesia apalagi kesatuan Indonesia.

Persatuan kesatuan adalah istilah filsafat dan prinsip bernegara sedangkan kesatuan adalah bentuk negara yang bersifat teknis bandingkan dengan antara rumusan Pancasila dalam pembukaan undang-undang Dasar 1945 dan rumusan pasal 1 ayat 1 yang menyatakan negara Indonesia adalah konsepsi tentang bentuk negara dan republik adalah konsepsi mengenai bentuk pemerintahan yang dipilih dalam kerangka undang-undang dasar 1945.

Pernyataan atas bentuk negara Indonesia secara jelas telah diatur pada landasan konstitusional Indonesia yakni yang termaktub pada pembukaan dan beberapa pasal dalam batang tubuh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan.

Negara kesatuan yang bagaimana dianut oleh Indonesia saat ini jawabannya tidak lain adalah negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi atau lebih populer dengan sebutan otonomi daerah pada konsep desentralisasi Indonesia sejak diamanemen undang-undang Dasar 1945 hubungan vertikal antara pemerintah pusat di Jakarta dan pemerintah pemerintah di daerah mengalami perubahan yang cukup penting di mana kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah di perkur kedudukannya dalam hal-hal tertentu.

Hal ini terbukti dari pernyataan pasal 18 ayat 1 amandemen kedua undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang kemudian yang tidak kalah pentingnya pengaturan yang terdapat pada pasal 18 ayat 5 amandemen kedua undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Adapun pembagian kewenangan antara pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten atau kota dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur secara lebih rinci dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 ayat 3 dari undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini telah menentukan kewenangan untuk pemerintah pusat terletak pada bidang sebagai berikut:

1. Hubungan luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional
6. Agama

Untuk urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang menurut pasal 13 ayat 1 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

2. Perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota
8. Pelayanan bidang Ketenagakerjaan lintas kabupaten atau kota
9. Fasilitasi pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten atau kota
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan Pertanahan termasuk lintas kabupaten atau kota
12. Pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten atau kota
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten atau kota
16. Urusan wajib lainnya yang diamankan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian untuk urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten atau kota merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota ditentukan oleh pasal 14 ayat 1 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyajian sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitasi pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan
12. Pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14. Pelayanan administrasi penanaman modal

15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah atau pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lainnya seperti pemerintahan provinsi.

Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang keuangan pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan Selaras. Akibat pengaturan yang demikian menegaskan bahwa daerah Provinsi daerah kabupaten dan daerah kota masing-masing mempunyai hubungan hierarki satu sama lain dengan demikian kepala daerah kabupaten atau kota harus menganggap Gubernur sebagai atasan sehingga Pemerintah kabupaten atau kota dalam segala sesuatunya harus berkoordinasi dengan gubernur tidak langsung saja ke pemerintah pusat.

Namun yang cukup disayangkan sistem desentralistik yang berupa otonomi daerah ini masih belum begitu ditanggapi secara dewasa oleh banyak daerah di Indonesia gejala ini dapat terlihat dari begitu berkembangnya sentimen primordial semacam gerakan kesukuan yang mengarah pada keinginan untuk meraih sukses pemilihan kepala daerah ataupun dalam kepentingan untuk mendominasi posisi-posisi strategis di pemerintahan termasuk dalam kepentingan untuk mendominasi kelulusan tes Pegawai negara sipil dengan jargon putra daerah.

Selain itu ketidakdewasaan penerimaan otonomi daerah ini telah pula menumbuhkembangkan proses KKN oleh karena adanya keleluasaan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan indikasi ini dapat terindikasi pada beberapa gejala negatif yang antara lain begitu maraknya money politik dalam proses pemilihan kepala daerah.

Penopang dana di balik kasus ini walau sulit dibuktikan secara hukum adalah para penguasa yang kuat ekonominya dengan harapan memperoleh fasilitas bisnis setelah jagonya berhasil terpilih sebagai gubernur bupati dan walikota begitupun terhadap kesan nepotisme dalam proses pengangkatan dan penempatan pada jabatan struktural di daerah.

Kemudian yang tidak kalah ibunya dari ketidakdewasaan dalam melaksanakan otonomi daerah ini dapat pula terdapat pada pengurukan sumber daya alam secara berlebihan dengan diberikannya kekuasaan kepada daerah untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di daerahnya sementara banyak Pemerintah Daerah yang paradigma pembangunannya memandang bahwa pendapatan asli daerah adalah segala-galanya dan merupakan faktor utama dalam pembangunan mendorong daerah untuk melakukan eksloitasi

secara besar-besaran terhadap sumber daya alamnya hal seperti ini sudah tentu menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kelangsungan hidup generasi berikutnya.

Sementara jika ditinjau dari bentuk negara berdasarkan subjek pemegang kekuasaan maka Indonesia merupakan negara demokrasi pernyataan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terlihat jelas pada pembukaan undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4 dalam menyebutkan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat kemudian disusul oleh pengaturan yang terdapat pada pasal 1 ayat 2 undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan kedaulatan ada ditangan rakyat dan dijalankan berdasarkan undang-undang dasar Selain itu tercermin pula pada pasal 22e 2 undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung membebas rahasia jujur dan adil 5 tahun sekali pembahasan mengenai demokrasi Indonesia lebih lanjut dapat ditemui pada bab 7 tentang konsepsi demokrasi dan demokrasi Indonesia.

BAB 22

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

A. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila telah lahir sebelum Republik Indonesia ini berdiri artinya Pancasila merupakan kontrak sosial antara negara Indonesia dengan rakyatnya. Negara Indonesia dalam hal ini diwakili pemerintah Indonesia berkewajiban untuk membawa rakyat Indonesia kepada tujuan yang dimaksud oleh kontrak sosial yang terkandung pada Pancasila dengan menghilangkan hak-hak rakyat Indonesia sebagai Pemegang kedaulatan tertinggi karena rakyat Indonesia yang memiliki negara.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dasar bagi kehidupan untuk berbangsa dan bernegara yang dikehendaki oleh Pancasila diambil dari nilai-nilai rohani dan budaya bangsa Indonesia jadi dengan sendirinya apa yang menjadi nilai-nilai Pancasila merupakan karakter bangsa Indonesia.

Menurut perumus pancasila dalam hal ini Bung Karno Pancasila adalah karakter asli bangsa Indonesia. Sebagaimana tiap-tiap individu mempunyai watak sendiri dan pembawaan pembawaan sendiri maka tiap bangsa pun mempunyai watak sendiri dan pembawaan pembawaan sendiri. Tiap-tiap bangsa mempunyai tema Sentral sendiri yang menentukan segala sesuatu yang mengisi hidupnya mempunyai ton sendiri yang menentukan segenap lagu pikirannya dan segenap lagu tingkahnya.

Mempunyai kepribadian sendiri yang memberi cap atau corak kepada segala angannya dan terhadap segala sikap-sikapnya ada bangsa yang kepribadiannya ialah harus kehausan dan haus menguasai orang lain yaitu bangsa yang kepribadiannya imperialistis. Ada bangsa yang ton lagunya ialah selalu dan kesenian bangsa yang artistik bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang telah lagunya ialah Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan suatu pandangan hidup kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak bangsa Indonesia. Cita-cita tersebut meliputi cita-cita kemerdekaan individu kemerdekaan bangsa perikemanusiaan keadilan sosial perdamaian cita-cita dan cita-cita politik.

Amran (2016: 87-88) negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri di atas keberagaman. Setiap negara memiliki pijakan yang menjadi landasan

berdirinya sebuah negara. Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia, hal ini termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar NKRI tahun 1945 alinea ke-4. Alinea ke-4 merupakan sebuah pernyataan yang yuridis tentang dasar negara Republik Indonesia dalam kalimat: “*dengan berdasarkan kepada*”

“*maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

Pendiri negara ini pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati Dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Secara historis Pancasila tidak semata-mata lahir secara mendadak. Pancasila hadir melalui proses panjang yang didasari oleh perjuangan dan pemikiran para tokoh bangsa. Pancasila lahir dari gagasan-gagasan luhur yang berakar pada kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI atau badan penyelidik usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, Pancasila dijadikan dasar berdirinya negara Indonesia. Sebuah negara tidak mungkin berdiri tanpa adanya dasar negara.

Maka dari itu selain berfungsi sebagai landasan atau dasar negara Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman hidup bangsa. Proses konseptualisasi Pancasila Melalui rangkaian perjalanan panjang yang dimulai sekitar awal 1900 sembilan ratus dalam bentuk gagasan sehingga muncul sintesis antara ideologi dan gerakan seiring dengan penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama.

Dalam proses perumusan dasar negara Soekarno memainkan peranan penting. Beliau orang pertama yang mengkonseptualisasikan dasar negara ke dalam pengertian dasar f selanjutnya dalam konsepsi terbaru dalam rangka menegaskan adanya falsafah negara dan hukum dasar berbangsa dan bernegara, dan hukum dasar berbangsa dan bernegara, pemerintah telah pula mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2008 tentang hari Konstitusi. Hal ini merupakan salah satu bagian dari tahapan ikhtiar bangsa untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Memaknai kembali Pancasila merupakan sebuah penegasan terhadap komitmen bahwa sesungguhnya nilai-nilai Pancasila adalah dasar dan ideologi kita bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila bukanlah konsep pikiran semata melainkan sebuah

perangkat tata nilai untuk diwujudkan sebagai panduan dalam berbagai segi kehidupan. Dengan demikian Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika dan moral dalam membangun pranata politik, pemerintahan, ekonomi, pembentukan dan penegakan hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Arti penting Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lebih kepada penyelenggaraan negara. Bagaimana semua komponen negara terutama pemerintah dapat menyelenggarakan negara dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila menjawai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia.

BAB 23

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

A. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Secara etimologis istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan konsep pengertian dasar cita-cita pemikiran dan kata logos yang berarti ilmu Adapun cita-cita yang dimaksud adalah pada idea adalah cita-cita yang hendak dicapai dan bersifat tetap sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar atau pandangan.

Ideologi merupakan sistem ajaran tentang makna kehidupan tentang nilai-nilai dasar dan tentang Bagaimana manusia harus hidup dan bertindak meskipun ideologi tidak lepas dari masyarakat namun harus dibedakan daripadanya karena juga bekerja dalam bentuk abstrak sebagai keyakinan atau kepercayaan seseorang yang dipegangnya dengan Teguh.

Kekuatan ideologi terletak dalam pegangannya terhadap hati dan akal kita merangkul sebuah ideologi berarti meyakini apa saja yang termuat di dalamnya dan kesediaan untuk melaksanakannya. Ideologi menuntut agar orang mengesampingkan penilaian sendiri dan bertindak sesuai dengan ajarannya.

Adapun keyakinan bangsa Indonesia adalah Pancasila pada Pancasila terkandung keyakinan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa dan negara yang kuat. Pancasila diangkat dari nilai-nilai asli masyarakat Indonesia yang terdapat pada adat istiadat kebudayaan agama ataupun kepercayaan yang terkandung pada pandangan hidup bangsa Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi nasional berakar dari pandangan nilai-nilai religius dan budaya bangsa Indonesia.

Pancasila adalah ideologi yang terbuka yang memiliki ciri bahwa nilai-nilai dan citanya tidak dapat dipaksakan dari luar melainkan diambil dari harta kekayaan rohani moral dan budaya masyarakat Indonesia dan Pancasila memiliki ciri khas sebagai keyakinan ideologis yang merupakan kesepakatan masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat kaku dan tertutup akan tetapi Pancasila senantiasa Mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman ilmu dan teknologi. Akan tetapi keterbukaan Pancasila ini tidak mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Selain itu Pancasila sebagai ideologi senantiasa memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi masyarakat berkembang ilmu dan teknologi serta zaman.

Usiono (2012: 99-102), pancasila sebagai Ideologi merupakan bagian terpenting dari fungsi dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi adalah

kumpulan ide-ide yang muncul dan tumbuh dalam suatu pemerintahan negara. Membicarakan Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan dipandang perlu dalam rangka mencari titik temu dalam rangka mengamalkan dan menyerasikan orientasi, persepsi dan penghayatan terhadap ideologi Pancasila dalam berbagai kehidupan.

Suatu konsep yang abstrak berarti Pancasila adalah ideologi terbuka memerlukan waktu untuk memantapkan proses pemahaman, penghayatan, pembudayaan dan pengamalannya dalam masyarakat. Kehadiran proses itu menunjukkan bahwa roh atau jiwa dari konsep itu akan hidup dan berkembang. Roh itu tumbuh secara inkremental, berangsur-angsur, dalam pemikiran dan praktik kehidupan masyarakat sehari-hari.

Agar pertumbuhan dan perkembangan dapat berjalan dengan wajar diperlukan pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan kemudian diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan itu maka akan tumbuh sebuah konsep yang hidup dan dinamis. Kehadirannya terasa riil, komunikatif dan menjamah berbagai bidang kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ideologi terbuka berdasarkan banyak pemahaman mengandung semacam dinamika internal yang memungkinkan dilakukan pembaharuan terhadap makna pada setiap waktu sehingga isinya tetap relevan dan komunikatif sepanjang zaman tanpa menyimpang dan mengingkari hakekatnya. Pembaharuan atau pengembangan Makna tersebut bukan berarti mengganti nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Bilamana Ideologi itu direvisi apalagi diganti maka ideologi tersebut sudah kehilangan jati dirinya. Sehingga Kendati secara formal Ideologi itu masih ada tetapi secara substansial ia tidak ada lagi karena sudah berganti dengan nilai-nilai yang baru.

Konsep ideologi politik sebagaimana dikemukakan Alfian mengandung beberapa dimensi. Salah satu dimensi dari ideologi politik adalah pencerminan realitas yang hidup di masyarakat yang muncul untuk pertama kali Atau paling tidak pada awal kelahirannya. Jadi Ideologi merupakan gambaran tentang sejauh mana suatu masyarakat mampu memahami dirinya.

Dimensi kedua dari ideologi adalah dimensi idealisme yaitu lukisan kemampuan memberikan harapan kepada berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat untuk memiliki kehidupan bersama secara lebih baik dan masa depan yang lebih cerah.

Sedangkan dimensi ketiga adalah dimensi fleksibilitas yaitu lukisan kemampuan untuk mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakat. Adanya fleksibilitas dapat membuka jalan bagi generasi baru masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan intelektualnya untuk mencari dan

meneliti interpretasi interpretasi baru yang Mungkin bisa diberikan terhadap nilai-nilai dasar ideologi dengan perubahan dan perkembangan.

Menurut Soerjanto Poepowardojo ideologi adalah suatu pilihan yang jelas dan membawa komitmen untuk mewujudkannya. Sejalan dengan itu sastraprata menjelaskan bahwa ideologi memuat orientasi pada tindakan. Iya merupakan pedoman untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Logikanya Suatu ideologi menuntut kepada mereka yang meyakini kebenaran nya untuk memiliki persepsi, sikap dan tingkah laku yang wajar, tas dan sehat tentang dirinya. Melalui itulah diharapkan akan lahir dan berkembang sikap dan tingkah laku yang pas dan tepat dalam proses perwujudannya dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Ada berbagai faktor yang dapat melahirkan dan mengembangkan persepsi dan tingkah laku yang tidak benar dan kurang sehat tentang suatu ideologi. Salah satunya adalah bilamana seseorang atau segolongan yang karena kekuatan atau kekuasaan memaksakan persepsi dan sikap nya sebagai persepsi dan sikap yang paling. Persepsi dan sikap yang tidak wajar dan kurang sehat dapat terjadi dalam suasana keterbukaan atau kebebasan yang tidak terbatas apalagi jika dirasuki Sikap saling curiga. Dalam suasana seperti ini biasanya terjadi kecenderungan yang merangsang berbagai pihak untuk memonopoli kebenaran tentang ideologi. Masing-masing pihak bersikeras untuk memaksakan kehendak dan persepsinya. Suasana seperti ini bukan saja menyulitkan tercapainya persamaan dan keserasian persepsi tetapi juga dapat mengembangkan nilai yang membahayakan kehidupan bersama.

Pandangan ini sejalan dengan Pendapat yang dikemukakan oleh sastraprata bahwa ideologi memiliki kecenderungan untuk doktriner, terutama karena ia berorientasi pada tindakan atau tindakan untuk merealisasikan nilai-nilai nya. Meskipun kecenderungan doktriner itu tidak selalu bermakna negatif tetapi kemungkinan ke arah itu selalu terbuka. Obsesi dan komitmen yang berlebihan terhadap ideologi biasanya merangsang orang untuk berpersepsi bersikap dan bertingkah laku sangat doktriner.

Komitmen yang berlebihan menyebabkan nya untuk ingin melindungi ideologi yang diyakininya dalam genggaman yang ketat tanpa memperhatikan kondisi sosial politik di sekitarnya. Pada gilirannya ideologi menjadi sesuatu yang sakral baginya dan oleh karenanya muncul kecenderungan menolak dan menentang pengembangan pemikiran pemikiran baru.

Fenomena itu akan menjadikan ideologi sebagai dogma yang sempit,beku dan tak bernyawa. Dogmatisme sempit mematikan jiwa atau roh ideologi yang menghidupkannya sebagai wawasan atau pandangan hidup bersama yang kreatif dan dinamis.

Dengan demikian persepsi, sikap dan tingkah laku yang keliru terhadap ideologi dapat meredusir Ideologi itu menjadi alat kekuasaan otoriter dan totaliter yang menakutkan, mengembangkan suasana persaingan yang tajam dan penuh kecurigaan yang anarkis atau menjadikannya suatu dogma yang sempit dan kaku.

Pancasila sebagai ideologi terbuka yang hidup dinamis mestinya tidak menghendaki terjadinya hal-hal semacam itu. Hal ini disebabkan karena hal-hal semacam itu merupakan suatu pengingkaran terhadap hakikat dan jati diri yang ada di dalamnya. Sebaliknya Pancasila bahkan menghendaki agar masyarakat dan bangsa kita mengembangkan sikap, persepsi dan tingkah laku yang pas dan sehat tentang dirinya sebagai ideologi terbuka. Bila bangsa kita, para penyelenggara negara maupun rakyat pada umumnya berhasil memenuhi kehendak itu dengan baik maka Pancasila akan menjadi suatu ideologi terbuka yang hidup dan dinamis dalam arti yang sesungguhnya.

BAB 24

IDENTITAS NASIONAL INDONESIA

A. Identitas Nasional Indonesia

Winarno (2008: 44-46), identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Pada uraian sebelumnya identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan oleh karena identitas nasional itu dibuat dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder oleh karena identitas nasional lahir belakangan bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif. Jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional itu warga bangsa telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan.

Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu dan perjuangan panjang di antara warga bangsa negara yang bersangkutan. Hal ini disebabkan identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu. Dapat terjadi sekelompok warga bangsa tidak setuju dengan identitas nasional yang hendak diajukan oleh kelompok bangsa lainnya. Setiap kelompok bangsa di dalam negara umumnya menginginkan identitasnya dijadikan atau dianggap sebagai identitas nasional yang tentu saja belum tentu diterima oleh kelompok bangsa lain. Inilah yang menyebabkan sebuah negara bangsa yang baru merdeka mengalami pertikaian intern yang berlarut-larut demi untuk saling mengangkat identitas kesukubangsaan menjadi identitas nasional. Contoh kasus negara Sri Lanka yang diliputi pertikaian terus-menerus antara bangsa sinhala dan Tamil sejak negara itu merdeka.

Setelah bangsa Indonesia bernegara mulai dibentuk dan disepakati apa apa yang dapat menjadi identitas nasional Indonesia. Bisa dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam bentuk identitas nasionalnya kecuali pada suatu proses pembentukan identitas Pancasila sebagai identitas nasional yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan di antara warga bangsa Indonesia.

Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia.

2. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih. Warna merah berarti berani dan putih berarti. Lambang Merah Putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945 namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda.
3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang pada tanggal 28 Oktober 1928 dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara
4. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara
5. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhineka tunggal ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen namun tetap berkeinginan untuk menjadi suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia
6. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Berisi 5 nilai dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi dari negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia.
7. Konstitusi atau hukum dasar negara yaitu undang-undang Dasar 1945. Merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki Tingkatan tertinggi dalam tata urutan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara.
8. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan sedangkan bentuk pemerintahan adalah Republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi. Syahrini lintas negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat disepakati untuk tidak ada perubahan.
9. Konsepsi wawasan nusantara. Sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok kelompok bangsa Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas merupakan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional pada dasarnya adalah puncak puncak dari kebudayaan daerah.

Tumbuh dan sepertinya beberapa identitas nasional Indonesia itu sesuai dengan sila diawali dengan adanya kesadaran politik bangsa Indonesia sebelum bernegara. Hal ini demikian sesuai dengan ciri dan pembentukan negara-negara model mutakhir. Kesadaran politik itu adalah tumbuhnya semangat nasionalisme atau semangat kebangsaan sebagai gerakan menentang penjajahan dan mewujudkan negara negara Indonesia. Dengan demikian nasionalisme yang tumbuh dalam diri bangsa Indonesia turut mempermudah terbentuknya identitas nasional Indonesia.

B. Pengertian identitas nasional

Dipandang dari padanan katanya identitas nasional yang terdiri dari istilah identitas yang berasal dari istilah identity dan nasional yang berangkat dari istilah Nation yang mana identitas dapat diterjemahkan sebagai karakter, ciri, tanda, jati diri ataupun sifat khas, sementara nasional yang artinya bangsa. Maka identitas nasional itu merupakan sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal sebagai kepribadian atau karakter suatu bangsa.

Secara lebih jauh Sigmund Freud pernah menggariskan bahwa yang dapat diartikan bahwa karakter itu adalah kumpulan tata nilai yang mewajibkan dalam suatu sistem Daya juang atau daya dorong yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku. Artinya identitas nasional tersebut berada pada kedudukan yang luhur dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu sebagai nilai asas norma kehidupan bangsa sudah semestinya dijunjung tinggi oleh warga dari bangsa tersebut.

Identitas nasional suatu negara pada hakekatnya merupakan suatu bentuk kepribadian bangsa yang sesungguhnya untuk mewujudkan kredibilitas integritas dan harkat serta martabat bangsa dalam rangka mencapai suatu tujuan negara.

Menurut Sumarno Soedarsono identitas nasional tersebut tampil dalam tiga fungsi yaitu:

1. Sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya bangsa yang tidak mempunyai jati diri tidak akan eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa Daya juang dan kekuatan bangsa ini hal ini tercermin dalam kondisi bangsa pada umumnya dan kondisi ketahanan bangsa pada khususnya.
3. Sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia

Karakter tidak datang dengan sendirinya tetapi dibentuk dan dibangun secara sadar dan sengaja berdasarkan jati diri masing-masing. Telah menjadi suatu kemavhuan bahwa suatu bangsa yang terdiri atas manusia-manusia yang dalam peradabannya senantiasa bergerak dan

berinteraksi dengan bangsa lain melalui segala identitasnya masing-masing baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akan tetapi jika suatu bangsa hendak terus berkarakter maka bangsa tersebut harus dapat mempertahankan identitas nasionalnya sebagai penyangga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menghadapi kekuatan-kekuatan luar sebab kalau tidak negara itu akan mati.

Tanda-tanda suatu negara akan mati menurut Mahatma Gandhi dalam teori Seventeen atau 7 dosa yang dapat mematikan suatu negara yakni apabila telah bertumbuh kembangnya budaya nilai-nilai dan perilaku kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter dan bisnis tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, agama tanpa pengorbanan dan politik tanpa prinsip.

C. Faktor-faktor Pembentuk Identitas Nasional

Suatu penelitian dari institusi Teknologi Bandung atau ITB di akhir tahun 2004 menemukan bahwa ada 6 faktor yang menentukan keberhasilan yaitu kreativitas percaya diri atau memegang prinsip mentalitas berkelimpahan integritas idealisme dan kompetensi.

Jika kita perhatikan lima faktor-faktor terkait dengan masalah karakter yaitu kreativitas percaya diri mentalitas berkelimpahan integritas dan idealisme. Itu pertanda bahwa bagaimanapun juga karakter adalah faktor penting dalam menentukan keberhasilan setidaknya itu telah dibuktikan oleh Cina Jepang dan Vietnam.

Sifat khas yang dimiliki oleh suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor objektif yang meliputi faktor geografis ekologis demografis dan faktor subjektif yang meliputi faktor sejarah sosial politik dan kebudayaan suatu bangsa.

Kemunculan identitas nasional bagi suatu negara adalah sebagai hasil interaksi historis antara empat faktor penting yakni faktor primer pendorong penarik dan faktor reaktif.

Faktor primer mencakup etnisitas, teritorial, bahasa agama dan sejenisnya. Sementara faktor pendorong meliputi pembangunan komunikasi teknologi kekuatan militer dan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Faktor pendorong senantiasa bersifat dinamis bergerak terus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sementara untuk faktor penarik terdapat pada kodifikasi bahasa yang resmi dan bagaimana sistem pendidikannya. Sedangkan ruang lingkup yang terdapat pada faktor reaktif adalah meliputi penindasan dominasi dan kolektivitas rakyatnya.

D. Identitas Nasional Indonesia

Presiden Soekarno kerap menegaskan wasiatnya bahwa tugas berat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan adalah mengutamakan pelaksanaan nasional karakter building.

Bahkan ia wanti-wanti Jika pembangunan karakter ini tidak berhasil bangsa Indonesia hanya akan menjadi bangsa kuli. Identitas atau kepribadian bangsa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang halus bunyinya sopan dalam sikapnya santun dalam tindaknya begitu bertoleransi memiliki solidaritas sosial yang peka dan nasionalisme yang tinggi, lambat laut saat ini telah begitu pudar dikikis oleh derasnya arus globalisasi dan kapitalisme yang berikan ajaran untuk individualis materialis bebas-bebas-bebasnya konsumtif pragmatis dan praktis atau instan.

Saat ini manusia Indonesia cenderung kurang tulus dan suka menggunakan kodok berbeda antara perkataan dan perbuatan tidak bisa Memegang janji dan menghindari tanggung jawab. Nilai-nilai budaya dan perilakunya munafik dan orientasi pada keduniaan serta materialisme Semata. Sementara itu korupsi yang terus merajalela juga terus menerus kesanggupan kita untuk tumbuh berkembang dan berdaya saing. Kalau untuk korupsi ini sampai-sampai ada guyonan di tengah masyarakat bahwa setan tidak perlu lagi menggoda dan mengajari bangsa Indonesia untuk melakukan korupsi, sebab justru setan yang harus belajar mengenai jurus-jurus atau modus operandi korupsi dari bangsa Indonesia dan kemudian digunakan untuk menggoda bangsa atau negara lain.

Sikap dan perilaku kurang tulus juga telah menghinggapi negeri ini yang dapat terlihat pada kondisi saat ini di mana setiap jasa ataupun jabatan selalu diukur dengan materi dan fasilitas. Kalau anggota legislatif gaji dan fasilitasnya harus segini untuk pejabat eksekutif pendapatan dan fasilitasnya harus sebesar ini untuk aparatur penegak hukum atau yudikatif penghasilan dan fasilitasnya harus senilai ini. Alasannya menjadi pejabat negara adalah pekerjaan yang sangat berat coba berat mana dengan pekerjaan Para founding fathers dulu.

Sikap kurang turis ini kemudian meluas menjadi hipokrasi umum yang berupa rendahnya disiplin dan kepatuhan terhadap hukum dan sikap Masa bodoх terhadap kepentingan bersama. Dalam kondisi yang lebih buruk lagi kepentingan kedaerahan kelompok dan golongan telah meluncurkan cita-cita bersama sebagai bangsa. Salah satu contoh konkretnya sebagian besar anggota legislatif yang terpilih pada pemilu 2009 sudah mangkir dari sidang sehingga membuat rapat tidak bisa dilaksanakan lantaran tidak tercapainya kuorum.

Sang Guru Bangsal Ki Hajar Dewantara telah menggariskan bahwa Ing Ngarsa Sung tuladha di depan beri suri teladan Kalau yang di depan negeri ini memberi suri teladan seperti itu tadi Maka jangan heran kalau yang ditingkatkan rumput banyak psikopat. Terlebih kalau kita memandang Bagaimana peredaran narkoba di negeri ini yang jelas selain telah merusak kepribadian dan moral bangsa juga telah membuat suara masa depan generasi penerus bangsa. Di dalam kehidupan pendidikan pun banyak bertebaran sekolah praktis yang dengan begitu

instan mencetak gelar akademis mulai dari gelar sarjana Master hingga dokter sehingga karakter yang bertumbuh kembang adalah instan dan pragmatis pula.

Dengan adanya globalisasi intensitas Hubungan Masyarakat antar negara sangat longgar sehingga rentan sekali mempengaruhi nilai-nilai budaya bangsa sehingga krisis akhlak dan moral bertambah akut dan meluas. Memang di satu sisi kita tidak patut untuk menutup diri dari globalisasi dengan segala keuntungan seperti dalam putaran ilmu teknologi dan informasi dunia namun di sisi lain kita harus mempertahankan karakter kita sebagaimana yang telah dirumuskan dalam filosofi grondslag bangsa kita.

Dalam menghadapi ancaman negatif globalisasi itu sudah semestinya bangsa Indonesia mulai dari elit sampai kerakyatannya untuk mau kembali memposisikan dirinya kepada sifat aslinya agar tidak gampang untuk diintervensi oleh negara lain dan tidak dikatakan sebagai bangsa yang tidak memiliki prinsip dan tersesat dalam arus lautan globalisasi.

Sifat asli itu terletak pada hati bukan pada tampilan luar Namun apabila kita memandang arah pembangunan negara kita begitu terlihat yang dikedepankan adalah pembangunan fisik dan ekonomi bukan pembangunan jiwa pada lagu Indonesia Raya telah mengamanatkan untuk membangun jiwa terlebih dahulu baru kemudian badan. Padahal tolak ukur kemajuan suatu bangsa tidak hanya dilihat dari kecanggihan teknologi ataupun pembangunan fisik yang semata akan tetapi yang terpenting pada semangat sesungguhnya untuk bekerja bagi bangsa dan bekerja baik secara keras secara cerdas dan secara ikhlas.

Identitas nasional Indonesia dapat dirumuskan pembinaannya dalam tiga bidang sebagai berikut:

1. Identitas fundamental yakni Pancasila sebagai filsafat bangsa, hukum dasar, pandangan hidup, etika politik, paradigma pembangunan.
2. Identitas instrumental yang meliputi undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Garuda Pancasila sebagai lambang negara sang saka merah putih sebagai bendera negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.
3. Identitas alami yang meliputi Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemajemukan terhadap sukunya budayanya dan agamanya.

Pancasila sebagai situasi kejiwaan dan karakter bangsa Indonesia yang mengandung kesadaran cita-cita hukum dasar pandangan hidup telah menjadi nilai asas norma bagi sikap tindak bagi Penguasa dan rakyat Indonesia. Satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila ini hendaknya dibudidayakan dalam kehidupan anak bangsa di seluruh penjuru nusantara

Indonesia mulai dari diri sendiri dan mulai hari ini yang kemudian diteruskan ke lingkungan keluarga lalu dapat meluas ke lingkungan masyarakat yang selanjutnya dapat tercermin ke lingkungan bangsa dan negara.

Dengan begitu kita akan berkarakter dan berjati diri sebagai bangsa dan negara yang beradab dan bermaslahatan di muka bumi menjadi bangsa dan negara yang bermartabat yang menjadi rahmat serta penuh kasih bagi seluruh rakyat Indonesia bagi lingkungan lainnya maupun bagi dunia internasional sebagai mana yang telah diletakkan dasarnya oleh para pendiri negara kita.

Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia dalam bersikap tindak undang-undang 1945 dalam eksistensinya telah mengadakan pembagian tugas bagi pihak-pihak yang terkait dalam sistem politik Indonesia dan sekaligus pula adalah memberikan pembatasan pembatasan terhadap kekuasaan itu serta juga telah menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Bahasa negara ialah bahasa Indonesia pasal 36 undang-undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan berasal dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu yang akhirnya menjadi Bahasa persatuan Hal ini karena memang bahasa Melayu jauh dari sebelum Indonesia merdeka telah digunakan sebagai bahasa dalam interaksi antar suku yang tersebar di seluruh kepulauan dan nusantara dan telah pula menjadi bahasa Niaga yang menghubungkan antar pedagang yang Berniaga di sepanjang gugusan kepulauan nusantara. Keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini bukan berarti menenggelamkan bahasa-bahasa daerah Indonesia yang jumlahnya tidak kurang dari 300-an dialek bahasa daerah. Bahasa bahasa daerah tetap dipelihara sebagai kearifan lokal dan bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatunya.

Lambang negara ialah Garuda Pancasila sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika pasal 36 amandemen kedua undang-undang Dasar 1945. Garuda Pancasila sebagai lambang negara bangsa Indonesia melambangkan kemegahan negara Indonesia. Adapun bentuk gambar lambang Garuda Pancasila Ini adalah sebuah karya anak bangsa yang Sultan Hamid 2 dari Kesultanan Pontianak.

Seekor Garuda yang berdiri tegak yang kepalanya menghadap ke kanan dengan mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Pada saat kanan dan sekiranya berelar 17 helai dengan Ekor berelar 8 helai dan leher yang berelar 45 helai yang menunjuk kepada waktu yang kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu 17 bulan 8 1945. Pada datanya digantung sebuah perisai yang dibagi sebuah perisai yang menjadi 5 ruang di tengah dan 4 di tepi. * Cemerlang atas dasar hitam merupakan Sinar Cemerlang Abadi dari ketuhanan yang maha esa rantai yang

terdiri dari pada gelang-gelang persegi dan bundar yang bersambung satu sama lain dalam sambungan yang tiada putusnya adalah lambang peri kemanusiaan pohon beringin adalah lambang kebangsaan banteng merupakan lambang kedaulatan rakyat dan padi dan kapas adalah lambang kecukupan.

Kaki burung mencengkeram sebuah pita yang sedikit melengkung ke atas pada pita itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa sebagai semboyan negara kita.

Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih pasal 35 undang-undang 1945 bendera sang merah putih bukan hanya sebagai simbol keindahan belaka akan tetapi lebih jauh dari situ merah putih adalah cerminan jiwa bangsa Indonesia dengan semangat yang memerah dan dilandasi dengan hati yang putih.

Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya pasal 36b amandemen kedua undang-undang Dasar 1945 lagu kebangsaan Indonesia Raya 2 Karya Wage Rudolf Supratman ini begitu menggambarkan semangat cinta tanah air dan kegagahan serta kebenaran lagu Ini pertama kali diperdengarkan dalam forum resmi yakni pada saat sebelum Kongres Pemuda 2 yang merumuskan Sumpah Pemuda ditutup pada tanggal 28 Oktober 1928 pada peristiwa itu lagu Indonesia Raya dimainkan dengan biola tanpa syair lagu tersebut disambut dengan tetesan air mata dan Gelora Demi Indonesia merdeka.

Indonesia adalah bangsa yang agamis agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia yakni agama Islam Kristen Katolik Kristen Protestan Hindu Budha dan sejak masa pemerintahan Abdurrahman Wahid agama Khonghucu diakui oleh pemerintah sebagai agama setelah istilah agama resmi dihapuskan.

Indonesia adalah bangsa yang berbudaya yang terbukti dari keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia kebudayaan nasional adalah sebagai puncak dari kebudayaan kebudayaan daerah yang menyatu dalam semangat nasionalisme serta dijaga dengan nilai kebersamaan dan saling menghormati.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang letak geografisnya sangat strategis dan dilalui garis khatulistiwa dilimpah dengan kekayaan alam yang melimpah ruah dihuni oleh berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah memeluk dan meyakini berbagai agama harus dipandang sebagai satu kesatuan politik sosial ekonomi dan pertahanan keamanan dalam satu kesatuan bangsa yang utuh.

E. Identitas Nasional dan Integrasi Nasional

Integrasi nasional merupakan interaksi utuh segenap suku-suku bangsa di seluruh penjuru nusantara. Penyatuan paduan secara utuh Ini pertama kali telah diikrarkan bangsa

Indonesia melalui Sumpah Pemuda yang kemudian mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 Indonesia sejak 1945 telah membuktikan kepada dunia walaupun terdiri dari berbagai suku dan wilayah kepulauan terbesar-pisah oleh lautan tapi Indonesia tetaplah Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh sebagai negara.

Adapun yang menjadi perekat bangsa Indonesia sehingga tetap bertahan sampai dengan saat ini tidak lain besar pengaruhnya karena ditunjang oleh identitas nasional memang memiliki karakter yang dalam Pancasila telah terbukti berperan sebagai pandangan hidup yang satu bagi bangsa Indonesia dalam bentuk kesadaran cita-cita moral cita-cita hukum dengan suatu kejiwaan nasionalisme Indonesia.

Undang-undang Dasar 1945 amandemen pertama kedua ketiga dan keempat juga telah memberikan pedoman atau patokan yang satu bagi sikap tindak segenap bangsa Indonesia begitupun juga dengan apa yang dialami oleh bangsa bahasa Indonesia bahasa Indonesia telah menjadi sarana Interaksi yang satu bagi segenap bangsa Indonesia demikian juga terhadap Garuda Pancasila sebagai lambang negara sang saka merah putih sebagai bendera negara dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan telah menjadi simbol kejiwaan yang satu bagi bangsa Indonesia.

Sebaliknya identitas nasional juga sangat mengharapkan bentuk integrasi nasional yang kokoh dalam menopang kekuningan integrasi nasional membutuhkan kekuatan dari integrasi sosial dan integrasi kebudayaan integrasi sosial merupakan upaya untuk menyatupadukan masyarakat yang beraneka ragam berlainan latar belakangnya dan masing-masing memiliki jati diri dari sukunya menjadi suatu masyarakat baru dan besar yang saling berasimilasi sementara integrasi kebudayaan merupakan sarana asimilasi budaya atau penyesuaian antar budaya sehingga dapat menjadi suatu sistem budaya yang selaras.

Dari cerminan kedua bentuk integrasi penyokong keberadaan integrasi nasional itu maka dapat dirumuskan bahwa hanya integrasi nasional merupakan penyatuan bagian-bagian yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh dengan tetap memelihara keanekaragaman dan kearifan kearifan budaya lokal dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksistensitas nasional sangat ditentukan oleh kekuatan integrasi nasional sementara integrasi nasional memerlukan identitas nasional sebagai sarana rekayasa sosial dan politik dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang diinginkan.

Selain itu identitas nasional tidak akan memberikan kekuatan kepada integrasi nasional apabila kesadaran masyarakat yang sangat rendah. Driyarkara setelah merumuskan bahwa kesadaran itu adalah seperti panggilan yang timbul dari aku tetapi mengatasi diriku.

Kesadaran terhadap identitas nasional pada hakikatnya merupakan kesadaran tentang diri kita sendiri di dalam mana kita melihat diri kita sendiri berhadapan dengan bangsa kita sendiri orang yang memiliki kesadaran berarti orang tersebut yakin akan cita-cita kebaikan yang setinggi-tingginya keyakinan itulah yang menjadi tempat bagi jalinan nilai-nilai bergumal dalam benak dan Sanubari manusia orang yang mengalami dan merasakan keyakinan bahwa suatu perbuatan yang konkret harus dilakukan atau sama sekali tidak boleh dilakukan. Maka kesadaran terhadap identitas nasional pada hakikatnya merupakan keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang identitas bangsanya yang pernah ada yang ada dan yang akan ada. Selain itu jalinan nilai-nilai dalam diri manusia itu merupakan refleksi terhadap akibat dari proses interaksi sosial yang kontinu dan dinamis dalam rangka memilih arah dalam kehidupan nasional.

Dalam situasi yang konkret kesadaran terhadap identitas nasional akan menjelma dalam bentuk kepatuhan atau ketiaatan terhadap identitas bangsa sendiri. Kepatuhan terhadap identitas bangsa sendiri begitu bergantung pada pertumbuhan akal kemauan dan rasa seseorang pada orang yang sadar terhadap identitas nasionalnya karena takut ada yang sadar terhadap identitas nasional yang demi kesiapan hidup bersama ada yang karena sesuai dengan cita-citanya Ada pula yang karena kepentingan namun pada akhirnya konsekuensi psikologis dari adanya kesadaran moral atas identitas nasional ini bahwa kesadaran itu menggugah timbulnya rasa kebangsaan.

Dengan kesadaran seperti itu maka secara konkret dapat dilakukan upaya-upaya kreativitas bangsa dalam tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Dengan berupaya mengimplementasikan rangsa kebangsaan kita yang berwujud nasionalisme atau pengabdian secara total kepada manusia misalnya dengan membudayakan penggunaan bahasa Indonesia mempublikasikan pertunjukan pertunjukan seni budaya bangsa melalui media-media ataupun dengan menggunakan produk hasil karya anak bangsa.
2. Dengan memodifikasi kebudayaan Indonesia menjadi sesuatu yang menarik.
3. Dengan bersikap selektif dalam menerima pengaruh globalisasi yang masuk ke dalam negara Indonesia.

BAB 25 **DEMOKRASI INDONESIA**

A. Demokrasi Indonesia

1. Pengertian demokrasi

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos artinya rakyat” dan “kratos atau kratein artinya kekuasaan atau berkuasa”. Demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau rakyat berkuasa.

Demokrasi yang dianut Indonesia berdasarkan pancasila. Demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 ialah demokrasi konstitusionil. Corak khas demokrasi Indonesia salah satunya terdapat pada pancasila sila ke-5 yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Demokrasi konstitusionil berbeda dengan demokrasi Marxisme-Leninisme. Demokrasi konstitusionil mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya atau negara hukum. Sedangkan komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya dan bersifat totaliter.

Penyebutan akan istilah demokrasi pada mulanya berangkat dari bahasa Yunani yaitu istilah demokratis yang merupakan gabungan dari kata demos yang artinya rakyat dan Kratos yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Dari gabungan atas dua pemakna tersebut maka dapat diterjemahkan bahwa Demokrasi adalah kedaulatan rakyat.

Adapun kedaulatan rakyat yang dimaksud dalam kehidupan bernegara tersebut adalah untuk menunjuk kepada sistem penyelenggaraan sistem pemerintah yang dilaksanakan bersama rakyat dengan demikian pada negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan pemerintahan yang terbatas dan pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya.

Menurut Henry B mayo demokrasi sebagai sistem politik ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip persamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik

Adapun hakikat dari demokrasi sebagaimana kita pahami terdapat pada makna pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat. Hakikat makna yang terkandung pada government of the people adalah untuk menunjuk bahwa dalam negara demokrasi keabsahan atau legitimasi terhadap Siapa yang memerintah berasal dari kehendak rakyat. Sementara makna yang dapat diungkap dari government by people yakni bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan pemerintah prosesnya diawasi

oleh rakyat. Sedangkan untuk government for people terkandung makna bahwa dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan oleh pemerintah adalah harus dilangsungkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

2. Demokrasi konstitusionil

Ciri khas demokrasi konstitusionil ialah pemerintah berdasarkan konstitusi. Pemerintah terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil.

- a. Menurut Henry B. Mayor demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yaitu:
- b. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
- c. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- d. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- e. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
- f. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat, tingkah laku dan kepentingan dalam masyarakat.
- g. Menjamin tegaknya keadilan.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi tersebut, maka penyelenggaraan lembaga harus:

- a. Pemerintahan yang bertanggungjawab.
- b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk satu kursi. Dewan perwakilan ini mengadakan pengawasan dan memungkinkan penilaian terhadap kebijaksanaan pemerintah secara kontinu.
- c. Suatu organisasi politik mencakup satu atau lebih partai politik.
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

3. Asas demokrasi melahirkan sistem presidensial, parlementer, referendum

Asas demokrasi yang hampir sepenuhnya disepakati sebagai model terbaik bagi dasar penyelenggaraan negara ternyata memberikan implikasi yang berbeda di antara pemakai-pemakainya bagi peranan negara. Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan, demokrasi melahirkan sistem yang bermacam-macam, yaitu:

- a. Sistem presidensial yang menyejajarkan antara parlemen dan presiden dengan memberi dua kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
- b. Sistem parlementer yang meletakkan pemerintah dipimpin oleh perdana menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan bukan kepala negara, sebab kepala negara bisa diduduki oleh raja atau presiden yang hanya menjadi simbol kedaulatan dan persatuan.
- c. Sistem referendum yang meletakkan pemerintah sebagai bagian dari parlemen. Di beberapa negara ada yang menggunakan sistem campuran antara presidensial dan parlementer seperti Perancis dan Indonesia.

Demokrasi berarti pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Henry B. Mayo bahwa sistem politik demokratis ialah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

4. Bentuk-bentuk demokrasi

Menurut Torres demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

- a. *Formal democracy* menunjukkan pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan.
- b. *Substantive democracy* yaitu menunjukkan pada proses bagaimana demokrasi itu dilakukan.

Formal democracy dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi itu di berbagai negara. Dalam suatu negara misalnya dapat menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer.

Selain bentuk demokrasi sebagaimana dipahami di atas terdapat beberapa sistem demokrasi yang mendasarkan pada prinsip filosofi negara.

- a. Demokrasi perwakilan liberal

Pada bentuk ini, kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Individu dalam suatu negara partisipasinya disalurkan melalui wakil-wakil yang dipilih melalui proses demokrasi. Menurut Held bahwa demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Yang perlu disadari dari prinsip demokrasi ini ialah bahwa apapun yang dikembangkan melalui kelembagaan negara senantiasa merupakan suatu manifestasi

perlindungan serta jaminan atas kebebasan individu dalam hidup bernegara. Konsekuensi prinsip demokrasi ini ialah berkembang persaingan bebas, terutama dalam kehidupan ekonomi sehingga individu yang tidak mampu menghadapi persaingan tersebut akan tenggalam. Kekuasaan kapitalisme menguasai negara.

b. Demokrasi satu partai dan komunis

Demokrasi ini lazimnya dilaksanakan di negara-negara komunis seperti Rusia, Cina, Vietnam, dan lainnya. Menurut sistem demokrasi ini masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Komunitas yang terkecil mengatur urusan mereka sendiri yang akan memilih wakil-wakil untuk unit-unit administratif yang besar misalnya distrik atau kota. Unit-unit yang lebih besar akan memilih calon-calon administratif yang lebih besar atau delegasi nasional. Semua delegasi bisa ditarik kembali oleh perintah-perintah dari distrik pemilihan mereka dan diorganisasikan dalam suatu piramida komite-komite yang dipilih secara langsung. Oleh karena itu, menurut komunis negara post kapitalis tidak akan melahirkan kemiripan apapun dengan rezim liberal yakni rezim parlementer. Semua perwakilan atau agen negara dimasukkan ke dalam lingkungan seperangkat institusi-institusi tunggal yang bertanggungjawab secara langsung.

Menurut pandangan kaum Marxis-Leninis sistem demokrasi delegatif harus dilengkapi dengan suatu sistem terpisah tetapi sama pada tingkat partai komunis. Transisi menuju sosialisme dan komunisme memerlukan kepemimpinan yang profesional dari kader-kader revolusioner yang disiplin. Partai evolusioner merupakan hal yang esensial, sebagai instrumen yang bisa menciptakan landasan bagi sosialisme dan komunisme.

5. Demokrasi di Indonesia

a. Perkembangan demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi empat periode, yaitu:

- 1) Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominan partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama akan menjadi kondor.
- 2) Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden,

terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin luas.

- 3) Periode 1966-1998 masa demokrasi pancasila era orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini ialah pancasila, UUD 1945, dan ketetapan MPRS/ MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktis demokrasi pada masa ini, nama pancasila digunakan sebagai legitimasi politis penguasa saat ini, sebab kenyatannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
- 4) Periode 1999-sekarang, masa demokrasi pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memberi nafas baru. Jika esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktik demokrasi tatkala pemilu memang demikian, namun setelah pemilu banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Model demokrasi era refosmasi ini kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Pengertian Demokrasi menurut UUD 1945

1) Seminar Angkatan Darat II (Agustus 1966)

(a) Bidang politik dan konstitusional

Demokrasi Indonesia seperti yang dimaksud dalam UUD 1945 berarti menegakkan kembali asas-asas negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif maupun dalam aspek perseorangan dijamin, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional.

(b) Bidang Ekonomi

(1) Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara.

(2) Koperasi

(3) Pengakuan atas hak milik perseorangan dan kepastian hukum dalam penggunaanya.

(4) Peranan pemerintah yang bersifat pembinaan , penunjuk jalan serta pelindung.

2) Munas III Persahi: The Rule of Law 9Desember 1966)

Asas negara hukum pancasila mengandung prinsip:

a) Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultur dan pendidikan.

b) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh suatu kekuasaan, atau kekuatan lain apapun.

c) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan.

3) Simposium Hak-Hak Asasi Manusia (Juni 1967)

a) Adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan.

b) Adanya kebebasan yang sebasr-besarnya.

c) Perlunya untuk membina perkembangan ekonomi secara cepat.

c. Demokrasi Pasca Reformasi

Dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi harus berdasarkan pada suatu kedaulatan rakyat, baik penyelenggaraan maupun pemerintahan. Atau disebut juga pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Prinsip pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi: maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkadaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, prinsip demokrasi juga terdapat pada sila ke-4 yaitu dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

UUD 1945 pasal 1 ayat 2 berbunyi: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. UUD 1945 hasil amandeman dengan mewujudkan sistem penentuan kekuasaan pemerintahan negara secara langsung yaitu melibatkan rakyat secara langsung dalam memilih presiden dan wakil presiden (pasl 6A ayat 1).

Sistem demokrasi dalam penyelenggaraan negara Indonesia juga diwujudkan dalam penentuan kekuasaan negara, yaitu dengan menentukan dan memisahkan

tentang kekuasaan eksekutif (pasal 4-16), legislatif (pasal 19-22), dan yudikatif (pasal 24 UUD 1945).

B. Norma-Norma yang Mendasari Demokrasi

Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi itu harus selalu didasari oleh beberapa norma Yakni dengan:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
5. Mengakui serta menganggap secara wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat kepentingan serta tingkah laku
6. Menjamin tegaknya keadilan

Sementara menurut nurcholas Majid Yang menjadi pandangan hidup demokrasi haruslah didasari atas tujuh norma sebagai berikut:

1. Kesadaran atas pluralisme

Masyarakat sudah dapat memandang secara positif kemajemukan dan keberagaman dalam masyarakat serta telah mampu mengelaborasikan ke dalam sikap tindak secara kreatif

2. Musyawarah

Korelasi prinsip ini adalah kedewasaan untuk menerima bentuk-bentuk kompromi dengan bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat mendengarkan pendapat orang lain menerima perbedaan pendapat dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik.

3. Pemufakatan yang jujur dan sehat

Prinsip masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai pemfakatan yang juga jujur dan sehat bukannya permufakatan yang dicapai melalui intrik-intrik yang curang tidak sehat atau sifatnya yang melalui konspirasi.

4. Kerjasama

Prinsip kerjasama antar warga dalam masyarakat dan Sikap saling mempercayai tingkat baik masing-masing kemudian jalin dan mendukung mendukung sejarah fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi.

5. Pemenuhan segi-segi ekonomi

Untuk mendukung hadirnya situasi demokrasi dalam masyarakat sangat perlu memperhatikan pemenuhan segi-segi ekonominya terutama pemenuhan terhadap keperluan pokok yaitu pangan sandang dan papan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi harus pula mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial seperti masalah Mengapa kita makan nasi, bersandangan sarung kopiah kebaya serta berpapan kan rumah joglo yang dalam pembunuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial budaya.

6. Pertimbangan moral

Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara berdemokrasi haruslah sejalan dengan tujuan bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik haruslah dipaksakan oleh kebaikan Cara yang ditempuh untuk meraihnya.

7. Sistem pendidikan yang menunjang

Pendidikan demokrasi selama ini pada umumnya masih terbatas pada usaha indoktrinasi dan penyuapan konsep-konsep secara verbalistik. Terjadinya diskripsi atau jurang pemisah antara dosen dan Dalil solllen dalam konteks ini ialah akibat dari kuatnya budaya menggurui dalam masyarakat kita sehingga verbalisme yang dihasilkannya juga menghasilkan kepuasan tersendiri dan memuat yang bersangkutan merasa telah berbuat sesuatu dalam penegakan Demokrasi hanya karena telah berbicara tanpa perilaku.

C. Komponen-Komponen Penegak Demokrasi

Tegaknya demokrasi suatu negara sangat bergantung pada komponen-komponen sebagai berikut:

1. Negara hukum

Demokrasi suatu negara dapat berdiri kalau negaranya adalah negara hukum yakni sebagai negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan sekaligus juga terdapat jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

2. Pemerintahan yang good governance

Berdirinya suatu demokrasi sangat perlu ditopang oleh bentuk pemerintahan yang good governance yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat dalam sasaran demokratis akuntabel serta transparan.

3. Badan pemegang kekuasaan legislatif

Badan pemegang kekuasaan legislatif yang dapat menopang tegaknya demokrasi suatu negara adalah badan pemegang kekuasaan legislatif yang diisi oleh orang-orang yang memang memiliki Civic skill yang Solid dan tinggi sebagai contoh DPR RI yang memiliki fungsi

membuat undang-undang fungsi pengawasan dan fungsi anggaran maka para anggota-anggotanya memang memiliki Civic skill dalam ketiga bidang tersebut.

4. Peradilan yang bebas dan mandiri

Peran dunia peradilan dalam kaitannya dengan demokrasi juga berada pada peran yang Sentral. Adapun corak dunia peradilan yang dapat menopang tegaknya demokrasi suatu negara adalah peradilan yang bebas dalam artian tidak berada atau tidak terpengaruh dengan tekanan dan kepentingan selain daripada itu juga harus mandiri dalam artian tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

5. Masyarakat madani

Masyarakat madani didirikan dengan masyarakat yang terbuka masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat penting dalam membangun demokrasi sebab Salah satu syarat penting bagi Demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan.

6. Pers yang bebas dan bertanggung jawab

Berkembangnya demokrasi suatu negara sangat perlu dilakukan oleh pers yang memang tidak berada di bawah tekanan penguasa atau pihak manapun yang dalam pemberitaannya senantiasa dilandasi dengan rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Infrastruktur politik

Infrastruktur politik terdiri dari partai politik dan kelompok gerakan menurut Miriam Budiardjo partai politik mengemban fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik sebagai sarana rekrutmen kader dan sebagai sarana pengatur konflik. Gambar fungsi partai politik tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai demokrasi yaitu adanya partisipasi kontrol rakyat melalui partai politik terhadap kehidupan kenegaraan dan pemerintahan Serta adanya pelatihan penyelesaian konflik secara damai. Begitu pula aktivitas yang dilakukan oleh kelompok gerakan dan kelompok penekan yang merupakan perwujudan adanya kebebasan berorganisasi kebebasan menyampaikan pendapat dan melakukan oposisi terhadap negara dan pemerintah. Hal ini merupakan indikator bagi tegaknya sebuah demokrasi.

D. Model-Model Demokrasi

Jika dipandang orientasinya demokrasi dapat dibedakan atas demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan demokrasi sosial. Demokrasi liberal merupakan demokrasi yang begitu menjunjung tinggi kebebasan dan individualisme sementara demokrasi terpimpin ialah

demokrasi yang dipimpin oleh pimpinan negara di mana pemimpin negara tersebut beranggapan bahwa rakyatnya telah mempercayakan kepadanya untuk memimpin demokrasi di negaranya sedangkan demokrasi sosial adalah demokrasi yang begitu menarik kepedulian besar terhadap keadilan sosial dan egitarian.

Sementara kalau dipandang dari mekanisme pelaksanaannya demokrasi dapat dibedakan atas demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung dicirikan dengan penempatan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung sedangkan kalau demokrasi tidak langsung mekanisme penempatan kedaulatan rakyatnya diwakilkan kepada lembaga perwakilan negara tersebut.

E. Demokrasi Indonesia

Dalam psikologis nasional kita selalu hendak berdiri di atas dasar kekeluargaan di atas dasar musyawarah dan di atas dasar yang namanya demokrasi. Demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Tidak perlu identik artinya sama dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain pesan Bung Karno Janganlah demokrasi kita yaitu demokrasi ciplakan.

Menurut Soekarno dan Hatta demokrasi yang diinginkan negara Indonesia yang pada waktu itu sedang diperjuangkan kemerdekaannya yakni bukan demokrasi liberal yang biasanya memihak golongan yang kuat sosial ekonominya. Selain itu Bung Karno menegaskan bahwa negara Indonesia tidak didirikan sebagai tempat merajalelanya kaum kapitalis sehingga kesejahteraan hanya terpusat pada segelintir golongan tertentu. Indonesia didirikan untuk menjamin meratanya kesejahteraan seluruh rakyatnya. Negara ini didirikan juga untuk mewujudkan mewujudkan terjadinya hak sosial warga negara dan tercapainya suatu demokrasi ekonomi. Sebagaimana penegasan Bung Karno bahwa:

Saudara-saudara saya usulkan kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat tetapi permusyawaratan yang memberi hidup yakni yang mampu mendatangkan Kesejahteraan Sosial.

Hatta bukan hanya membayangkan rakyat yang berdaulat tetapi juga rakyat yang bertanggung jawab yaitu tanggung jawab untuk menjaga kehidupan bersama.

Demokrasi Indonesia merupakan suatu bentuk demokrasi yang utuh bagi Indonesia yaitu demokrasi bidang politik dan ekonomi yang tidak mengandung paham individualisme. Demokrasi yang utuh bagi Indonesia diartikan pula oleh Bung Karno sebagai demokrasi yang disesuaikan dengan tradisi masyarakat asli Indonesia yakni demokrasi yang menjunjung nilai kebersamaan dan kekeluargaan.

Sifat demokrasi masyarakat asli Indonesia bersumber dari semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang hidup dalam hati Sanubari setiap anggota masyarakat asli ini di mana kehidupan seseorang dianggap sebagai bagian dari kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Manifestasi dari ciri kebersamaan dan kekeluargaan ini adalah tradisi melaksanakan rapat atau musyawarah untuk mengatasi suatu permasalahan yang diikuti dengan pengambilan keputusan secara mufakat. Selain itu juga di manifestasikan dalam bentuk tradisi tolong-menolong dalam menjalani kehidupan sehari-hari kebiasaan melakukan protes terhadap kebijakan penguasa yang dianggap tidak adil dan kebiasaan menyingkir dari wilayah kekuasaan penguasa yang dianggap lalin semua ciri kehidupan masyarakat asli indonesia tersebut dijadikan seni untuk mengembangkan tatanan demokrasi dalam Indonesia merdeka.

Menurut Harjono dalam konteks kedaulatan rakyat ini ada dua hal yang harus dibedakan kedaulatan yang masih berada di tangan rakyat dan kedaulatan yang telah dilimpahkan kepada atau dilaksanakan dalam kerangka undang-undang dasar. Sebagai sebuah potensi kedaulatan ada ditangan rakyat masih tetap eksis dalam genggaman rakyat Seraya kedaulatan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara maka lembaga-lembaga negara tersebut tidak boleh melaksanakan kedaulatan rakyat itu tanpa batas. Batas-batasnya ditentukan oleh undang-undang Dasar dengan demikian demokrasi berjalan berdasarkan atas hukum. Selain itu terdapat dimensi lain dari kedaulatan rakyat dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 amandemen ketiga undang-undang Dasar 1945 mengacu pada ketentuan tersebut Dikenal dua macam kedaulatan pertama kedaulatan langsung di mana rakyat melakukan secara langsung kedaulatannya kedua kedaulatan yang dilakukan oleh badan-badan perwakilan.

Terkait kedaulatan langsung dalam undang-undang Dasar 1945 diatur soal pemilihan umum atau Pemilu pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung dalam Pemilu rakyat memilih anggota DPR atau DPRD DPD dan juga presiden dan wakil presiden setelah melaksanakan secara langsung proses berikutnya menurut konstitusi kedaulatan dilakukan oleh badan perwakilan.

Sementara bila dihubungkan dengan filsafat bangsa Indonesia pada hakikatnya demokrasi Indonesia yaitu merupakan demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang terkandung pada Pancasila sebagai dasar negara hal itu berarti bahwa hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan hakikat dan martabat manusia haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa dan haruslah pula dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

F. Undang-undang Dasar 1945

Amran (2016:97), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 bersama dengan UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan berlakunya Pembukaan UUD 1945 maka Berhentilah tertib hukum yang lama dan timbulnya tertib hukum Indonesia.

Tertib hukum merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang memenuhi 4 syarat yaitu:

1. Ada kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum
2. Adanya kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu
3. Ada kesatuan waktu dalam mana peraturan itu berlaku
4. Ada kesatuan daerah dalam mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku

Menurut adonan Pembukaan UUD 1945 telah memenuhi syarat terhadap adanya tertib hukum Indonesia dalam alinea ke-4. Pembukaan UUD 1945 termuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum isyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia yaitu suatu kebulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Syarat-syarat tertib hukum tersebut meliputi 4 yaitu:

1. Adanya kesatuan subjek yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintah negara Republik Indonesia
2. Adanya kesatuan asas kerohanian sebagai dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya dasar-dasar filsafat negara Pancasila
3. Adanya kesatuan objek tempat peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Hal ini terpenuhi dengan adanya kalimat seluruh tumpah darah Indonesia.
4. Adanya kesatuan daerah tempat peraturan-peraturan itu berlaku. Hal ini terpenuhi dengan adanya kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia.

Kedudukan pembukaan UUD 1945 memiliki dua aspek diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia
2. Memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi

Seperti telah disebutkan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib

hukum Indonesia dan berkedudukan sebagai asas bagi hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta peraturan-peraturan hukum yang lainnya yang lebih rendah.

Pokok kaidah negara yang fundamental menurut ilmu hukum tata negara memiliki berapa unsur mutlak antara lain:

1. Dari segi terjadinya

Ditentukan oleh pembentuk negara dan terjemah dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal tertentu sebagai dasar dasar negara yang dibentuk

2. Dari segi isinya

Ditinjau dari segi isinya maka Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut:

a. Dasar tujuan negara

Dasar tujuan negara terdiri atas tujuan khusus maupun tujuan umum. Tujuan khusus meliputi tujuan nasional bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan cerdas Sehingga nantinya tercipta suatu masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan khusus ini terdapat dalam kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan umum berkaitan dengan hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa lain dalam pergaulan masyarakat internasional. Tujuan umum merupakan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Tujuan umum ini tercakup dalam kalimat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

b. Ketentuan diadakannya undang-undang dasar negara

Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

c. Bentuk negara

Pernyataan ini tercantum dalam kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

d. Dasar filsafat negara atau asas kerohanian negara

Asas kerohanian yang terdapat dalam kalimat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

atau perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 Maka menurut ilmu hukum tata negara bahwa Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya nya telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.

Fungsi Pembukaan UUD 1945 secara lebih terinci dapat pula dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembukaan UUD 1945 merupakan suasana kebatinan dari UUD 1945. Adanya suasana kerohanian sebagaimana yang tercantum dalam empat pokok pikiran pembukaan UUD 1945 sebagai asas kerohanian negara merupakan sumber penjabaran secara normatif bagi UUD 1 negara Indonesia. Suasana kerohanian ini memberi arah bagi cita-cita hukum dari UUD 1945 beserta penjabarannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain.
2. Pembukaan UUD 1945 wujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara.
3. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber inspirasi bagi UUD 1945.

BAB 26 **GLOBALISASI**

Maulana (2018: 47-48), Menurut Setiawan globalisasi merupakan suatu proses dengan kejadian, keputusan dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi suatu konsekuensi yang signifikan bagi masyarakat di daerah yang. Globalisasi mendorong adanya perubahan yang terjadi dalam berapa bidang seperti politik ekonomi sosial budaya teknologi pertahanan keamanan lingkungan hidup dan pergaulan hidup. Berikut penjelasan secara rinci:

1. Politik meliputi perkembangan sistem demokrasi dan kerjasama antara negara menjadi berkembangnya suatu negara
2. Ekonomi ditandai dengan adanya perdagangan bebas yang menimbulkan barang tidak original lagi
3. Sosial meliputi berkembangnya interaksi sosial masyarakat baik dalam tatap muka maupun menggunakan aplikasi media sosial seperti Facebook dan lain-lain
4. Budaya ditandai dengan timbulnya seni yang inovatif baik dalam bahasa, tarian, nyanyian maupun kuliner yang dapat sebagai ciri khas suku-suku yang ada di Indonesia
5. Teknologi meliputi peningkatan penggunaan barang elektronik yang dijadikan sebagai alat untuk membantu manusia dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Tanpa adanya teknologi suatu negara tidak akan bisa bertahan lama.
6. Pertahanan dan keamanan ditandai dengan timbulnya ragam persenjataan militer
7. Lingkungan hidup ditandai dengan semakin berkurangnya tumbuh-tumbuhan disebabkan lebih diutamakan nya pembangunan gedung-gedung
8. Pergaulan hidup ditandai dengan merosotnya karakter yang dimiliki anak jaman sekarang atau lebih dikatakan abad 21. Pergaulan bebas yang semakin merajalela sehingga jarang diterapkannya sikap santun manusia.

Globalisasi diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal, masyarakat di seluruh dunia menjadi saling tergantung di semua aspek kehidupan politik ekonomi dan budaya. Masyarakat kini telah menunjukkan kenyataan yang sama sekali berbeda. Di bidang politik terdapat kesatuan super nasional dengan berbagai cakupan blok politik dan militer, koalisi kekuasaan dominan, organisasi kesehatan regional, organisasi berskala internasional. Di bidang ekonomi terlihat peningkatan peran koordinasi dan integrasi super nasional,

perjanjian kerjasama ekonomi regional dan dunia, pembagian kerja dunia, peningkatan peran kerjasama multinasional dan sebagainya.

Globalisasi dapat didefinisikan sebagai penyebaran kebiasaan-kebiasaan yang mendunia, ekspansi hubungan yang melintasi benua organisasi kehidupan sosial pada skala global dan pertumbuhan sebuah kesadaran global bersama. Gagasan mengenai globalisasi mencakup sejumlah proses transnasional yang dipisahkan satu sama lain walaupun mereka dapat dilihat sebagai sebuah hal yang mengglobal dalam capaian mereka. Globalisasi telah menjadi perhatian besar bagi kalangan pebisnis khususnya dengan kemunculan pasar-pasar global dan berbagai teknologi yang menyertainya.¹

Kita dapat menyaksikan berjalannya globalisasi di setiap tempat. Dari bank dunia dan PBB hingga *Greenpeace* dan Disneyland, dari marathon internasional dan konser global, hingga wisata umum dan internet kita dapat menjumpai orang-orang bergerak dalam jaringan tanpa dibatasi oleh ruang komunitas. Manusia membentuk jaringan ke seluruh dunia dan membulat wilayah lokal menjadi global dan wilayah Global menjadi lokal.²

Masyarakat di dunia dari aspek budayanya terlihat kemajuan keseragaman. Media massa terutama televisi mengubah dunia menjadi sebuah dusun global. Informasi dan gambar peristiwa yang terjadi di tempat yang sangat jauh dapat ditonton jutaan orang pada waktu bersamaan. Menurut Giddens globalisasi berkaitan dengan tesis bahwa kita semua hidup dalam satu dunia. Mengenai hal tersebut terdapat dua pandangan mengenai globalisasi:

- a. Kaum skeptis yang menganggap bahwa semua hal yang dibicarakan mengenai globalisasi adalah omong kosong. Apapun manfaat cobaan dan kesengsaraan yang ditimbulkannya ekonomi global tidak begitu berbeda dengan yang pernah ada pada periode sebelumnya. Menurut kelompok ini banyak negara hanya memperoleh sedikit pendapatan dari hasil perdagangan luar negeri. Berbagai transaksi ekonomi lebih banyak berlangsung di tingkat regional daripada lingkup internasional.
- b. Kelompok radikal. Kaum radikal berpendapat bahwa globalisasi tidak hanya sangat real melainkan juga konsekuensinya dapat dirasakan di manapun. Banyak bangsa kehilangan sebagian kedaulatannya dan para politisi juga kehilangan sebagian besar kemampuannya untuk mempengaruhi dunia. Era negara bangsa berakhir. Bangsa bangsa menurut Kenichi telah menjadi sekedar rekaan. Menurut Giddens globalisasi tidak hanya baru melainkan juga revolusioner. Globalisasi terutama banyak dipengaruhi perkembangan sistem

¹ Nanang Martono, op.cit., h. g6.

² Nanang Martono, op.cit., h. g7.

komunikasi yang baru dimulai akhir 1960-an. Globalisasi tidak sekedar soal apa yang terjadi di luar sana terpisah dan jauh dari orang perorang. Namun globalisasi juga mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang intim dan pribadi.³

Globalisasi tidak berkembang secara adil dan tidak berarti semua konsekuensinya menguntungkan atau baik. Bagi kebanyakan negara di Eropa dan Amerika Utara globalisasi terkesan tidak menyenangkan seperti *westernisasi* atau bahkan *amerikanisasi* karena Amerika Serikat ini menjadi satu-satunya negara adidaya dengan posisi yang dominan di bidang ekonomi, budaya militer dan tatanan global. Negara barat dan industri pada umumnya masih mempunyai pengaruh yang besar terhadap persoalan dunia dibandingkan negara miskin. Namun globalisasi semakin menyebar bukan monopoli kelompok negara tertentu dampak globalisasi kemudian juga dirasakan di negara barat.⁴

Globalisasi telah menyatukan perhatian manusia pada suatu peristiwa secara serentak, setiap peristiwa di suatu tempat akan berdampak sangat luas pada peristiwa dari berbagai belahan dunia. Pada suatu waktu perhatian manusia tertuju pada pertandingan sepak bola dalam perbuatan Piala Dunia. Dalam satu waktu manusia di seluruh dunia bersoraklah gembira, berteriak, bertepuk tangan bersama untuk merayakan kemenangan tim kesayangannya, meskipun mereka berada di tempat berbeda. Mereka bersatu dan disatukan melalui produk modernisasi yaitu televisi yang mampu mengikat mereka dalam satu aktivitas menonton. Tidak hanya itu, misalnya peristiwa di New York pada 11 September 2001 merupakan salah satu kekuatan yang memiliki konsekuensi di tempat lain. Tidak hanya masyarakat yang memiliki kekuatan super namun ada kekuatan empiris yang mampu menjelajahi dunia dan kemudian mengendalikan manusia di seluruh bumi. Ada mobilitas masa objek dan limbah berbahaya dan berisiko misalnya kontaminasi nuklir, ancaman terorisme, dan virus sars dan flu burung, yang kemudian yang diketahui oleh sedikit masyarakat. Kekuatan manusia semakin meningkat dengan adanya hubungan yang semakin kompleks dengan objek material yang jarang ditanamkan dalam masyarakat tunggal. Ada miniaturisasi teknologi yang dihubungkan manusia seperti laptop dan handphone, transformasi biologi kepada kode-kode informasi genetik peningkatan skala dan jangkauan produk limbah serta beberapa virus perubahan teknologi, jalan kereta api dan pesawat yang memfasilitasi mobilitas secara cepat dan arus informasi dan komunikasi yang menekan perbedaan ruang dan waktu.⁵

³ Nanang Martono, op.cit., h. g7.

⁴ Nanang Martono, op.cit., h. g8.

⁵ Nanang Martono, op.cit., h. gg.

Untuk dapat menikmati ayam goreng ala kentucky ,kue donat ala Dunkin kita tidak perlu ke luar negeri karena Kentucky sudah dapat dinikmati di Indonesia bahkan sudah merambah di kota-kota kecil. Ritzer kemudian menjelaskan gejala globalisasi dengan beberapa konsep yaitu globalisasi versus globalisasi perkembangan kapitalisme seperti mcdonaldisasi dan Amerikanisasi. Globalisasi merupakan sebuah pandangan yang sangat modern yang menekankan kemampuan yang semakin meningkat di seluruh dunia dari organisasi-organisasi dan negara-negara modern yang sebagian bersifat kapitalistik untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menjangkau dunia.

BAB 27

HAK ASASI MANUSIA

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian HAM

Setiawan (2017: 122-132), hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Miriam Budiardjo hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh atau dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Adapun dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus peroleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

2. Sejarah perkembangan hak asasi manusia

Munculnya perjuangan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan reaksi terhadap kesewenangan kewenangan penguasa yang menginjak-injak harkat dan martabat manusia. Kekuasaan Absolut para raja dan kaisar yang menindas hak rakyat atau daerah pola kekuasaan imperialisme dan kolonialisme aneka diskriminasi. Adanya negara kuat dan lemah menuntut jaminan Hak asasi manusia dalam negara maupun secara internasional.

Perjuangan untuk membela hak asasi manusia sebelum abad masehi antara lain:

- a. Hukum hammurabi di Babilonia (2000 tahun SM), yang menetapkan adanya aturan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Hukum tersebut terkenal sebagai jaminan Hak hak asasi manusia.
- b. Salon (600 tahun SM) di Athena yang mengajarkan bahwa orang-orang yang berbeda karena tidak mampu melunasi utangnya harus dibebaskan.
- c. *Flavius anacius justinian* (Kaisar Romawi tahun 527 SM), merumuskan peraturan yang memuat jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia. Peraturan ini menjadi dasar dan pola sistem hukum modern di negara barat.
- d. Aristoteles yang mengajarkan bahwa pemerintahan harus berdasarkan atas kemauan dan cita-cita mayoritas warga negaranya. Perkembangan dan perjuangan tentang hak-hak asasi manusia pada masa sesudah masehi ternyata lebih tegas dan berpengaruh terhadap praktik kehidupan bernegara. Peristiwa atau dokumen yang sesudah abad masehi yang menunjukkan adanya jaminan Hak asasi manusia antara lain:
 - 1) Magna Charta

Lahirnya HAM di dunia oleh negara-negara modern dimulai dengan lahirnya Magna Charta atau piagam besar di Inggris pada tanggal 15 Juni tahun 1215. Pada mulanya piagam ini merupakan Perjanjian antara raja dan para Baron. Iya tidak ada hubungannya dengan HAM yang sesungguhnya. Baru setelah beberapa tahun 1315 parlemen Inggris menyetujui beberapa produk yang dikandung dalam magna Charta tersebut. Hak hidup seseorang tidak dapat dirampas, kebebasan dan perampasan tanah hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

2) *Declaration Des Droits de l'homme et du Citoyen*

Revolusi besar perancis pada tahun 1789 bertujuan membebaskan manusia warga negara Perancis dari kekuasaan mutlak dari seorang raja penguasa tunggal di Perancis pada waktu itu raja Louis XVI. Istilah yang dipakai pada waktu itu adalah droit de l'homme yang berarti hak manusia yang di dalam bahasa Inggris disebut human right dan mensen recthen dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan hak asasi manusia atau hak kemanusiaan. Dalam pernyataan ini dikemukakan semboyan kemerdekaan persamaan dan persaudaraan.

3) Abraham Lincoln

Menentang adanya perbedaan warna kulit agama dan jenis kelamin dalam pemerintahan

4) F.D Roosevelt

Menganjurkan untuk melaksanakan empat macam kebebasan yaitu:

- 1) Kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat
 - 2) Kebebasan memilih agama
 - 3) Kebebasan dari rasa takut
 - 4) Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan
- 5) Universal declaration of human right (10 Desember 1948)

Disahkan oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa pada bulan Desember 1948. Deklarasi ini merupakan tahap pertama dari tiga tahap program yang dirancang untuk menjadi sebuah International Bill of Rights, yang didasarkan atas kewajiban-kewajiban yang mengikat negara-negara secara universal dan diperkuat oleh perangkat kerja dewan dan administrasi yang efektif. Secara kronologis tiga tahapan itu adalah:

- a) Sebuah Deklarasi yang menetapkan bermacam-macam hak manusia yang harus dihormati.

- b) Serangkaian ketentuan covenant yang mengikat negara-negara untuk menghormati hak-hak yang telah ditetapkan tersebut.
 - c) Langkah-langkah dan perangkat kerja untuk pelaksanaannya
- 6) Tahun 1966 PBB secara aklamasi menyetujui dua perjanjian
- a) Perjanjian tentang hahaha ekonomi sosial dan budaya
 - b) Perjanjian tentang hak-hak sipil dan publik

Memasuki abad ke-21 kesadaran warga negara dan negara-negara di dunia akan hak asasi manusia dan pengakuannya serta perlindungannya mengalami p perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara di suatu negara terkadang menjadi salah satu syarat agar negara tersebut mendapat bantuan berupa hibah dan pinjaman lunak dari negara maju dan dari lembaga internasional seperti WHO, UNESCO, world bank dan sebagainya.

Dalam kehidupan sehari-hari ada kecenderungan setiap orang ingin diakui akan hak-haknya sebagai bagian dari komunitas yang baik di lingkungan keluarga sekolah masyarakat Bahkan dalam negara. Namun demikian tidak jarang Dalam praktiknya penuntutan hak asasi manusia justru melanggar hak asasi manusia orang lain atau bahkan melanggar norma hukum yang berlaku. Misalnya demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya merasa tidak bersalah meskipun telah jelas merusak.

Hak-hak asasi manusia melekat pada diri setiap individu sehingga tidak dapat dirampas dan dihilangkan dari padanya tanpa merendahkan kedudukan dan martabatnya sebagai manusia. Dalam hal ini individu sebagai anggota dari suatu negara maka negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi dan melindungi hak individu dari warga negaranya. Meski demikian pengakuan akan hak asasi manusia memiliki sejarah yang panjang.

Pada awalnya individu anggota suatu negara hanyalah Abdi penguasa yang hanya boleh bertindak atas izin penguasa. Seiring dengan berjalannya waktu maka pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi setiap dan individu pun mengalami peningkatan meskipun melalui prasejarah yang panjang. Sejak abad ke-13 perjuangan mengungkapkan ide Ham sudah mulai yaitu pada tahun 1219 ditandatanganinya Magna Charta oleh raja Jhon Lackland.

Meskipun piagam ini sebenarnya hanya melindungi kaum tertentu dan tidak termasuk Pegunungan pada kaum muda namun hal ini dianggap merupakan tonggak perjuangan hak asasi manusia bahkan dalam negara hukum pengakuan dan perlindungan HAM merupakan plkeniscayaan dan dianggap sebagai ciri mutlak dari negara hukum.

B. Nilai-nilai dasar dalam HAM

Nilai-nilai universal yang terkandung pada HAM adalah sebagai berikut:

1. Kesamaan

Nilai kesamaan dalam etika politik disebut keadilan. Keadilan adalah keadaan antar manusia di mana manusia diberlakukan sama dalam situasi yang sama. Nilai pertama yang harus dijamin oleh hukum adalah keadilan. Pembukaan undang-undang Dasar 1945 menjamin bahwa dalam mencapai tujuan negara haruslah antara lain berdasarkan keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur ekonomis, politis, budaya dan ideologis.

Struktur-struktur tersebut merupakan struktur kekuasaan yang menyebabkan segolongan orang tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau tidak dapat bagian yang wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan masyarakat secara keseluruhan.

Melaksanakan keadilan sosial berarti membongkar seperlunya struktur-struktur kekuasaan yang ada dan dengan sendirinya akan berhadapan dengan pihak-pihak yang sedang berkuasa. Pihak yang disebut terakhir ini tidak akan tinggal diam mereka tetap berusaha mempertahankan status quo sehingga keuntungan yang didapat dari struktur yang timpang itu tetap berlangsung, karena itu tidak masuk akal mengusahakan keadilan sosial hanya datang dari mereka yang berkuasa. Usaha itu harus datang dari golongan yang menderita ketidakadilan serta kesediaan elit yang berkuasa untuk membuka monopolinya atas kekuasaan tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat bahwa undang-undang Dasar 1945 merupakan sarana bangsa Indonesia untuk membongkar struktur sosial, ekonomi Ideologi dan budaya penjajah yang menyebabkan rakyat Indonesia berada dalam ketidakadilan.

2. Kebebasan

Inti kebebasan ialah bahwa baik setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Kebebasan tidak berarti orang berhak hidup menurut kemuliaan sendiri. Secara hakiki manusia itu adalah individu yang bersifat sosial dimana ia hidup dalam satu jaringan dengan manusia lain dan dengan demikian ia harus memperhatikan serta tergantung pada orang lain. Dengan demikian kebebasannya dibatasi oleh kebebasan pihak lain. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebebasan Itu adalah kebebasan untuk mengurus diri sendiri lepas dari diri sendiri merupakan hak asasi universal.

Kebebasan Ini pertama kali diperjuangkan oleh kaum liberal yang pada mulanya berusaha untuk melindungi kehidupan pribadi dari campur tangan yang dipaksakan oleh pihak lain. Nilai kebebasan mencakup hak untuk hidup kebutuhan jasmani kebebasan mencakup hak untuk hidup kebutuhan jasmani kebebasan bergerak mengurus rumah tangga sendiri hak memilih pekerjaan dan tempat tinggal kebebasan berpikir berkumpul dan berserikat.

3. Kebersamaan

Pengakuan terhadap solidaritas atau kesetiakawanan ini mengharuskan tatanan hukum untuk menunjang sikap sesama anggota masyarakat sebagai senasib dan sepenanggungan. Oleh karena itu tatanan hukum mewajibkan kita untuk bertanggung jawab atas kita semua tidak boleh ada di antaranya dibiarkan menderita apalagi dikorbankan demi kepentingan orang lain.

Atas dasar itu masyarakat melalui negara merasa wajib untuk menjamin bahwa tidak ada anggotanya yang harus hidup menderita karena syarat-syarat objektif tidak terpenuhi. Negara wajib membantu golongan-golongan lemah dan kurang mampu seperti buruh wanita anak-anak korban perang cacat Veteran pengungsi dan korban bencana alam. Usaha negara memberikan fasilitas bagi golongan-golongan tersebut di atas termasuk penyelenggarakan kesejahteraan sosial yaitu sebagai wujud nilai solidaritas antar manusia.

C. Bentuk-bentuk HAM

Hak-hak asasi manusia dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hak sipil yang meliputi hak hidup hak untuk menikah hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum hak untuk memeluk agama dan hak untuk terbebas dari kekerasan.
2. Hak politik yang meliputi hak untuk berserikat dan berkumpul hak untuk menyatakan pendapat secara lisan atau tulisan hak untuk berpendapat di muka umum Termasuk Mencari Suaka
3. Hak ekonomi yaitu Hak untuk memiliki sesuatu memper alihkannya seperti membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya termasuk pula hak atas jaminan sosial hak atas perlindungan kerja ataupun hak perdagangan
4. Hak sosial budaya yang meliputi hak atas kesehatan hak atas pendidikan hak atas kekayaan intelektual hak atas pekerjaan hak atas pemukiman dan perumahan

D. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia

Pada masa-masa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan melalui sidang BPUPKI Muhammad Hatta bersama-sama dengan Muhammad Yamin begitu gigi memperjuangkan masuknya pengaturan mengenai HAM dalam konstitusi Indonesia pertama kali. Hatta memang mengakui bahwa Indonesia didirikan atas dasar kekeluargaan akan tetapi perlindungan atas hak warga negara sebagai individu manusia harus tetap diberikan hatta menjelaskan bahwa:

Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin jangan menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita bangun masyarakat baru berdasarkan kepada gotong royong, usaha bersama, tujuan kita ialah memperbaharui masyarakat, tetapi di sebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan negara baru itu suatu pasal misalnya pasal yang mengenai warga negara supaya tiap-tiap warga negara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu

disebut di sini hak untuk berkumpul dan bersidang atau mensyaratkan dan lain-lain. Formulirnya atau redaksinya boleh disarankan kepada panitia kecil tetapi tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan sebab kita mendasarkan negara kita atas kedaulatan rakyat.

Pada masa 1945 sampai 1950 konsekuensi sebagai suatu negara yang baru berdiri, Indonesia lebih memberikan penekanan kepada hak untuk Merdeka hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan dan hak untuk menyatakan pendapat. Dalam upaya untuk mengimplementasikan hak-hak asasi tersebut maka pemerintah RI memberikan sarannya melalui Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang partai politik dengan tujuan untuk mengatur segala aliran yang ada dalam masyarakat dan pemerintah berharap partai-partai tersebut telah terbentuk sebelum Pemilu DPR pada bulan Januari 1946.

Kemudian perkembangan HAM di Indonesia cukup mengalami perubahan pada masa 1950 sampai 1959 di mana Pada masa itu orientasi terhadap HAM lebih ditekankan pada demokrasi liberal yang mengandeng paham kebebasan individu. Implementasi pemikiran Ham pada periode ini lebih memberi ruang hidup bagi tumbuhnya lembaga demokrasi yang antara lain:

1. Partai politik dengan beragam ideologinya
2. Kebebasan pers yang bersifat liberal
3. Pemilihan umum dengan sistem multipartai
4. Parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah
5. Wacana pemikiran Ham yang kondusif karena memberikan kebebasan

Selanjutnya pada periode 1959 sampai 1966 yang pada periode ini Indonesia berada di bawah naungan demokrasi terpimpin dengan penerapan demokrasi terpimpin ini pemerintah pada masa itu telah melakukan pemasangan HAM yaitu hak sipil seperti hak untuk berserikat berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan sikap pemerintah bersifat pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik warga negara.

Lalu yang berikutnya kita masuk pada perkembangan HAM di era Orde Baru dalam periode pemikiran Ham dapat dilihat dalam tiga kurun waktu yang berbeda Pertama tahun 1967 awal pemerintahan presiden Soeharto berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji materiil yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Kedua kurun waktu 1970 sampai 1980 pemerintah melakukan pemasangan HAM dengan sikap defensif

Bertahan, Represif atau kekerasan yang dicerminkan dengan produk hukum yang bersifat restriktif atau membatasi terhadap HAM. Alasan pemerintah adalah bahwa HAM

merupakan produk pemikiran barat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Luhur budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila. Ketiga kurun waktu 1990-an pemikiran Ham tidak lagi hanya bersifat wacana saja melainkan sudah dibentuk lembaga penegakan HAM seperti Komnas HAM berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993.

Perkembangan berikutnya 1998 sampai sekarang pada periode ini HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen undang-undang Dasar 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Artinya bahwa pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek yaitu aspek hak politik sosial ekonomi budaya keamanan hukum dan pemerintahan.

BAB 28 **KETAHANAN NASIONAL**

A. Pengertian Ketahanan Nasional

Gandamana (2017: 132-145), secara etimologis istilah kata nasional berasal dari bahasa Jawa yaitu *tahan* yang berarti kuat tangguh dan ulet. Kata tersebut juga berarti dapat menguasai diri, tidak mudah. Ketahanan kekuatan, ketangguhan, dan keuletan dalam kerangka kesadaran. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu *Nation* yang berarti bangsa yang telah menegara. Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai National resilience. Dalam terminologi barat terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah *national power*.

Panasnya ketahanan nasional Indonesia memiliki sifat-sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan asas asasnya. Sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia sebagai:

1. Mandiri artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global.
2. Dinamis artinya ketahanan nasional tidaklah tetap melainkan dapat meningkat atau menurun tergantung pada setiap situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Oleh sebab itu upaya meningkatkan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian Kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.
3. Manunggal artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang serasi Dan Selaras diantara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
4. Di bawah artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat Manunggal dan diwujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya Tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya Tangkal suatu negara maka semakin besar pula kewibawaannya.

5. Konsultasi dan kerjasama artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuatan dan kekuatan fisik semata Tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa

Basri mengemukakan bahwa unsur-unsur yang diperlukan untuk membangun ketahanan nasional yaitu:

1. Ketahanan individu yaitu ketahanan yang dimiliki oleh seorang warga negara yang sehat jasmani dan rohani.
2. Ketahanan keluarga yaitu ketahanan yang dimiliki oleh suami istri dan anak dalam keluarga yang harmonis dalam menciptakan kerukunan dalam rumah tangga.
3. Ketahanan wilayah yaitu ketahanan yang memiliki oleh masyarakat di daerah dengan menciptakan stabilitas wilayah secara sejahtera dan aman.
4. Ketahanan nasional yaitu ketan yang dimiliki oleh negara untuk menciptakan stabilitas nasional.

Menurut Lemhanas atau lembaga ketahanan nasional konsepsi ketahan Nasional Indonesia meliputi unsur-unsur atau faktor-faktor yang diistilahkan sebagai gatra. Gatra ketahanan nasional Indonesia dinamakan astagatra atau 8 gatra yang terdiri dari trigatra atau 3 gatra dan pancagatra atau 5 gatra. Adapun trigatra terdiri dari gatra kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam serta gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan pancagatra terdiri dari gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, gatra pertahanan dan keamanan.

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa dalam wujud keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya.

Ketahanan nasional ini haruslah bersifat dinamis agar selalu dapat mengikuti perkembangan keadaan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang selalu berubah-ubah.

B. Ruang lingkup ketahanan nasional

Aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijaga, dikembangkan dan dikonkretkan oleh ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia terutama meliputi bidang-bidang berikut:

1. Bidang ideologi

Sasaran utama ketahanan nasional dalam bidang ideologi terutama adalah bagaimana memelihara dan memberikan keyakinan kepada bangsa Indonesia terhadap ideologinya sendiri yaitu Pancasila. Kemudian dengan keyakinan terhadap filsafat hidup bangsa Indonesia ini diharapkan dapat berperan sebagai perekat bagi persatuan dan kesatuan Indonesia dan sekaligus diharapkan dapat menangkal pengaruh-pengaruh ideologi asing dan cara-cara hidup asing yang tidak lagi baik bagi bangsa Indonesia.

2. Bidang politik

Pantauan ketahanan nasional terhadap bidang politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama ditujukan untuk memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta untuk tetap dapat menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

3. Bidang ekonomi

Pengembangan ketahanan nasional diupayakan dapat menciptakan ruang ekonomi Indonesia yang mandiri dan berdaya saing yang kompetitif dengan produk asing

4. Bidang sosial budaya

Ketahanan nasional dalam bidang sosial budaya senantiasa berupaya Untuk tetap menjaga kelestarian sosial budaya asli Indonesia yang berakar dari Kepribadian Pancasila dan berupaya pula untuk menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia.

5. Bidang pertahanan dan keamanan atau Hankam

Ketahanan nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan memiliki daya jelajah dalam lingkup untuk bagaimana Dapat memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara untuk mengamankan pembangunan nasional, menangkal segala ancaman baik yang datang dari dalam atau dari luar dan terpenting dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

C. Asas-asas ketahanan nasional

Asas pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip yang dianggap mendasar. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan ketahanan nasional adalah sebagai berikut:

1. Asas kesejahteraan dan keamanan

Pada prinsipnya pelaksanaan dan pengembangan ketahanan nasional haruslah diselenggarakan dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan baik secara lahiriyah maupun batiniah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi

2. Asas utuh menyeluruh dan terpadu

Pada prinsipnya dalam penyelenggaraan ketahanan nasional haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara secara seimbang, serasi, sistematis dan harmonis.

3. Asas kekeluargaan

Pada prinsipnya dalam penyelenggaraan ketahanan nasional haruslah didasari dengan suasana kebersamaan, toleransi, gotong royong dan bertanggung jawab.

4. Asas mawas diri

Bahwa dalam berhadapan dengan lingkungan nasional ataupun internasional penyelenggaraan ketahanan nasional pada asasnya haruslah didasari dengan jiwa yang mawas diri terutama dalam menghadapi kapitalisme, globalisasi dan terorisme.

D. Permasalahan geostrategi Indonesia atau ketahanan nasional Indonesia

Masalah pokok pertama dari ketahanan nasional Indonesia jika dilihat dari sudut geopolitik dapat dilihat dari Bagaimana menghadapi paham geopolitik negara-negara lain terutama negara yang mengandalkan power konsep dan bertujuan menciptakan kondisi penguasaan dan dominasi. Lalu permasalahan pokok lain ketahanan nasional Indonesia adalah bagaimana menciptakan hubungan bilateral yang simetris dengan negara-negara lain. Hubungan simetris ini dimaksudkan sebagai hubungan yang didasari motivasi kerjasama saling menguntungkan dan saling menghormati dalam arti duduk sama rata dan tegak sama tinggi.

Dalam kenyataannya tipe hubungan simetris ini sulit dilaksanakan terutama dalam interaksi dengan negara-negara maju. Sebagai contoh hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat hubungan itu pada umumnya bersifat asimetris Indonesia dianggap hanya berpotensi sebagai negara menengah atau kekuatan regional di mana ekonominya belum begitu kuat dalam percaturan internasional. Indonesia dianggap sebagai negara peri-peri dalam sistem politik internasional yang dikuasai negara inti dalam hal ini Amerika Serikat.

Selain itu permasalahan ketahanan nasional Indonesia terletak pada masalah sengketa perbatasan pengaturan zona ekonomi eksklusif penguasaan sumber kekayaan alam maupun pengaturan fasilitas atau sarana perdagangan yang mengandung dimensi kepentingan internasional.

E. Geostrategi Indonesia dalam menciptakan ketahanan nasional yang mantap.

Penciptaan geostrategi Indonesia yang mantap dalam menghadapi segala permasalahan ketahanan nasional diperlukan menurut Iskandar Ramis dalam tesisnya yang berjudul implementasi wawasan nusantara menghadapi perkembangan geopolitik negara-negara di Asia Pasifik implementasi geostrategi Indonesia dilakukan dalam upaya-upaya pemantapan

persatuan dan kesatuan nasional dalam setiap aspek kehidupan masyarakat serta kesatuan wilayah yang meliputi:

1. Geostrategi dengan prinsip kesatuan ideologi

Agar supaya Pancasila tetap dan semakin kokoh menjadi falsafah dan ideologi bangsa yang melandasi kepribadian bangsa dalam pergaulan dan percaturan internasional serta membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tercapainya tujuan dan cita-cita nasional maka:

- a. Perlu dipelihara dan ditingkatkan berbagai bentuk kontak dan komunikasi antar berbagai paham dan lingkungan wilayah negara dan bangsa
- b. Perlu dihindari dan ditanggulangi berbagai bentuk pertikaian paham yang menyusutkan tanggung jawab individual sosial maupun formal serta memperlemah kedudukan Pancasila
- c. Perlu dipelihara dan ditingkatkan keuletan bangsa untuk maju dengan tetap berpijak dan berpedoman kepada Pancasila serta perlu perumusan secara nasional konsep dan aplikasi gotong royong berlandasan kekeluargaan dan kebersamaan dalam rangka Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- d. Perlu dirumuskan berbagai pola perancangan sesuai falsafah Pancasila guna memperoleh hasil hasil pembangunan yang lebih baik dan perlu ditingkatkan kemampuan kelompok dan lapisan-lapisan masyarakat dalam memecahkan berbagai macam persoalan dengan tetap menghindari superioritas kelompok dan lapisan
- e. Perlu dihindari dan ditanggulangi berbagai bentuk kelengahan dan kelalaian para warga dan pimpinan masyarakat atas kemungkinan penyusupan paham-paham anti Pancasila

2. Geostrategi Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan politik

Pemantapan ini dapat dilakukan secara efektif melalui penjabaran atau implementasi bidang politik dari geostrategi Indonesia ke dalam upaya-upaya nyata yang meliputi:

a. Geostrategis sebagai negara kepulauan

Perlu dilakukan langkah-langkah sistematis guna penyelesaian batas-batas wilayah nasional baik batas darat landas kontinen zona ekonomi eksklusif dengan negara-negara Tetangga. Penyelesaian tersebut diselesaikan dengan prinsip-prinsip yang lebih bersifat operasional dari ketahanan nasional yang meliputi:

- 1) Penyelesaian masalah kawasan Ambalat
- 2) Penyelesaian garis batas zona eksklusif ekonomi dan landas kontinen dengan Malaysia dan Vietnam di Laut Cina Selatan. Dengan Malaysia dilakukan pendekatan eqdistance principle sedangkan dengan Vietnam yang menggunakan prinsip deklarasi talweg terlebih dahulu dilakukan pendekatan diplomasi dalam rangka hukum laut internasional.

- 3) Penyelesaian Status Pulau miangas termasuk landasan kontinen laut teritorial dan zona eksklusif ekonominya antara Filipina dan Indonesia. Karena Filipina dan Indonesia justru negara sponsor hukum laut internasional maka koordinasi intensif dengan berdasarkan archiprlago State principle diperkirakan dapat menyelesaikan masalah dengan baik.
- 4) Penyelesaian masalah garis batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen serta perikanan tradisional di sekitar pulau tobiden, Pulau Helen yang termasuk gugusan Kepulauan Republik pulau di Samudra Pasifik.
- 5) Masalah batas landas kontinen di laut Timur, Traditional Fisherring right di Pulau Asmoro dan kartier masalah zona eksklusif ekonomi Pulau Christmas di Samudra Hindia antara Indonesia dengan Australia.
- 6) Pengaturan kembali masalah lalu lintas penerbangan internasional di Sumatera Timur yang saat ini dikendalikan oleh Singapura sepanjang hal tersebut lebih menjamin kedaulatan dan keamanan Indonesia.

b. Implementasi prinsip nasionalisme

- 1) Perlu dipelihara dan ditingkatkan Berbagai usaha yang menjamin rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui tindakan nyata dan tingkah laku terutama dengan semakin gencarnya arus globalisasi yang melanda dunia berkembang. Termasuk dalam hal ini upaya-upaya yang terkait dengan pendidikan pembinaan Pemuda kepramukaan karang taruna. Semangat nasionalisme yang mantap akan membendung pengaruh negatif dari globalisasi yang dapat melunturkan identitas bangsa Indonesia.
- 2) Perlu dipelihara dibina diarahkan dan disalurkan berbagai bentuk perubahan peralihan peredaran dan perputaran sosial untuk menemukan sistem nasional yang semakin menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara antara lain melalui peningkatan dan penguasaan siaran RRI, TVRI serta media cetak sehingga dapat dijangkau dan dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Di samping itu perlu diupayakan peningkatan mutu dan program-program siaran serta kualifikasi juru penerang sehingga Wawasan nusantara sebagai wawasan kebangsaan di dalam segala aspeknya dapat di masyarakat dan dapat di masyarakat dan dipahami oleh rakyat terutama bagi daerah terpencil dan berdekatan dengan negara tetangga.
- 3) Program kerukunan antar umat beragama yang selama ini telah dilakukan diupayakan semakin ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya sehingga dapat menyentuh ke seluruh strata masyarakat dan dapat menjadi teladan bagi negara-negara lain yang sering dilanda kasus-kasus pertikaian agama.

- 4) Perlu dipelihara dan ditingkatkan berbagai bentuk hubungan yang mendekat menyilang dan membawa antara daerah di dalam lingkungan wilayah negara dan bangsa. Dan perlu dihindari dan ditanggulangi berbagai bentuk pertentangan dan pertikaian antar daerah demikian pula teknologi luar negeri hanya akan diserap selama mendukung persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Geostrategi dalam pemantapan persatuan dan kesatuan ekonomi

Pemantapan ini dapat dilakukan secara efektif melalui penjelasan prinsip-prinsip ekonomi wawasan nusantara ke dalam upaya-upaya nyata meliputi:

- a. Implementasi prinsip pemerataan
- b. Sumber daya alam yang dimiliki harus diusahakan untuk diolah menjadi bahan baku industri dengan tujuan pokok untuk sejauh mungkin membebaskan industri dalam negeri dari ketergantungan terhadap industri luar negeri terutama terhadap negara-negara maju yang cenderung bersifat dominasi dan determinasi. Untuk mewujudkan hal ini maka:
 - 1) Penyebaran industri ke berbagai wilayah nusantara sedemikian rupa sehingga mendorong terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa dengan memperhatikan:
 - a) Aspek sosial ekonomis umpamanya adanya upaya peningkatan pendidikan dan kesempatan lapangan pekerjaan yang selayaknya bagi penduduk wilayah di mana industri dibangun.
 - b) Aspek strategi pertahanan nasional

Umpamanya melalui kebijaksanaan penentuan lokasi tertentu bagi industri-industri vital strategis dalam rangka upaya membina pertahanan negara yang tangguh maupun dalam rangka mendukung doktrin dasar pertahanan rakyat semesta.

Pertumbuhan dan perkembangan industri di seluruh wilayah nusantara perlu disahkan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing khususnya dengan memperhatikan aspek keterkaitan antar wilayah dalam memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia sebagai pendukung penyelarasannya pembangunan agar dapat dibina menjadi suatu potensi industri nasional yang mantap.

Pengembangan dan pembangunan industri strategis dan industri inti perlu dilaksanakan secara konsekuensi dan konsisten sehingga dapat dijadikan landasan yang kuat bagi tahap-tahap industrialisasi yang benar-benar mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional di masa-masa mendatang.

Pengembangan dan pembangunan industri maritim dan kedirgantaraan perlu ditangani secara lebih mantap dengan memperhatikan aspek ketahanan dan keamanan. Badan

Usaha Milik Negara industri strategis atau bumi seperti PT PAL di Pindad Batam dan lain-lain perlu diikuti oleh pengembang industri sejenis oleh pihak swasta.

- c. Agar supaya berkembang ekonomi dapat senantiasa diusahakan serasi Dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas daerah dalam pengembangan kehidupan ekonomi maka masing-masing:
 - 1) Perlu dipelihara dan ditingkatkan Penelitian terhadap potensi ekonomi daerah-daerah
 - 2) Perlu dipelihara dan ditingkatkan ciri-ciri dan unsur-unsur ekonomi nasional yang bersifat luas sehingga mampu merangkai ekonomi daerah ke dalam sistem ekonomi yang kuat. Pemerataan maupun penyebaran harus mengembangkan prinsip-prinsip:
 - (a) Mengutamakan kebutuhan bahan pokok masyarakat murah dan merata serta mampu menembus isolasi geografis.
 - (b) Koordinatif integratif sinkronisasi dan simplifikasi dalam penyelenggaraan demi tercapainya hasil yang optimal serta menjaga keseimbangan dalam pengembangan dan pemerataan daerah agar dapat saling mendukung dan membina solidaritas organik dan loyalitas nasional.
 - (c) Menjaga kesinambungan dan konsistensi kebijaksanaan pembinaan distribusi nasional serta keserasian antar subsistem dalam sistem ekonomi nasional.
 - (d) Meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah.
 - (e) Biaya rendah dan terjangkau oleh lapisan rakyat terendah serta mampu mendukung ketahanan nasional dan menumbuhkan daya tangkap terhadap hal-hal yang tak terduga.
- d. **Perlu pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi baik berupa Perhubungan maupun transportasi sedemikian rupa sehingga laut dan udara tidak lagi dirasakan sebagai pemisah tapi merupakan faktor integratif bangsa dan negara Indonesia.**
- e. **Agar supaya kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif tetap dan semakin kokoh menjadi milik dan model bersama bangsa maka:**
 - 1) Perlu dibina dan dikembangkan usaha pemerataan pembangunan daerah dan dihindarinya berbagai bentuk pertikaian keserakahannya penyalahgunaan kesempatan dan kesalahgunakan teknologi asing.
 - 2) Teknologi nasional perlu dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional serta perlu dipelihara dan dikembangkan berbagai bentuk kemampuan dan tanggung jawab pemanfaatannya untuk masa mendatang.
- f. **Implementasi prinsip pertumbuhan ekonomi yang berimbang**

Penerapan prinsip-prinsip perekonomian Pancasila secara konsisten dan terintegrasi meliputi:

- 1) Hak milik perseorangan diakui sebagai hak milik yang berfungsi sosial serta alat-alat produksi yang penting dan strategis berada dalam penguasaan atau pemilikan negara baik berbentuk perusahaan negara koperasi atau perusahaan umum yang sahamnya dimiliki oleh orang banyak.
- 2) Dalam usaha bersama selalu dihindari pertentangan karena yang dipentingkan dan ingin dicapai adalah kesadaran serta keseimbangan dalam pemerataan untuk memenuhi kebutuhan baik material maupun spiritual.
- 3) Asas efisiensi dan produktivitas merupakan nilai Sentral tujuannya adalah agar Bumi Air dan udara serta kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bersama dan bersifat Lestari.
- 4) Sumber daya manusia merupakan faktor penting bukan saja sebagai objek melainkan subjek ekonomi yang memiliki kepercayaan diri.
- 5) Untuk menanggulangi kemiskinan diselenggarakan pemerataan kesempatan berusaha yang pada gilirannya akan membawa perubahan struktural yang lebih baik dan kuat.
- 6) Peran pemerintah dijaga agar tidak sampai mematikan prakarsa dan kreatif dan rangsangan yang sangat diperlukan untuk memupuk kepercayaan dan meningkatkan kemampuan berwiraswasta atau berjiwa interpreneur guna semakin meningkatkan produktivitas. Peranan pemerintah dan sektor negara terutama diperlukan dalam:
 - (1) Perencanaan Sentral terhadap perekonomian nasional penciptaan undang-undang dan peraturan yang menata lembaga dan pranata ekonomi.
 - (2) Menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan sumber-sumber kekayaan alam guna menjamin penggunaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - (3) Melaksanakan kebijaksanaan ekonomi agar lebih mampu mengatur dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya.
 - (4) Menjaga stabilitas ekonomi keserasian lingkungan hidup dan kelestarian sumber-sumber kehidupan.
 - (5) Menciptakan kesejahteraan memelihara fakir miskin serta anak-anak yang terlantar menanggulangi bencana alam dan musibah besar yang dialami dan diderita rakyat.
 - (6) Energi bahan mentah yang semakin lengkap penduduk yang semakin besar dan teknologi yang semakin berperan adalah faktor-faktor yang akan banyak mempengaruhi tata kehidupan ekonomi Indonesia sehingga diperlukan penyesuaian struktur ekonomi dan pola produksi sesuai kemajuan teknologi dan tingkat kehidupan masyarakat.

- (7) Kedaulatan ekonomi nasional menuntut kemampuan untuk dapat berdiri atas kekuatan sendiri sehingga berperan mendorong terwujudnya Tata ekonomi dunia baru yang lebih adil dan membawa kesejahteraan umat manusia.
- (8) Mendayagunakan sumber bahan galian dan energi di darat di laut dan di perairan landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia serta mengatur pelaksanaan eksplorasi eksplorasi pengolahan serta pengumpulan dan penjualannya selanjutnya dikembangkan kemampuan sarana dan tenaga bagi eksplorasi dan eksplorasi bahan galian dan energi di laut yang meliputi koordinasi:
- (a) Keamanan dan keselamatan kerja dalam melaksanakan kegiatan di laut dan ikut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran di laut.
 - (b) Pemasangan alat peralatan bangunan dan Pelabuhan darurat di laut.
 - (c) Memonitor terus-menerus dan cermat perkembangan yang terjadi di bidang pertambangan laut maupun samudra dan laut dan selanjutnya mengadakan evaluasi guna pemanfaatan teknologi tersebut untuk eksplorasi maupun eksplorasi lautan di wilayah yang yuridiksi Indonesia di masa yang akan datang.
 - (d) Guna mengantisipasi perkembangan sistem ekonomi dunia yang menerapkan pola persaingan dalam pasar bebas maka perlu dilakukan upaya yang terus-menerus guna peningkatan mutu produk-produk industri terutama yang menghasilkan komoditi ekspor dalam hal ini pemanfaatan forum AFTA Nafta MEE maupun ADEX sebagai pendorong dalam meningkatkan Efisiensi dan efektivitas sistem produksi. Komoditi atau industri dari negara-negara maju diusahakan dijadikan Mitra atau partner bagi bekerja sama yang saling menguntungkan.

4. Geostrategi dengan prinsip kesatuan pengabdian hukum

Pembinaan hukum nasional yang didirikan dalam program pembangunan yang meliputi:

- a. Program pembaruan hukum yaitu pembentukan seperangkat peraturan perundang-undangan nasional yang berlandaskan Pancasila menggantikan hukum-hukum peninggalan kolonial Belanda yang masih dipakai.
- b. Program pendidikan hukum yaitu guna menghayati cita hukum yang mengabdi kepada kepentingan masyarakat.
- c. Program penjualan hukum yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.

Agar supaya seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional beserta segala perkembangannya maka:

- a. Perlu dipertahankan dan diterapkan hukum dan peraturan yang berwatak nasional adanya peradilan peradilan yang bersifat umum agama tata usaha negara maupun Peradilan Militer merupakan kebutuhan objektif yang tetap mengabdi kepada hukum nasional.
- b. Perlu dibina dan dikembangkan hukum adat dan peraturan daerah yang telah berotak luas dan mendukung hukum nasional serta perlu ditiadakan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan kepribadian nasional.
- c. Hak dan kewajiban warga negara memerlukan Pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang atau peraturan lainnya.

5. Geostrategi dalam pemantapan persatuan dan kesatuan sosial budaya.

Pemantapan ini dapat dilakukan secara efektif melalui penjabaran atau implementasi prinsip-prinsip wawasan nusantara dalam upaya-upaya nyata meliputi:

- a. Implementasi prinsip keserasian keseimbangan dan keselarasan:
 - (1) Selalu diupayakan dan dipelihara terciptanya keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan antara sesama manusia antara manusia dengan lingkungannya dan keserasian hubungan antara bangsa secara wajar dan bertanggung jawab.
 - (2) Pengaruh asing disaring demi terpeliharanya kemurnian pelaksanaan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dan perlu diciptakan sistem seleksi dan edukasi yang mampu mencegah eksis-eks yang merugikan kehidupan bangsa.
 - (3) Pembentukan manusia Indonesia ditunjukkan pada perwujudan pribadi yang mandiri dan senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai budaya bangsa tanpa menutup diri terhadap lingkungan dunia luar.
 - (4) Hubungan antara warga negara kehidupan sosial politik dan budaya dilandaskan pada asas kekeluargaan dan keseimbangan dicerminkan dalam sikap rukun tanpa selera hormat-menghormati toleransi saling ASI saling Asa saling asuh dan tidak semena-mena.
 - (5) Keanekaragaman kehidupan sosial dan budaya bangsa sebagai suatu kenyataan sosial diupayakan untuk mendorong mantapkan kebudayaan nasional dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Implementasi prinsip Bhinneka Tunggal Ikaan agar supaya bahwa budaya Indonesia tetap dan lebih Kokoh lagi dalam berhakikat satu maka:
 - (1) Perlu pemeliharaan dan peningkatan fungsi budaya-budaya daerah dalam fungsinya sebagai landasan perkembangan budaya bangsa serta pembentukan kepribadian warganya.

- (2) Perlu pemeliharaan dan peningkatan fungsi-fungsi budaya bangsa untuk menjadi budaya nasional dengan kristalisasi kepribadian Indonesia perlu antisipasi pengaruh pesat dari budaya Cina dan barat yang diperkirakan akan semakin kuat.
- (3) Pendidikan pengembangan ilmu dan pemanfaatan teknologi sebagai sarana pengembangan sosial dan budaya bangsa diarahkan untuk mewujudkan manusia pembangunan yang berbudi luhur.
- (4) Komunikasi digunakan untuk pengembang mutu hidup manusia dan membangkitkan kepekaan kesadaran nasional akan Cipta Rasa Karsa dan karya serta memperhatikan terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- (5) Kehidupan berketuan yang maha esa diwujudkan dalam tingkah laku etis terhadap masyarakat dan lingkungannya guna menetapkan penyelenggaraan kehidupan sosial dan budaya bangsa.

6. Geostrategi dalam pemantapan persatuan dan kesatuan Hankam

Pemantapan ini dapat dilakukan secara efektif melalui penjabaran atau implementasi prinsip-prinsip wawasan nusantara ke dalam upaya-upaya nyata meliputi:

Implementasi prinsip kesemestaan kesemestaan dan kewilayahian:

a. Realisasi politik pertahanan keamanan didasarkan atas paham Cinta Damai Tetapi lebih cinta kemerdekaan dan hanya berperang bilamana eksistensi bangsa dan negara terancam, apabila bangsa dan negara dipaksa ditempatkan pada keadaan untuk melakukan kekerasan senjata atau menjalankan perang maka pertimbangan yang digunakan adalah:

- (1) Mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa dan negara serta peran yang dilakukan merupakan perang keadilan bersifat semesta dengan mengerahkan seluruh potensi nasional.
- (2) Tidak ada jalan lain telah segala usaha penyelesaian secara musyawarah mufakat gagal dan perang akan dilakukan secara semesta dalam bentuk defensif strategis dan ofensif dan taktis.

b. Implementasi prinsip doktrin Hankamneg

Hubungan antar wilayah dalam sistem pertahanan dan keamanan negara merupakan satu kesatuan yang organisasi utuh semua yang berada di bumi air dan udara sesuai fungsinya merupakan potensi pertahanan keamanan nasional dan wilayah dengan segala isinya dijadikan ruang alat juang yang tangguh bagi perjuangan mempertahankan negara dan bangsa. Pemantapan doktrin pelaksanaan hankamneg doktrin pelaksanaan merupakan landasan bagi langkah tindak dalam lingkup subsistem nasional bidang hankamneg diturunkan dari doktrin

dasar nasional yang sudah teruji ketangguhannya Berdasarkan pengalaman sejarah doktrin dan pelaksanaan hankamneg dilaksanakan diletakkan pada landasan sikap dan pola:

- (1) Rakyat sebagai kekuatan dasar TNI sebagai kekuatan inti serta Segala potensi nasional secara terpadu akan menghadapi musuh yang mengancam.
 - (2) Kesatuan wilayah yang berarti bahwa tak sejengkal bagian tanah air pun direlakan untuk dikuasai musuh.
 - (3) Ulat tangguh dan tidak kenal menyerah dan percaya pada kekuatan sendiri.
- c. Implementasi prinsip kerakyatan

Berdasarkan prinsip utama kerakyatan maka digunakan dan dikembangkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang teratur dengan memanfaatkan sistem senjata teknologi dan sistem senjata sosial secara rasis sistem ini dijabarkan melalui konsep-konsep:

- 1) Adalah hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya membela kemerdekaan negara di mana rakyat dan TNI bersama-sama melakukan fungsi pembelaan negara
- 2) Pemeliharaan dan peningkatan secara terus-menerus kesadaran setiap warga negara dalam pembelaan negara melalui penyuluhan pendidikan dan latihan yang dilakukan sejak dini
- 3) Pengertian rakyat sebagai kekuatan dasar ialah rakyat yang melakukan perlawanan yang memancarkan efek Tangkal terhadap musuh sebelum musuh menyerang sedangkan pengertian TNI sebagai kekuatan inti mencakup tiga makna:
 - a) Inti dari pemekaran perlawanan bersenjata serta pendidikan dan pelatihan rakyat
 - b) Penangkap segerakan terhadap serangan musuh
 - c) Pertahanan keamanan mempersyaratkan keterampilan perlawanan bersenjata maupun tanpa bersenjata dari seluruh rakyat secara terpadu dan proporsional sesuai tingkat dan ekskalasi ancaman yang dihadapi

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, Ali. 2016. *Pendidikan Pancasila: di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arafat, Maulana. 2018. *Pembelajaran PPKn di SD/MI*. Medan: Akasha Sakti.
- Busrizalit. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan: Negara kesatuan HAM dan Demokrasi, dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Total Media.
- Eveline dan Hartini Nara. 2010. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fachry, dkk. 2017. *Strategi Belajar-Mengajar*. Medan: UNIMED Press.
- Gandamana, Apiek. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Perguruan Tinggi*. Medan: Unimed Press.
- Hamruni. 2012. *Strategi Pembelajaran*. Yogyakarta: Insan Madani.
- Istarani. 2012. *58 Model Pembelajaran Aktif: Referensi Guru dalam Menentukan Pembelajaran*. Medan: Media Persada.
- Mursini. 2012. *Pengembangan Bahan Ajar: Bahasa dan Sastra Indonesia*. Medan: UNIMED Press.
- Ngalimun. 2014. *Strategi dan Model Pembelajaran*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Nurmawati. 2014. *Evaluasi Pendidikan Islam*. Bandung: Citapustaka Media.
- Purwanto. 2011. *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman dan Purwanto. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sabri, Ahmad. 2010. *Strategi Belajar-Mengajar*. Ciputat: Quantum Teaching.
- Setiawan. Deny. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Medan: Madenatera.
- Sumiati dan Asra. 2013. *Metode Pembelajaran*. Bandung: Wacana Prima.
- Susanto, Ahmad. 2013. *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah*. Jakarta: Kencana.
- Sunarto dan Agung Hartono. 2008. *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Rineka Cipta.

Taniredja, Tukiran. 2013. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak.

Thamrin. 2017. *Perencanaan Pembelajaran*. Medan: UNIMED Press.

Usiono. 2012. *Pancasila: Membangun Karakter Bangsa*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama.

Winarno. 2008. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wuryandani, Wuri dan Fathurrohman. 2012. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Ombak.